

**KONFERENSI ASIA AFRIKA I 18 – 24 APRIL 1955 DI BANDUNG
(SUATU TINJAUAN HISTORIS POLITIK LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Sejarah



Disusun Oleh :

Sura Muharyanto

011314039

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA**

2006

SKRIPSI
KONFERENSI ASIA AFRIKA I 18 – 24 APRIL 1955 DI BANDUNG
(SUATU TINJAUAN HISTORIS POLITIK LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA)

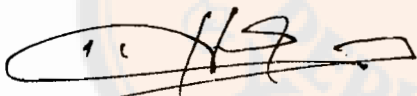
Oleh :

Sura Muharyanto

NIM : 011314039

Telah disetujui oleh :

Pembimbing I



Prof. Dr. P.J. Suwarno., S.H.

Tanggal 10 Oktober 2006.

Pembimbing II



Drs. A.K. Wiharyanto., M.M.

Tanggal 10 Oktober 2006.

SKRIPSI
KONFERENSI ASIA AFRIKA I 18 – 24 APRIL 1955 DI BANDUNG
(SUATU TINJAUAN HISTORIS POLITIK LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA)

Dipersiapkan dan ditulis oleh :

Sura Muharyanto

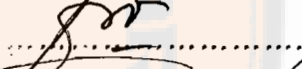
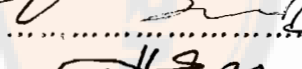
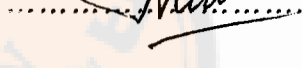
NIM : 011314039

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji

Pada tanggal 04 November 2006

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji

Nama Lengkap		Tanda Tangan
Ketua	: Drs. Sutardjo Adisusilo J.R., S. Th.	
Sekretaris	: Drs. B. Musidi., M. Pd.	
Anggota	: Drs. Sutardjo Adisusilo J.R., S. Th.	
Anggota	: Prof. Dr. P. J. Suwarno., S. H.	
Anggota	: Drs. A. K. Wiharyanto., M. M.	

Yogyakarta, 04 November 2006.

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Sanata Dharma

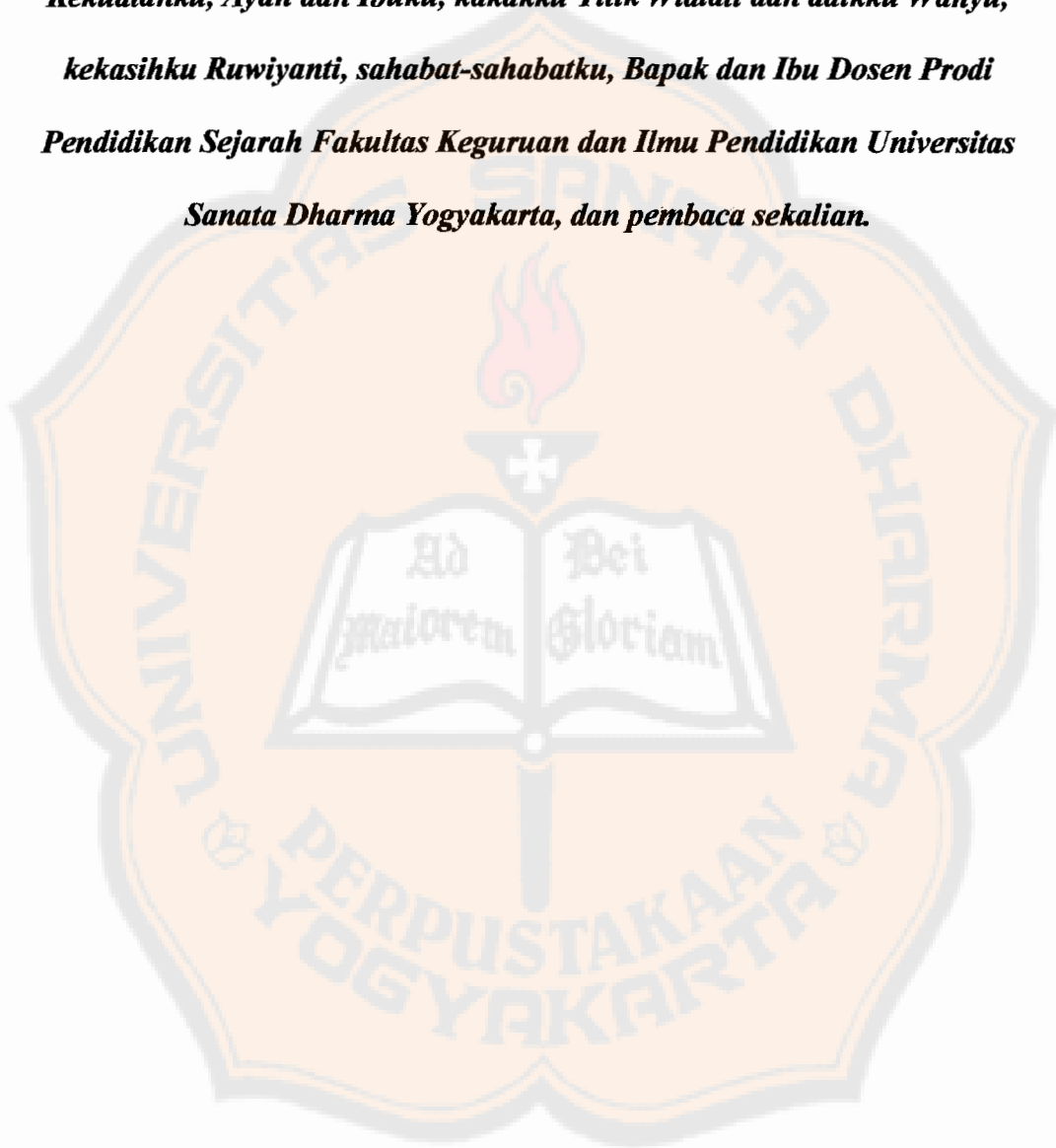


Dekan,


Drs. Tarsisius Sarkim, M.Ed, Ph.D.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan kepada Allah S.W.T sumber Pelindung dan Kekuatanku, Ayah dan Ibuku, kakakku Titik Widiati dan adikku Wahyu, kekasihku Ruwiyanti, sahabat-sahabatku, Bapak dan Ibu Dosen Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, dan pembaca sekalian.



MOTTO

Allah S.W.T tidak akan membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya (Al Baqoroh : 286).

Tempuhlah jalan hidup yang kelihatannya menanjak akan tetapi di sana menanti kebahagiaan sejati, daripada menempuh jalan yang kelihatannya menurun akan tetapi di sana menanti jurang yang terjal dan gelap (Bob Sadino).

Bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan barang siapa yang tidak bersyukur maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi maha Terpuji (Luqman :12).

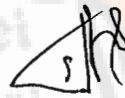
Bangunlah selalu Optimisme, hilangkanlah rasa Pesimismu. Janganlah putus asa dalam menghadapi segala persoalan dan kesulitan, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan.

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 04 November 2006.

Penulis



Sura Muharyanto

ABSTRAK

**KONFERENSI ASIA AFRIKA I 18 – 24 APRIL 1955 DI BANDUNG
(SUATU TINJAUAN HISTORIS POLITIK LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA)**

**Oleh : Sura Muharyanto
NIM : 011314039**

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisa Konferensi Asia Afrika I 18 – 24 April 1955 di Bandung (Suatu Tinjauan Historis Politik Luar Negeri Republik Indonesia). Dalam skripsi ini ada tiga permasalahan yang akan dibahas, yaitu : (1) Faktor-faktor pendukung sehingga Konferensi Asia Afrika I tanggal 18 – 24 April 1955 di Bandung dapat terselenggara, (2) Jalannya Konferensi Asia Afrika I tanggal 18 – 24 April 1955 di Bandung, dan (3) Hasil dari Konferensi Asia Afrika I tanggal 18 – 24 April 1955 di Bandung.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah, yang mencakup : heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sejarah dan politik. Penulisan skripsi ini dikaji secara diskriptif analitis.

Hasil penelitian ini mengatakan bahwa Konferensi Asia Afrika adalah Konferensi antara dua puluh sembilan (29) negara Asia Afrika yang berbeda latar belakang politik, ekonomi, dan kebudayaannya. Konferensi Asia Afrika diselenggarakan dalam suasana meningkatnya perjuangan bangsa-bangsa terjajah untuk kemerdekaan dan dalam suasana meningkatnya persatuan atau solidaritas negara-negara berkembang dan merdeka untuk menggalang kerjasama dalam mencari jalan meredakan ketegangan akibat Perang Dingin. Konferensi Asia Afrika terselenggara karena ada faktor pendukungnya, yaitu : kuat dan mendalamnya cita-cita solidaritas Asia Afrika berdasarkan 3 jiwa dalam hati sanubari bangsa Asia Afrika (tercermin pada suara mereka dalam pertemuan solidaritas Asia Afrika di Kota Bierville dan Brussel), situasi dan kondisi Tahun 1954–1955 yang menjadi ladang subur untuk tumbuh dan berseminya cita-cita solidaritas Asia Afrika, dan peran aktif Indonesia dalam mencetuskan gagasan kerjasama Asia Afrika sebagai langkah untuk mewujudkan program politik luar negerinya.

ABSTRACT

**ASIAN AFRICAN CONFERENCE I AT BANDUNG 18 – 24TH APRIL 1955
(A HISTORICAL EVALUATION OVERSEAS POLITICS
REPUBLIC OF INDONESIAN)**

**By : Sura Muharyanto
NIM : 011314039**

This paper was written in order to describe and analyze matter concerning the Asian African Conference I at Bandung 18 – 24th 1955 (A Historical Evaluation Overseas Politics Republic of Indonesian). In this paper, there are three issues to be discussed, which are : (1) Factors supporter so that have Asian African Conference I at Bandung 18 – 24th April 1955 earn well-held, (2) The way Asian African Conference I at Bandung 18 – 24th April 1955, and (3) Result of Asian African Conference I at Bandung 18 – 24th April 1955.

The method being used in this research was historical method that cover : heuristic, resource critic, interpretation, and historiography. The approach being used in the research was historical and political approach. To write this paper, a descriptive-analysis was applied.

The results of the research revealed that the Asia-Africa Conference was a conference followed by twenty-nine (29) Asia-Africa countries with different political, economic and cultural backgrounds. The conference was held in the atmosphere of the colonized nations' increased struggle for independence and the increased unity or solidarity of the developing and independent countries to put cooperation on a firm footing to find solutions for mitigating the strained situation due to the Cold War. The implementation of the Asia-Africa Conference was not apart from the supporting factors, namely the firm and profound solidarity ideals among the Asia-Africa nations based on three spirits (reflected on their votes in the solidarity forum of Asia-Africa in Bierville and Brussel), the situation and condition in 1954 – 1955 were being a good field for the growth and sprout of solidarity ideals of Asia-Africa, and the active role of Indonesia in proposing idea of Asia-Africa cooperation as a measure to make real the foreign policy program.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah S.W.T. atas rahmat, taufik, dan hidayahnya sehingga penulisan skripsi berjudul *Konferensi Asia Afrika I 18 -- 24 April 1955 di Bandung (Suatu Tinjauan Historis Politik Luar Negeri Republik Indonesia)* ini dapat terselesaikan.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Sanata Dharma, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Program Studi Pendidikan Sejarah.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis berkeinginan menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
2. Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengadakan penelitian.
3. Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengadakan penelitian.
4. Bapak Prof. Dr. P.J. Suwarno., S.H., selaku Dosen Pembimbing I, yang dengan penuh kesabaran, perhatian, dan pengertian membimbing penulis, serta memberikan banyak saran, masukan, pikiran, dan referensi yang mendukung dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
5. Bapak Drs. A.K. Wiharyanto., M.M., selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran, perhatian dan pengertian membimbing penulis, serta memberikan banyak saran, masukan, pikiran, dan referensi yang mendukung dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

6. Bapak Drs. Y.R. Subakti., M.Pd., selaku Dosen pembimbing akademik, Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah, dan pihak Sekretariat Sejarah yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini khususnya dan dukungan selama penulis menyelesaikan studi di Universitas Sanata Dharma.
7. Staf Perpustakaan Universitas Sanata Dharma dan Staf Museum Konferensi Asia Afrika Bandung, yang telah memberikan pelayanan kepada penulis dalam mendapatkan referensi.
8. Teman-teman Program Studi Pendidikan Sejarah angkatan 2001, serta semua sahabat dan kenalan; atas dukungan, persahabatan, kerjasama, dan kebersamaannya selama penulis menyelesaikan studi di Universitas Sanata Dharma.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun sebagai upaya penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca sekalian pada umumnya dan bagi Universitas Sanata Dharma pada khususnya.

Yogyakarta, 04 November 2006.



Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERSEMBAHAN	iv
MOTTO	v
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
1. Tujuan Penelitian	10
2. Manfaat Penelitian	11
D. Kajian Pustaka dan Landasan Teori	11
1. Kajian Pustaka	11
2. Landasan Teori	27
E. Hipotesis	42
F. Metodologi Penelitian	46
1. Metode Pengumpulan Data dan Analisis Data	46
2. Metode Penulisan	53
G. Sistematika Penulisan	54

BAB II	FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG TERSELENGGARANYA	56
	KONFEENSI ASIA AFRIKA I 18 – 24 APRIL 1955 DI	
	BANDUNG	
A.	Latar Belakang Konferensi Asia Afrika I di Bandung	56
B.	Politik Luar Negeri R I Menjelang Konferensi Asia Afrika I	64
	di Bandung	
C.	Keadaan Hubungan Internasional Menjelang Konferensi	72
	Asia Afrika I di Bandung	
D.	Cita-cita Konferensi Asia Afrika I di Bandung	76
BAB III	JALANNYA KONFERENSI ASIA AFRIKA I 18 – 24 APRIL	89
	1955 DI BANDUNG	
A.	Persiapan Konferensi Asia Afrika I di Bandung	89
B.	Sidang Pembukaan Konferensi Asia Afrika I di Bandung	101
C.	Jalannya Sidang Konferensi Asia Afrika I di Bandung	105
D.	Sidang Penutupan Konferensi Asia Afrika di Bandung	118
BAB IV	HASIL AKHIR KONFERENSI ASIA AFRIKA I 18 – 24	123
	APRIL 1955 DI BANDUNG	
A.	Hasil Umum Konferensi Asia Afrika I di Bandung	123
B.	Hasil Khusus Konferensi Asia Afrika I di Bandung	131
BAB V	PENUTUP	138
A.	Kesimpulan	138
B.	Saran	140
DAFTAR PUSTAKA		142
LAMPIRAN		145

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 : Gambar lima (5) Perdana Menteri Sponsor KAA	145
Lampiran 2 : Gambar gedung tempat berlangsungnya KAA	146
Lampiran 3 : Daftar nama dan foto Ketua delegasi Negara peserta KAA	149
Lampiran 4 : Daftar susunan Delegasi peserta KAA	155
Lampiran 5 : Susunan Komite (Sub-Panitia) Sekretariat Bersama	161
Lampiran 6 : Susunan Panitia Interdepartemental di Jakarta dan Panitia Lokal di Bandung	163
Lampiran 7 : Susunan Panitia Interdepartemental Politik	165
Lampiran 8 : Gambar Sidang Pembukaan KAA oleh Presiden Sukarno	166
Lampiran 9 : Pidato-pidato Pembukaan Para Ketua delegasi	167
Lampiran 10 : Gambar Jalannya Sidang Pleno Tertutup Tiga Panitia	185
Lampiran 11 : Komunike Akhir KAA	188
Lampiran 12 : Peta Letak Negara Peserta KAA I di Bandung	194
Lampiran 13 : Silabus	195

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berakhirnya Perang Dunia II, maka konfigurasi politik dunia ditandai oleh munculnya dua kekuatan raksasa dunia yang saling bertentangan, yakni Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kedua kekuatan itu saling bertentangan dan berlomba-lomba menyusun dan mengembangkan kekuatannya secara politis maupun militer meliputi pengembangan senjata nuklir. Situasi pertentangan itu disebut Perang Dingin. Masing-masing pihak menuntut supaya semua negara di dunia ini menjatuhkan pilihannya kepada salah satu blok.¹

Suatu pengakhiran terhadap perlombaan senjata, secara luas dianggap diperlukan atas dasar-dasar kemanusiaan, politik dan ekonomi. Namun dari pengalaman yang ada sejak Perang Dunia I dan II telah nyata, bahwa keadaan politik dunia membuat perlucutan senjata tidak mungkin. Dengan adanya kegagalan total atas usaha-usaha perlucutan senjata, maka suatu pemerintahan menyatakan perlucutan senjata, yang mendambakan perdamaian dan pembebasan dari beban-beban persaingan persenjataan. Himbauan ini menjadi sarana untuk tujuan membuat politik luar negeri yang sebenarnya sedang dijalankan lebih dapat diterima oleh bangsa-bangsa lain.²

¹ Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta : Balai Pustaka, 1993, hlm. 236.

Dengan kerjasama antar bangsa-bangsa Asia Afrika, Indonesia akan menegaskan posisi dan akan memperdengarkan suaranya terhadap persoalan-persoalan dunia, khususnya masalah-masalah yang menyangkut kepentingan bangsa-bangsa di Asia Afrika. Ir. Soekarno dalam sebuah artikelnya yang berjudul *Indonesianisme* dan *Pan Asiatisme* pernah mengemukakan pentingnya kesadaran kesetiakawanan antar bangsa Asia Afrika yang pada masa itu sedang berjuang untuk kemerdekaan dan keadilan. Ir. Soekarno yakin, bahwa jiwa *Pan Asiatisme* itu dapat bangkit di dalam jiwa nasionalisme Indonesia karena adanya persamaan nasib yang akan melahirkan persatuan perangai dan rasa nasionalisme.

Sejak tahun 1945 dasar politik negara Indonesia adalah bebas dan aktif. Rumusan bebas aktif ini berdasarkan alasan bahwa Perang Dingin antara dua blok raksasa (Amerika Serikat dan Uni Soviet) telah dirasakan mempengaruhi kehidupan negara-negara di seluruh dunia terutama negara-negara Asia dan Afrika yang baru saja mencapai kemerdekaan. Rumusan politik luar negeri Republik Indonesia itu sebenarnya mempunyai maksud yakni, Republik Indonesia berkeinginan untuk tidak memihak pada Blok Barat atau Blok Timur "netral". Akan tetapi netralnya dalam artian positif bukan negatif, karena politik luar negeri Republik Indonesia menginginkan ikut serta dalam percaturan politik dunia secara aktif. Dengan kata lain, politiknya itu tidak ditujukan kepada negara-negara yang bersengketa, melainkan ditujukan

² Dahlan Nasution. *Perang atau Damai dalam Wawasan Politik Internasional*. Bandung : Remadja Karya CV Bandung, 1984, hlm. 73.

kepada masalah perdamaian. Terhadap dua Blok besar ia tidak memihak, tetapi sebaliknya ia mengambil jalan sendiri dalam menghadapi berbagai masalah Internasional.

Pemerintah Republik Indonesia memberikan keterangan berikut di muka Badan Pekerja Komite Nasional pada tanggal 2 September 1948 mengenai arah yang tepat bagi kebijaksanaan politik luar negeri :

“Tetapi mestikah bangsa Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara kita, hanya harus memilih antara pro Rusia atau pro Amerika ? Apakah tidak ada pendirian yang lain yang harus kita ambil dalam mengejar cita-cita kita ? Pemerintah berpendapat bahwa pendirian yang harus kita ambil ialah supaya kita jangan menjadi objek dalam pertarungan politik Internasional, melainkan kita harus tetap menjadi subjek yang berhak menentukan sikap kita sendiri, berhak memperjuangkan tujuan kita sendiri, yaitu Indonesia merdeka seluruhnya”.³

Pikiran tentang mempererat kerjasama antara negara-negara Asia Afrika sebenarnya mulai dikemukakan pada sidang-sidang Parlemen oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo pada tanggal 25 Agustus 1953 yang antara lain berbunyi, sebagai berikut :

“Kerjasama dalam golongan negara-negara Asia Arab (Afrika) kami pandang penting benar, karena kami yakin bahwa kerjasama erat antara negara-negara tersebut tentulah akan memperkuat usaha ke arah tercapainya perdamaian dunia yang kekal. Kerjasama antara negara-negara Asia Afrika tersebut adalah sesuai benar dengan aturan dalam P.B.B. yang mengenai kerjasama kedaerahan (*regional arrangements*). Lain dari itu, Negara-negara itu pada umumnya memang pendirian-pendirian yang sama dalam beberapa soal dilapangan Internasional, jadi mempunyai dasar sama (*common-ground*) untuk mengadakan

³ Michael Leifer. *Politik Luar Negeri Indonesia*. Jakarta : PT. Gramedia, 1986, hlm. 30.

golongan yang khusus. Dari sebab itu, kerjasama tersebut akan kami lanjutkan dan pererat".⁴

Untuk melaksanakan program di atas, diadakanlah 2 konferensi antara Perdana Menteri dari lima negara Asia, yaitu pertama konferensi di Colombo pada tanggal 28 April sampai 2 Mei 1954, dan yang kedua konferensi Bogor pada tanggal 28 - 29 Desember 1954. Lima negara yang dimaksud itu, ialah Birma, India, Indonesia, Pakistan, dan Srilanka. Sebelum konferensi-konferensi tersebut dilaksanakan, pikiran tentang kerjasama negara-negara Asia Afrika sudah dipersiapkan dan terlebih dahulu secara mendalam dan meluas di dalam suatu Konferensi Dinas antara kepala-kepala Perwakilan di negara-negara Asia Afrika yang diadakan oleh Menteri Luar Negeri di Tugu dari tanggal 9 sampai dengan 22 Maret 1954.

Bagi negara-negara Adikuasa pengertian perdamaian tidak dilepaskan dari persyaratan-persyaratan masing-masing sehingga menjadi doktrin yang didukung oleh kekuatan senjata pemusnah massal. Dalam keadaan keseimbangan kekuatan nuklir, maka kemungkinan saling menghancurkan menjadi strategi penangkalan negara-negara Adikuasa.

Tidak ada pihak yang secara Unilateral bersedia mengurangi *arsenal* persenjataannya serta mengharapkan agar tindakannya diikuti oleh pihak lainnya. Politik adu kekuatan serta doktrinnya masing-masing telah membelenggu kedua negara Adikuasa itu. Dalam keadaan buntu serta

⁴ Kementerian Penerangan RI. *Keterangan Pemerintah tentang Konferensi Asia Afrika di Bandung*. Jakarta : Yayasan Idayu, 1955, hlm. 1.

macetnya antara kedua pihak dalam politik adu kekuatan yang tidak dapat memberikan kemenangan dalam perdamaian itu, maka terbukalah jalan keluar bagi alternatif terhadap adu kekuatan. Alternatif ini tidak memihak kepada salah satu pihak yang berkompetisi, namun bersikap netral positif.⁵

Istilah Perang Dingin telah didefinisikan oleh Charles O' Lerche sebagai kontroversi diplomatik didalam negara-negara berperang satu sama lain dengan segala senjata yang dipunyai kecuali kekerasan bersenjata. Perang Dingin muncul dengan segera setelah Perang Dunia II mempunyai arti bahwa didalam konteks hubungan Internasional yang ada terjadi suatu *Struggle for Power* besar-besaran melalui konflik-konflik politik diplomatik dan ideologi antara dua blok yang berlawanan blok Kapitalis dipimpin oleh Amerika dan blok Komunis dipimpin Uni Soviet. Taktik yang digunakan yaitu tekanan ekonomi, perang ideologis, psikologis dan propaganda, tindakan-tindakan politik, penggunaan angkatan bersenjata terbatas dan beberapa kombinasi dari faktor-faktor tersebut.⁶

Akar dari Perang Dingin bisa dilacak dari ambisi masing-masing *Super Power* yang tidak cocok dan juga ideologi mereka yang bertentangan. Disatu sisi tujuan Uni Soviet sesudah perang adalah menjamin keamanan nasionalnya terhadap kemungkinan agresi dan memodifikasi *Status Quo Internasional* dengan penyebaran yang cepat Ideologi Komunis. Perang Dingin kemudian

⁵ Dahlan Nasution, *op.cit.*, hlm. 52.

⁶ S.L. Roy. *Diploma Manajemen*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 104.

menjadi perjuangan Timur Barat.⁷ Dalam menyusun dan mengembangkan kekuatan politik dan militer keduanya berusaha agar negara-negara yang ada di dunia ini berpihak kepada diri mereka masing-masing.

Republik Indonesia tidak memilih salah satu pihak, melainkan memilih jalan sendiri sesuai dengan cita-cita nasionalnya untuk menciptakan kerjasama dan mengadakan hubungan yang baik dengan bangsa-bangsa lain dalam suasana perdamaian dunia. Politik yang dijalankan dikenal dengan sebutan politik bebas aktif yang berarti menjalankan kebijaksanaan politik luar negeri sesuai dengan apa yang tercantum didalam alinea terakhir dari Pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan, antara lain : “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.⁸

Pada masa Revolusi nasional dikenal dua cara pelaksanaan politik luar negeri yang sangat berbeda. Cara pertama, adalah diplomasi yang merupakan alat dalam hubungan Internasional untuk menjamin pengakuan kedaulatan. Cara lain, adalah perjuangan bersenjata yang timbul dari suatu kenyataan bahwa kemerdekaan sejati hanya dapat diperoleh melalui konfrontasi yang tidak mengenal kompromi dengan pihak penjajah. Politik luar negeri suatu negara senantiasa sesuai dengan kepentingan nasionalnya. Sejak dahulu hingga sekarang, ternyata bahwa corak diplomasi yang paling menonjol adalah

⁷ *Ibid.*, hlm. 106.

⁸ H.M. Sabir. *Politik Bebas Aktif Tantangan dan Kesempatan*. Jakarta : CV Haji Masagung, 1987, hlm. 24.

menjaga keselamatan negara. Soal aman serta tidak aman mempengaruhi jalannya politik luar negeri suatu negara.⁹

Ide solidaritas Asia Afrika bukan ide baru, melainkan suatu ide yang sudah lama dikenal sejak pergerakan nasional. Ide ini dapat bersemi dan kemudian timbul dengan pesat, karena adanya persamaan keadaan yang berabad-abad diderita dan dialami oleh bangsa Asia Afrika. Dalam perjuangan melawan Kolonialisme dan Imperialisme, maka mempengaruhi bangsa-bangsa Asia Afrika dengan sedalam-dalamnya bahwa mereka masing-masing harus dipersatukan.¹⁰

Setelah Indonesia merdeka, rakyat menuntut dari pemerintahnya agar cita-cita tentang keadaan sosial dan kemakmuran rakyat segera diselenggarakan. Semboyan yang sering terdengar setelah Perang Dunia II, yaitu kemerdekaan berpikir, kemerdekaan agama, bebas dari rasa takut, bebas dari kemelaratan telah menjadi dasar pokok dalam pembangunan negara dan masyarakat. Untuk melaksanakan cita-cita itu Indonesia perlu mengadakan hubungan dan kerjasama yang baik dengan bangsa-bangsa lain.

Pada awal tahun 1954 Indonesia mendapat surat undangan dari Pemerintah Srilanka untuk menghadiri Konferensi Panca Perdana Menteri di Colombo pada bulan April 1954 dalam rangka membahas situasi di Indochina, agresi komunis di bumi Asia, dan perkembangan senjata nuklir yang kian

⁹ Moh Hatta. *Dasar Politik Luar Negeri Republik Indonesia*. Jakarta : Tinta Mas, 1953, hlm. 2 – 4.

¹⁰ Roeslan Abdulgani. *Sejarah Cita-cita dan Pengaruhnya Konferensi Asia – Afrika Bandung*. Jakarta : Idayu Press, 1977, hlm. 15.

memprihatinkan serta mengkhawatirkan. Dengan senang hati Pemerintah Indonesia menerima surat undangan itu, karena sesuai benar dengan garis politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Dalam Konferensi Panca Perdana Menteri di Colombo inilah Indonesia mendapatkan kesempatan untuk mengusulkan supaya diadakan suatu konferensi yang sama hakekatnya dengan konferensi Colombo sekarang, yaitu konferensi yang jangkauannya tidak hanya terbatas negara-negara Asia saja tetapi juga beberapa negara Afrika.

Indonesia mengusulkan seperti itu atas dasar alasan, bahwa dengan kerjasama antara negara Asia dan Afrika akan memperkuat usaha ke arah tercapainya perdamaian dunia dan kerjasama itu sesuai benar dengan aturan-aturan P.B.B. mengenai kerjasama kedaerahan. Serta, negara Asia Afrika pada umumnya mempunyai pendirian yang sama dalam beberapa soal di lapangan Internasional untuk mengadakan golongan yang khusus, sehingga perlu dilanjutkan dan dipererat. Selain itu, secara nyata dalam forum P.B.B. memang telah ada atau muncul konsultasi dan kerjasama antar negara Asia Afrika, namun sebaliknya di luar forum P.B.B. wadah untuk mengadakan kerjasama tersebut belum tersedia. Oleh karena itu, dirasakan sangat perlu untuk memberikan bentuk lebih nyata dalam konsultasi dan kerjasama dengan konferensi lebih luas antara para Perdana Menteri negara-negara Asia Afrika yang sama sekali tidak dimaksudkan untuk membentuk suatu blok.¹¹

¹¹ *Ibid.*, hlm. 7.

Pemerintah berpendapat, bahwa pendirian yang harus diambil mengenai tujuan politik luar negeri Indonesia tidak menjadi objek percaturan politik Internasional, melainkan harus menjadi subyek yang berlaku menentukan sikapnya sendiri. Politik luar negeri Republik Indonesia harus ditentukan oleh kepentingannya sendiri dan dijalankan menurut keadaan dan kenyataan yang dihadapi. Garis politik luar negeri Indonesia tidak dapat ditentukan oleh haluan politik negara lain yang berdasarkan kepentingan negara itu sendiri. Inilah dasar yang fundamental dari politik bebas aktif Republik Indonesia.

Perkembangan baru dari pelaksanaan politik bebas aktif ini terjadi pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo I 1 Agustus 1953 – 24 Juli 1955. Kabinet Ali Sastroamidjojo tidak mengarah hubungan negara-negara Barat, melainkan mendekatkan diri dengan negara-negara Asia Afrika dan negara-negara Blok Sosialis. Pemerintahan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo telah merintis diplomasi bebas aktif yang diwujudkan dengan menggalang solidaritas negara-negara Asia Afrika yang bertujuan menghapus Kolonialisme, serta untuk meredakan ketegangan dunia yang ditimbulkan oleh ancaman perang nuklir antara kedua negara Adikuasa. Indonesia, kemudian berhasil mengundang negara-negara Asia Afrika dalam Konferensi Asia Afrika I di Bandung. Bagi Indonesia, konferensi tersebut memberi dukungan utama dalam pembebasan Irian Barat.¹²

¹² Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto, *op.cit.*, hlm. 235.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah faktor-faktor pendukungnya sehingga Konferensi Asia Afrika I tanggal 18 – 24 April 1955 di Bandung dapat terselenggara ?
2. Bagaimana jalannya Konferensi Asia Afrika I tanggal 18 – 24 April 1955 di Bandung itu ?
3. Apakah hasil dari Konferensi Asia Afrika I tanggal 18 – 24 April 1955 di Bandung itu ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis faktor-faktor pendukung terselenggaranya Konferensi Asia Afrika I tanggal 18 – 24 April 1955 di Bandung.
2. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis jalannya Konferensi Asia Afrika I tanggal 18 – 24 April 1955 di Bandung.
3. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis hasil dari Konferensi Asia Afrika I tanggal 18 – 24 April 1955 di Bandung.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Untuk melengkapi karya ilmiah sejarah Indonesia, terutama tentang Konferensi Asia Afrika I 18 – 24 April 1955 di Bandung (Suatu Tinjauan Historis Politik Luar Negeri Republik Indonesia).
2. Sebagai bahan perbandingan bila ternyata ada penelitian yang sama, baik pada waktu lalu maupun yang akan datang.
3. Memberikan rangsangan agar diadakan penelitian lebih lanjut.

D. Kajian Pustaka dan Landasan Teori

1. Kajian Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, terlebih dahulu perlu dikaji berbagai sumber primer maupun sumber sekunder dari buku-buku atau karya ilmiah sebagai acuan di dalam pembahasan. Adapun, beberapa sumber primer dalam penelitian ini, antara lain ialah buku karya Ali Sastroamidjojo yang berjudul *Tonggak-tonggak Perjalananku*, penerbit PT Kinta Jakarta; dan buku-buku karya Roeslan Abdulgani, seperti : *Sejarah Cita-cita dan Pengaruhnya Konferensi Asia Afrika Bandung*, penerbit Idayu Press Jakarta; *The Bandung Connection Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955*, penerbit Gunung Agung Jakarta dan; *Indonesia Menatap Masa Depan*, penerbit Pustaka Merdeka Jakarta.

Sedangkan, sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain seperti buku karya Mohammad Hatta berjudul *Dasar Politik Luar Negeri Republik Indonesia*, penerbit Tinta Mas Jakarta; buku karya H.M. Sabir berjudul *Politik Bebas Aktif Tantangan dan Kesempatan*, penerbit CV Haji Masagung Jakarta; buku karya Michael Leifer berjudul *Politik Luar Negeri Indonesia*, penerbit PT Gramedia Jakarta; buku karya Sufri Yusuf berjudul *Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri*, penerbit Sinar Harapan Jakarta dan; buku karya Mochtar Kusumaatmadja berjudul *Politik Luar Negeri Indonesia dan Pelaksanaannya Dewasa ini*, penerbit Alumni Bandung.

Ali Sastroamidjojo, dalam bukunya *Tonggak-tonggak Perjalananku* menjelaskan, bahwa program Kabinet Ali Sastroamidjojo I tidak jauh berbeda dengan kabinet-kabinet sebelumnya. Hanya perbedaannya mengenai penanganan empat masalah yang menjadi prioritas dalam kabinetnya. Empat masalah tersebut, yaitu : pertama, masalah soal keamanan akibat banyaknya gangguan-gangguan dari gerombolan-gerombolan pemberontak di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Aceh dan Kalimantan Selatan yang semakin lama berdampak pada penderitaan rakyat terutama di desa-desa. Masalah kedua, ialah soal pemilihan umum untuk membentuk Konstituante dan DPR secepatnya dilaksanakan, dengan alasan perkembangan demokrasi dan kestabilan politik. Masalah ketiga, ialah soal-soal luar negeri Republik Indonesia, yakni Republik Indonesia

hendak menonjolkan bahwa tidak memihak Blok Barat atau Blok Timur "Netral" dalam Perang Dingin yang artinya meyakinkan Republik Indonesia ikut serta dalam percaturan politik dunia secara aktif. Dengan kata lain, program kabinet tentang politik luar negerinya ini memprioritaskan kepada dua (2) soal, yaitu mengubah hubungan Indonesia-Belanda atas dasar status Uni menjadi hubungan Internasional biasa dan mempercepat peninjauan kembali perjanjian K.M.B., serta menghapuskan perjanjian-perjanjian yang merugikan negara dalam segala bidang. Masalah keempat, ialah soal Irian Barat, yakni pandangan Kabinet mengenai soal Irian Barat sebagai masalah Kolonialisme yang harus dipecahkan dalam forum Internasional, mengingat problem-problem Kolonialisme sedang hebat-hebatnya ditentang di seluruh dunia.

Kelak, kesempatan pertama terbuka bagi Indonesia dalam Konferensi Panca Perdana Menteri Colombo, kesempatan kedua yakni dalam acara Sidang Umum P.B.B yang ke-9 bulan September 1954, kesempatan ketiga ialah dalam Konferensi PM di Bogor bulan Desember 1954 dan yang keempat yakni didalam Konferensi Asia Afrika di Bandung tanggal 18 – 24 April 1955. Selain itu, juga dijelaskan bahwa semenjak berdirinya Republik Indonesia telah melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif berdasarkan kepentingan rakyat serta menuju ke arah perdamaian dunia. Istilah bebas aktif disebut juga politik *Non-Aligment*. Politik luar negeri Indonesia bukan politik netral yang mengandung unsur

pasifitas atau sikap masa bodoh terhadap persoalan Internasional, melainkan politik Indonesia ingin ikut serta secara aktif dalam percaturan politik dunia sesuai dengan kemampuan negara dan bangsanya. Aktif mengandung unsur kreatifitas yang tumbuh bebas dari prakarsa atau tekanan dari luar, sehingga dalam perencanaannya harus memperhitungkan pengaruh-pengaruh keadaan politik dunia Internasional.

Kabinet Ali Sastroamrdjojo mulai mewujudkan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dengan menampakkan keaktifannya dalam bidang ini, terlihat dalam program-program yang diajukan kabinetnya kepada DPRS. Program-program tersebut antara lain, seperti : masalah pertukaran diplomatik dengan Uni Soviet, masalah normalisasi hubungan Indonesia dengan Jepang, dan masalah kerjasama Asia Afrika sebagai upaya meredakan ketegangan dunia yang disebabkan oleh Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur, sehingga menciptakan jalan yang licin ke arah perdamaian dunia dan nantinya berdampak secara tidak langsung terhadap pembangunan negara-negara Asia Afrika. Program kerjasama Asia Afrika yang diajukan kepada DPRS tanggal 25 Agustus 1953 itu, mulai terbuka ketika Pemerintah Indonesia mendapatkan surat undangan dari Pemerintah Srilanka untuk menghadiri Konferensi Panca Perdana Menteri di Colombo bulan April 1954. Surat undangan ini mendapat sambutan positif dari Pemerintah Indonesia, sebagai persiapan sebelum menghadirinya, diadakanlah Konferensi Dinas Tugu tanggal 9 – 22 Maret

1954 oleh Menlu Sunario. Dalam Konferensi Colombo, sedikit terbukalah pintu kepada Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan kerjasama Asia Afrika.

Baru, setelah P.M. India dan P.M. Indonesia pada tanggal 24 September 1954 mengeluarkan nota bersama dapat dikatakan pintu untuk mewujudkan kerjasama Asia Afrika bagi Indonesia benar-benar terbuka. Sebagai persiapannya, diadakanlah Konferensi Bogor tanggal 28 – 29 Desember 1954. Segala persiapan yang dibicarakan dalam Konferensi Bogor inipun tidak sia-sia, pada tanggal 18 – 24 April 1955 terselenggarakan Konferensi Asia Afrika di Bandung. Sebelum Konferensi pembukaan tanggal 18 April 1955, terlebih dahulu diadakan rapat informal oleh para Ketua delegasi yang menghasilkan persetujuan berupa ketentuan tentang prosedur Konferensi Asia Afrika, yakni Konferensi Asia Afrika tidak menggunakan sistim suara terbanyak melainkan menggunakan sistim musyawarah dan mufakat “*Konsensus*”; rapat-rapat Konferensi Asia Afrika dibagi menjadi 2 macam, yakni rapat yang bersifat terbuka dan rapat yang bersifat tertutup dan; hanya akan dibentuk 3 buah panitia rapat saja, yakni panitia politik, panitia ekonomi dan panitia kebudayaan.

Sementara, Roeslan Abdulgani dalam bukunya *Sejarah Cita-cita dan Pengaruhnya Konferensi Asia Afrika Bandung* menjelaskan bahwa Konferensi Bandung didahului oleh Konferensi Colombo dan Konferensi Bogor. Dalam Konferensi Colombo-lah Indonesia mengajukan gagasan

untuk mengadakan Konferensi yang lebih luas dari sekedar 5 negara Colombo (India, Srilanka, Pakistan, Burma, dan Indonesia) saja, yaitu Konferensi antar negara di Asia Afrika. Sedangkan Konferensi Bogor, mengambil putusan-putusan yang lebih tegas lagi, yakni maksud dan tujuan Konferensi Asia Afrika, rencana agenda dan siapa-siapa yang definitif diundang serta yang mengundang bukan lagi Indonesia sendirian melainkan 5 P.M. secara kolektif.

Selain itu, Roeslan Abdulgani juga menjelaskan bahwa solidaritas Asia Afrika telah disuarakan pemuda-pemuda dan mahasiswa di Kongres Bierville dan Kongres Brussell. Cita-cita kebangunan Asia Afrika telah hidup lama dikalangan rakyat Asia Afrika, dan tumbuh subur dalam situasi dan kondisi 1954/1955, yaitu : dengan meluasnya Perang Dingin ke daerah Asia Tenggara; meningkatnya perjuangan kemerdekaan nasional di Aljazair, Maroko, Tunisia, Afrika Tengah, Pondi Cheri di Goa setelah Mesir menggerakkan revolusinya menggulingkan Rezim Raja Farouk; dan terjadinya perubahan pimpinan di Uni Soviet. Tercetusnya cita-cita Konferensi Asia Afrika adalah dalam Konferensi Colombo dan kongkretasinya di Konferensi Bogor.

Sedangkan, dalam bukunya *The Bandung Connection Konferensi Asia Afrika di Bandung Tahun 1955*, Roeslan Abdulgani menjelaskan bahwa jiwa solidaritas Asia Afrika telah berkumandang jauh sebelum Konferensi Asia Afrika I di Bandung dilaksanakan, yakni dalam

pertemuan solidaritas Asia Afrika di Kota Bierville dekat Paris di Perancis tahun 1926 dan pertemuan solidaritas Asia Afrika di Kota Brussell (Belgia) tahun 1927. Selain itu, jiwa solidaritas Asia Afrika juga dikumandangkan melalui tulisan Bung Karno tahun 1927 dan 1928, yakni *"Indonesianisme dan Pan Asiatisme"*. Serta, dalam wejangan-wejangan beliau tahun 1930-an yang selalu berkumandang dalam rapat-rapat umum, yaitu : *"Kalau Barong Liong Sai dari Tiongkok bekerjasama dengan Lembu Nandi dari India, dengan Spinx dari Mesir, dengan Burung Merak dari Birma, dengan Gajah Putih dari Siam, dengan Ular Hidra dari Vietnam, dengan Harimau dari Filipina dan dengan Banteng dari Indonesia maka pasti hancur lebur Kolonialisme Internasional..."*.

Pada tahun 1954, gagasan ini mulai direalisasikan Indonesia dengan membawanya ke sidang Panca Perdana Menteri di Colombo yang diprakarsai P.M. Sir John Kotelawala (Srilanka/Ceylon) atas dasar perasaan khawatir dan prihatin melihat situasi perang di Indochina, semakin meningkatnya agresi Komunis di Bumi Asia, dan mengenai perkembangan senjata nuklir. Sebagai persiapan dasar gagasan yang nantinya dibawa ke Colombo, Menlu Sunario bersama dengan Dubes-Dubes Indonesia di negara-negara Asia dan Afrika mengadakan Konferensi Dinas di Tugu. Ternyata gagasan solidaritas Asia Afrika yang telah dipersiapkan di Konferensi Dinas Tugu itu mendapat lampu hijau atau disetujui saat dibawa dalam sidang Panca Perdana Menteri di

Colombo, meskipun pada awalnya masih terdapat keragu-raguan diantara Perdana Menteri yang hadir. Berkat persiapan yang matang dan kebulatan tekad Indonesia dibawah P.M. Ali Sastroamidjojo dalam mempertahankan usul gagasan solidaritas Asia Afrika, maka akhirnya sidang Panca Perdana Menteri tersebut memberikan kesempatan dan dukungan secara bulat usul gagasan solidaritas Asia Afrika.

Sebagai kelanjutannya, Indonesia harus mengadakan penjajagan terhadap negara-negara Asia Afrika, kemudian dilanjutkan lagi dengan mengadakan Konferensi Bogor sebagai persiapan sebelum Konferensi Asia Afrika dilaksanakan. Dalam Konferensi Bogor dibicarakan mengenai maksud dan tujuan Konferensi Asia Afrika, mengenai *Sponsorship* (sponsor utama "*Koordinator*" ialah Indonesia), mengenai waktu pelaksanaan Konferensi Asia Afrika, mengenai agenda, mengenai tingkat delegasi yang hadir, dan mengenai undangan. Dengan kata lain, Konferensi Bogor ialah sebagai pembuka jalan bagi Konferensi Asia Afrika Bandung.

Konferensi Asia Afrika tanggal 18 – 24 April 1955 di Bandung dilaksanakan ketika situasi Internasional semakin tegang dengan meluasnya Perang Dingin di Kawasan Asia dan Afrika oleh 2 Blok (Amerika Serikat vs Uni Soviet). Begitu halnya dengan situasi di dalam negeri Indonesia, seperti maraknya oposisi-oposisi terhadap pemerintah maupun teror-teror oleh gerombolan DI/TII Kartosuwiryo. Sebelum

tanggal 18 April 1955 Konferensi Asia Afrika dibuka, terlebih dahulu diadakan pertemuan pendahuluan secara informal oleh ketua-ketua delegasi dan atau anggota stafnya dari 22 negara peserta yang telah datang. Pertemuan pendahuluan ini, menghasilkan tata tertib Konferensi Asia Afrika yang mempunyai pengaruh besar atas jalannya Konferensi Asia Afrika kelak, meskipun bersifat informal dan sementara.

Adapun jalannya sidang Konferensi Asia Afrika yakni, tanggal 18 April 1955 adalah sidang pembukaan Konferensi Asia Afrika. Dalam sidang pembukaan ini terlebih dahulu dibuka oleh pidato Presiden Soekarno, kemudian dilanjutkan dengan pertemuan informal mengenai tata tertib; soal-soal pidato para ketua delegasi, dan acara Konferensi oleh semua peserta Konferensi Asia Afrika. Pertemuan informal ini telah menskors sidang pleno, setelah selesai Ali Sastroamidjojo ditunjuk sebagai ketua Konferensi dan Join Sekretariat sebagai Sekretariat Konferensi dengan Sekjennya Roeslan Abdulgani. Sebagai ketua Konferensi, selanjutnya Ali Sastroamidjojo menyampaikan pidato pembukaan yang intinya menjelaskan asal-usul gagasan Konferensi Asia Afrika beserta dasar dan tujuannya. Selain itu, beliau juga menekankan bahwa perdamaian adalah masalah pokok bagi kita semua, oleh karenanya ketegangan-ketegangan yang membahayakan perdamaian dunia perlu ditangani mulai dari sumbernya, baik itu Kolonialisme, Rasialisme, eksploitasi ekonomi, perlombaan senjata dan sebagainya. Sore harinya jam

15.00 WIB, sidang pleno terbuka dilanjutkan dengan pidato-pidato ketua delegasi. Pagi harinya, Selasa tanggal 19 April 1955 sampai sore masih sama acaranya, yakni sidang pleno terbuka untuk melanjutkan pidato-pidato ketua delegasi.

Hari Rabunya, tanggal 20 April 1955 sidang pleno tertutup dimulai oleh masing-masing Panitia Politik, Panitia Ekonomi, dan Panitia Kebudayaan di Gedung Dwi Warna. Hari Kamis, tanggal 21 April 1955 Panitia politik melakukan diskusi mengenai soal-soal Afrika Utara dan Irian Barat dalam sidang tertutupnya. Dalam sidang tertutup ini, terjadilah perbedaan pendapat yang tajam terutama dalam rangka pembicaraan masalah "*right of self determination*" (masalah istilah Kolonialisme), maka sebagai alternatif dibentuklah sebuah panitia kecil untuk menyelesaikannya. Hari Jum'at, tanggal 22 April 1955 sidang tertutup dilanjutkan dengan pembicaraan masalah yang sama, yakni masalah Kolonialisme bentuk baru dan masalah hidup berdampingan secara damai.

Esok harinya, Sabtu tanggal 23 April 1955 pembicaraan tentang masalah hidup berdampingan secara damai dan hubungan dengan pakta-pakta militer dilanjutkan, serta dibentuklah suatu Panitia perumus. Hari Minggu, tanggal 24 April 1955 merupakan sidang penutupan Konferensi. Sidang penutupan Konferensi Asia Afrika, dinyatakan selesai dan syah ditutup oleh P.M Ali Sastroamidjojo pukul 21.30 WIB dengan pidato penutupan. Penutupan sidang sampai malam tersebut, dikarenakan Panitia

perumus tentang Kolonialisme dan *Peaceful co-Existance* baru dapat menyelesaikan rumusan konsensusnya pukul 17.45 WIB. Pada pukul 18.00 WIB, dibacakanlah konsensus-konsensus yang dituangkan dalam sebuah *Final Communiqué* “Komunike Akhir” yang terdiri dari 6 bab, yakni : Kerjasama Ekonomi, Kerjasama Kebudayaan, Hak Asasi Manusia dan Hak menentukan nasib sendiri, Masalah rakyat jajahan, Masalah lain-lain, dan Deklarasi tentang memajukan perdamaian dunia dan kerjasama Internasional “Dasasila Bandung”.

Sementara, Roeslan Abdulgani dalam bukunya *Indonesia Menatap Masa Depan (Kumpulan karangan)* menjelaskan bahwa Konferensi Asia Afrika tanggal 18 – 24 April 1955 di Bandung terselenggara atas prakarsa 5 negara Asia, yakni Indonesia, India, Pakistan, Srilanka, dan Birma. Konferensi ini diikuti oleh 29 negara Asia Afrika, yaitu : Indonesia, India, Pakistan, Srilanka, Birma, Afghanistan, Jepang, Ethiopia, Filipina, Gold Coast (Ghana), Irak, Iran, Kamboja, Laos, Libanon, Liberia, Libya, Muangthai, Mesir, Nepal, Republik Rakyat Cina, Saudi Arabia, Sudan, Suriah, Turki, Vietnam Selatan, Vietnam Utara, Yaman, dan Yordania. Sebelum Konferensi Asia Afrika diselenggarakan, kelima (5) negara pemrakarsa telah mengadakan serangkaian pertemuan persiapan, pertama di Colombo pada bulan April 1954 dan kemudian di Bogor pada bulan Desember 1954. Konferensi Asia Afrika diselenggarakan dalam situasi Internasional yang diliputi Perang Dingin dan suasana makin

meningkatnya perjuangan bangsa-bangsa terjajah untuk memperoleh kemerdekaannya serta usaha-usaha untuk menggalang persatuan dan solidaritas di antara negara-negara yang berkembang dan merdeka. Bandung menolak bipolarisasi dalam dunia politik Internasional, Bandung adalah negasinya bipolarisasi dan power politiknya negara-negara besar, Bandung adalah rintisan jalan sendiri dan merupakan jalan tengahnya dunia ke-3 di tengah-tengah dua karang yang sedang mengadakan Perang Dingin. Kelancaran Konferensi Bandung tidak dapat dilepaskan dari tiga (3) jiwa, yakni Jiwa anti-Kolonialisme dan Jiwa pro-perdamaian; jiwa toleransi; dan Jiwa pendekatan non-militer.

Sementara itu, Mohammad Hatta dalam bukunya *Dasar Politik Luar Negeri Indonesia* menyatakan politik luar negeri Indonesia bukan netral. Politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif. Dijelaskan bahwa kondisi diplomasi Indonesia lebih banyak ditujukan ke dalam negeri.

H.M. Sabir, dalam bukunya *Politik Bebas Aktif Tantangan dan Kesempatan* menjelaskan bahwa politik luar negeri tidak dapat dipisahkan dari tiga (3) istilah, yakni : Hubungan Internasional, Politik Internasional, dan Diplomasi. Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dalam perkembangannya tidak dapat dilepaskan dari perkembangan dunia, seperti : Perang Dunia II/ Perang Pasifik/ Perang Asia Timur Raya ataupun Perang Dingin. Perang Dunia II telah membawa perubahan-perubahan besar dalam situasi Internasional, tidak terkecuali terhadap

politik bebas aktif, yakni meledaknya semangat nasionalisme dan anti penjajahan terutama di Asia Afrika.

Politik luar negeri Republik Indonesia yang dikenal dengan politik bebas aktif, lahir setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, yakni dengan disyahkannya UUD'45. Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif itu berlandaskan Pancasila, sehingga Pemerintah mencari jalan tengah sendiri diantara Kapitalis Barat dan Komunis Timur tanpa terikat kepada keduanya. Politik bebas aktif sejak lahirnya sudah ditakdirkan aktif, meskipun dalam masa perjuangan fisik sampai tahun 1953 Pemerintah Indonesia belum dapat aktif menjalankannya di gelanggang dunia Internasional.

Baru tahun 1953, keaktifan politik luar negeri bebas aktif terlihat aktif keluar ketika Ali Sastroamidjojo menjadi Perdana Menteri. Ini dapat ditampakkan dari Kabinetnya yang menggunakan kembali saluran multilateral dalam memperjuangkan penyelesaian Irian Barat, yakni melalui wakil tetap Republik Indonesia di P.B.B., masalah ini dimasukkan dalam agenda sidang Majelis Umum P.B.B. Selain itu, Kabinetnya juga mengambil prakarsa untuk membuka perwakilan R.I di Moskow. Dan yang paling mengesankan lagi, ketika Kabinetnya berhasil mengambil langkah untuk mengadakan kerjasama Asia Afrika yang diajukan di Konferensi Colombo mendapatkan persetujuan, dan selanjutnya diselenggarakan Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955.

Konferensi Asia Afrika di Bandung, adalah bukti nyata bahwa politik luar negeri R.I adalah aktif dan sekaligus merupakan pengejawantahan dari alinea satu pembukaan UUD 1945, yang antara lain menyebutkan penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi.

H.M. Sabir, juga menjelaskan pada hakekatnya Dasasila Bandung itu sama dengan prinsip *Peaceful co-Existence* (hidup berdampingan secara damai).

Michael Leifer, dalam bukunya *Politik Luar Negeri Indonesia* menjelaskan bahwa benih kebijaksanaan luar negeri Indonesia telah nampak pasca era kemerdekaan, seperti yang diungkapkan oleh bekas P.M. Shahrir dalam pernyataannya di depan Komite Nasional Indonesia Pusat, yaitu suatu janji atau keterikatan hati pada ketidakberpihakan (non-Blok). Politik luar negeri yang dijalankan sejak pasca kemerdekaan sampai awal tahun 1950-an tidak sesuai dengan prinsip kebijaksanaan luar negeri yang bebas dan aktif, karena kebijaksanannya lebih memperhatikan perihal rehabilitasi dalam negeri yang menghendaki toleransi kepentingan-kepentingan Barat dan suatu keberpihakan Internasional. Dengan kata lain, pelaksanaan kebijaksanaan luar negeri ditarik ke dalam arena politik dalam negeri, sehingga politik luar negeri dan politik dalam negeri tidak pernah terpisah secara sungguh-sungguh (politik luar negeri dan politik dalam negeri menjadi saling mencakup secara simbiotik). Dengan pelaksanaan yang demikian pemerintah telah melanggar atau mengabaikan prinsip utama kebijaksanaan luar negeri, akibatnya dengan mudah dapat

dihancurkan oleh tantangan-tantangan politik, seperti persaingan oposisi di antara dan di dalam koalisi pemerintah atau oposisi parlemen.

Pencerminan asli kebijaksanaan luar negeri baru tampak pada masa kabinet Ali Sastroamidjojo I, terlihat dari prestasi utamanya dalam hubungan luar negeri yakni Konferensi Asia Afrika yang terkenal di Bandung pada bulan April 1955. Konferensi Bandung merupakan panggung sandiwara politik yang menakjubkan dan dilaksanakan dengan kadar efisiensi tertentu, yang memberikan penegasan Indonesia untuk diperlakukan sebagai suatu negara terkemuka. Akan keliru sekali jika tidak memandang peristiwa tersebut hanya sebagai panggung drama politik. Berbagai kelompok negara yang diwakili dalam konferensi itu tidak mempunyai pandangan yang sama mengenai sejumlah masalah Internasional penting, partisipasi mereka yang antusias mencerminkan suatu semangat ketegasan yang semakin tumbuh dikalangan bekas negara jajahan yang bertekad tidak hanya menggaris bawahi status mereka yang merdeka, tetapi juga ingin diketahui bahwa sebagai anggota suatu masyarakat Internasional mereka berhak menyuarakan sesuatu dalam pengaturan menyeluruh masyarakat dunia Internasional. Konteks yang lebih luas dari Konferensi Bandung berasal dari dampak Perang Dingin yang ditimbulkan oleh konflik Korea terhadap negara-negara baru di Asia, disusul gencatan senjata Korea pada bulan Juli 1953 konflik beralih ke Indochina.



Pada akhir bulan April 1954, P.M. Indonesia bergabung dengan rekannya dari Srilanka, Birma, India, dan Pakistan di Colombo untuk membicarakan konflik di Indochina. Dalam pertemuan ini, P.M. Indonesia mengemukakan bahwa Ia dan koleganya akan mensponsori suatu pertemuan besar negara-negara Asia dan Afrika yang merdeka dengan dua (2) tujuan, yaitu : mengendorkan ketegangan-ketegangan Perang Dingin dan meneruskan tantangan terhadap Kolonialisme. Setelah Konferensi Colombo selesai, selanjutnya Ali Sastroamidjojo dan Menlu Sunario melakukan serangkaian diplomasi pribadi yang dilanjutkan dengan suatu pertemuan pendahuluan negara-negara Colombo di Bogor pada bulan Desember 1954. Pada pertemuan inilah ditentukan bahwa undangan untuk menghadiri Konferensi Asia Afrika pada bulan April berikutnya akan diperluas kepada kira-kira 30 pemerintahan di Asia dan Afrika, termasuk Cina; Vietnam Utara dan Selatan. Konferensi Bandung merupakan kejadian politik yang menakjubkan karena sifatnya yang unik, yakni kurang lebih 400 wartawan luar negeri menghadirinya dan secara bersamaan terjadi penandatanganan ditinggalkannya prinsip *Jus Sanguinis* antara Indonesia dengan Cina. Selain itu, dengan Konferensi Bandung negara Indonesia menjadi meningkat kedudukannya dalam dunia Internasional dan menunjukkan bahwa pemerintah menganut kebijaksanaan luar negeri yang bebas dan aktif (dilihat dari komposisi delegasi peserta yang hadir dalam konferensi).

Sufri Yusuf dengan bukunya *Hubungan International dan Politik Luar Negeri* menjelaskan, bahwa politik luar negeri adalah politik untuk mencapai tujuan nasional dengan menggunakan segala kekuasaan dan kemampuan yang ada. Dijelaskan juga tentang pelaksanaan politik luar negeri dengan dikirimnya diplomat atau duta besar ke negara lain. Dengan diplomasi lebih ditekankan bahwa semangat Bandung, maka diplomasi bergerak dibidang politik, sosial, ekonomi, sosial budaya dan militer.

Mochtar Kusumaatmadja dengan bukunya *Politik Luar Negeri Indonesia dan Pelaksanaannya Dewasa Ini*, menjelaskan bahwa sejarah konferensi Asia Afrika diawali dengan pertemuan Colombo, dilanjutkan pertemuan Bogor yang mencapai persetujuan untuk melaksanakan Konferensi Asia Afrika I dari tanggal 18 – 24 April 1955 di Bandung.

2. Landasan Teori

a. Konferensi

Menurut B.N. Maribun S.H. istilah konferensi adalah rapat atau pertemuan untuk berunding dan bertukar pendapat mengenai suatu masalah yang dihadapi. Dalam sebuah pertemuan yang membicarakan masalah-masalah pokok yang terpenting dalam mengeluarkan keputusan yang mengikat suatu negara-negara yang bersangkutan.

Sementara, Pius A. Partanto mengartikan konferensi adalah permusyawaratan, perundingan dalam muktamar.

Bertolak dari beberapa pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa konferensi adalah sidang yang dilaksanakan untuk mencapai suatu keputusan yang bermanfaat bagi negara-negara yang melaksanakan konferensi dan untuk masyarakat luas atau dunia. Konferensi Asia Afrika adalah pertemuan atau sidang antara negara-negara Asia Afrika dalam rangka membicarakan kekhawatiran timbulnya Perang Atom/ nuklir dari adanya Perang Dingin dan mengambil jalan terbaik untuk mengurangi ketegangan sehingga tercipta dunia damai. Konferensi Asia Afrika diprakarsai oleh 5 (lima) negara Asia, yaitu Indonesia, India, Pakistan, Birma dan Srilanka yang selanjutnya diikuti oleh 29 negara Asia Afrika, yaitu : Indonesia, Pakistan, India, Birma, Srilanka, Afganistan, Kamboja, Republik Rakyat Cina, Mesir, Etiopia, Pantai Emas/ Gold Coast (Ghana), Irak, Jepang, Yordania, Laos, Libanon, Liberia, Libia, Nepal, Filipina, Saudi Arabia, Sudan, Syria, Muangthai/ Thailand, Turki, Vietnam Utara, Vietnam Selatan, dan Yaman.

b. Politik Luar Negeri

Pengertian politik luar negeri tidak dapat dilepaskan dari tiga istilah berikut : “Hubungan Internasional” (*International Relations*); “Politik Internasional” (*International Politics*), dan “Diplomasi” (*Diplomacy*).

1). Pengertian Hubungan Internasional

Norman D. Palmer dan Howard C. Perkin menjelaskan bahwa istilah-istilah ini (hubungan Internasional dan politik Internasional) sering digunakan secara bergiliran hampir-hampir dalam pengertian yang sama.¹³ Secara umum, hubungan Internasional adalah istilah yang lebih luas dari istilah politik Internasional dan pada gilirannya politik Internasional merupakan cabang (*sub-category*) dari hubungan Internasional, dan mungkin sebagai cabang terpenting. Pada mulanya hubungan Internasional merupakan bagian dari ilmu sejarah dan ilmu politik, namun pada akhirnya hubungan Internasional berkembang menjadi suatu ilmu pengetahuan sendiri. Semenjak berdiri sebagai ilmu pengetahuan sendiri, hubungan Internasional ini memiliki ruang lingkup yang luas sekali dan meliputi komponen hukum, ekonomi, militer dan sebagainya. Dengan ruang lingkungannya yang mencakup seluruh dunia, maka ilmu hubungan Internasional sering disebut hubungan sejagat (*world atau global relations*). Selain itu, hubungan Internasional ini mencakup beraneka ragam kelompok-kelompok.

Sehingga menurut Quincy Wright termasuk bangsa, negara, pemerintah, rakyat, wilayah, konfederasi, organisasi Internasional,

¹³ H.M. Sabir. *Politik Bebas Aktif; Tantangan dan Kesempatan*. Jakarta : CV Haji Masagung, 1987, hlm. 1.

juga organisasi perindustrian, organisasi kebudayaan dan organisasi keagamaan.

K.J Holsti menguraikan bahwa hubungan Internasional dapat dikaitkan dengan segala bentuk interaksi antar anggota masyarakat yang terpisah, apakah disponsori pemerintah atau tidak. Hubungan Internasional mencakup segala analisa politik luar negeri atau proses-proses antar bangsa-bangsa.¹⁴

2). Pengertian Politik Internasional

Empat guru besar Universitas California Selatan – Carlton Clymer Rodee, Totton James Anderson, Carl Quixmny Christol dan Thomas H. Greene, mengutarakan bahwa jika dalam studi politik luar negeri adalah mencari jawaban terhadap pertanyaan “bagaimana” dan “kenapa” dirumuskan suatu tindakan, maka politik Internasional melayani akibat dari pertarungan politik luar negeri itu dalam lingkungan dunia. Seperti halnya politik Internasional adalah cabang hubungan Internasional, maka politik luar negeri adalah pula cabang politik Internasional.¹⁵

Harold dan Margaret Sprout menguraikan bahwa politik Internasional sebagai sistem aksi, reaksi dan interaksi antara dan di kalangan kesatuan politik yang dikenal sebagai...negara. Sedangkan, politik luar negeri diuraikan sebagai skema atau pola

¹⁴ *Ibid.*, hlm.2 – 3.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 4.

dari cara dan tujuan secara terbuka dan tersembunyi dalam aksi negara tertentu *vis-à-vis* negara lain atau kelompok negara lain. Dengan demikian, politik luar negeri adalah cabang politik Internasional. Politik Internasional dan politik luar negeri tidak identik, namun saling melengkapi atau isi-mengisi.

Oleh karena itu, Fred A. Sondermann beranggapan bahwa tidak mungkin dapat memahami politik Internasional tanpa memahami politik luar negeri negara-negara; tidak mungkin untuk memahami politik luar negeri tanpa memahami pengalaman-pengalaman sejarah dan susunan pemerintah pelaku politik luar negeri itu; tidak mungkin untuk memahami susunan pemerintah tanpa memahami unsur-unsur sosial, politik, ekonomi, kebudayaan setiap masyarakat.¹⁶

3). Pengertian Diplomasi

Menurut J.R. Childs, politik luar negeri suatu negara adalah isi (*substance*) hubungan luar negeri, sedangkan diplomasi secara khusus adalah proses lewat mana kebijaksanaan dilakukan.¹⁷ Sementara Herald Nicolson mengatakan, politik luar negeri berdasarkan atas konsepsi umum dari kebutuhan

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 4 – 5.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 6.

nasional...diplomasi, pada pihak lain tidaklah merupakan tujuan akhir atau satu cara, bukan pula maksud, tetapi satu jalan.¹⁸

Sedangkan Frederick H. Hartmann mengatakan, politik luar negeri yang sekali dirumuskan perlu dilaksanakan lewat jalan diplomasi, meski diplomasi secara fungsional bukanlah satu-satunya cara menurut mana negara-negara satu sama lain saling berusaha untuk mengatur kepentingan nasional mereka masing-masing. Martin Wight mengatakan bahwa diplomasi merupakan sistem dan seni komunikasi antar negara. Sistem diplomatik ini merupakan lembaga terpenting dalam hubungan Internasional. Ada dua kegiatan diplomasi, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh duta besar dan stafnya, dan kegiatan diplomasi melalui konferensi-konferensi.¹⁹

Sementara Hans J. Morgenthau memberikan makna lebih luas, dalam arti yang mencakup perumusan dan pelaksanaan politik luar negeri dalam segala tingkat dari atas sampai bawah.²⁰ Selanjutnya, menurut enciklopedi, dalam bahasa disebut *diplomate* dan *diplomatic* atau diplomasi adalah usaha memelihara hubungan negara dengan perantara wakil-wakil diplomatik yang khusus, yaitu duta besar dan kuasa usaha. Diplomasi dalam arti resmi ini

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 7.

¹⁹ *Loc.cit*

²⁰ *Ibid.*, hlm. 8.

dimulai pada abad 15 – 16 waktu negara-negara kebangsaan muncul.²¹

Diplomasi adalah penyelenggaraan hubungan resmi antar negara melalui perwakilan resmi.²² Diplomasi adalah tugas yang dijalankan oleh diplomat, kemampuan menyampaikan argumen secara politis, kebijaksanaan penyelenggaraan hubungan dua negara.²³ Diplomasi adalah penyelenggaraan hubungan antara kedua negara secara resmi, jalinan hubungan antara satu negara dengan negara lain.

4). Pengertian Politik Luar Negeri

Menurut empat guru besar Perguruan Tinggi California Selatan, politik luar negeri secara luas adalah pola perilaku yang digunakan oleh suatu Negara ketika memperjuangkan kepentingannya dalam hubungan negara-negara lain. Selain itu, politik luar negeri dapat disebut sebagai kebijaksanaan luar negeri. Politik luar negeri adalah strategi dan taktik yang digunakan oleh suatu Negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain.²⁴

Menurut Cicil V. Crabb Junior, politik luar negeri terdiri dari dua unsur; tujuan-tujuan nasional yang ingin dicapai dan cara-

²¹ B.N. Maribun. *Kamus Politik*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1996, hlm. 157.

²² Didi Krisna. *Kamus Politik Internasional*. Jakarta : Gramedia, 1993, hlm. 35.

²³ Pius Partanto. *Kamus Politik Internasional*. Surabaya : Arkola, 1994, hlm. 113.

²⁴ H.M. Sabir, *op.cit.*, hlm. 10.

cara untuk mencapainya. Interaksi antara sasaran nasional dan sumber-sumber untuk mencapainya adalah mata acara Negara. Dalam bumbu-bumbunya politik luar negeri segala bangsa, besar atau kecil adalah sama.²⁵

Menurut buku Rencana Strategi Pelaksanaan Politik Luar Negeri RI (1984 – 1988), politik luar negeri adalah suatu kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah dalam usaha untuk mencapai tujuan nasional. Melalui politik luar negeri, pemerintah memproyeksikan kepentingan nasionalnya ke dalam masyarakat antar bangsa.²⁶ Sedangkan, menurut Roeslan Abdulgani politik luar negeri menekankan kepada dinamika interaksi dari sesuatu negara tertentu dengan negara-negara lain. Politik luar negeri memusatkan kepada kebijaksanaan yang dilakukan oleh negara-negara di tengah-tengah hubungan Internasional.

Menurut Mohammad Hatta, politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif, “mendayung” sama artinya dengan upaya (aktif), dan “antara dua karang” adalah tidak terikat oleh dua kekuatan adikuasa yang ada (bebas).²⁷ Selanjutnya, menurut Ali Alatas politik luar Negeri adalah suatu kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka hubungannya dengan dunia

²⁵ *Ibid.*, hlm. 10 – 11.

²⁶ *Loc.cit*

²⁷ *Ibid.*, hlm. 17.

Internasional dalam usaha mencapai tujuan nasional. Melalui politik luar negeri, pemerintah memproyeksikan kepentingan nasionalnya ke dalam masyarakat antar bangsa.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja dalam ceramahnya di depan Manggala P4 di Jakarta 12 Februari 1980, politik luar negeri Indonesia bercorak bebas aktif bahwa bebas dalam pengertian bahwa Indonesia tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa sebagaimana dicerminkan dalam Pancasila. Sementara, menurut Adam Malik politik luar negeri Indonesia adalah berdasar prinsip-prinsip hidup berdampingan secara damai dan politik *non aligment* serta senantiasa mendukung perjuangan kemerdekaan nasional.²⁸

Sedangkan, menurut Ensiklopedi politik luar negeri adalah mencakup semua tindakan suatu negara, yang mempengaruhi sikapnya terhadap negara lain, kelompok maupun perhimpunan dan pakta negara-negara lain.²⁹

Bertolak dari beberapa pengertian-pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa politik luar negeri adalah kebijaksanaan yang dijalankan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan bangsa lain di dunia tanpa

²⁸ Mochtar Kusumaatmadja. *Politik Luar Negeri dan Pelaksanaannya Dewasa Ini*. Bandung : Alumni, 1983, hlm. 7.

²⁹ B.N. Maribun, *op.cit.*, hlm. 520.

mempengaruhi dan mencampuri urusan dalam negeri orang lain. Dengan demikian telah jelas bahwa konferensi dan politik luar negeri memiliki hubungan yang sangat erat dan berpengaruh dengan tinjauan historis, oleh karena itu pengertian konsep tersebut akan mempermudah dalam memahami maksud dan tujuan penulisan ini.

5). Politik Luar Negeri Indonesia

Sejak pernyataan kemerdekaan Negara, eksistensi Republik muda ini mendapat tantangan dari Belanda. Politik luar negeri Indonesia mendapatkan bentuk awalnya dari usaha-usaha Republik ini memperoleh pengakuan Internasional guna mencegah kembalinya kekuasaan Kolonial. Prinsip ideal politik luar negeri telah dinyatakan di Negara ini sebagai bebas aktif. Pertama kali dikemukakan oleh Mohammad Hatta, September 1948. Prinsip bebas aktif ini dipilih untuk menolak tuntutan sayap kiri agar Republik tidak berpihak pada Uni Soviet, juga untuk menghindarkan diri dari tuduhan Belanda dan juga untuk membuat jarak dengan Amerika Serikat (USA). Juga untuk mendefinisikan peranan yang tepat bagi Indonesia dalam konflik antara Negara adikuasa.³⁰

³⁰ Michael Leifer. *Politik Luar Negeri Indonesia*. Jakarta : PT Gramedia, 1986, hlm. xvi.

Pemerintah menentukan urutan prioritas kepentingan yang hendak dipertahankan dan tujuan yang hendak dicapai. Adapun cara pendekatan dan pelaksanaannya dirumuskan dalam suatu kebijaksanaan luar negeri. Vitalitas usaha untuk melaksanakan kebijaksanaan tersebut dilakukan melalui diplomasi bagi Indonesia berciri sebagai diplomasi perjuangan. Karena keadaan Internasional tidak statis tetapi selalu berkembang, maka kebijaksanaan luar negeri pemerintah selalu memerlukan penyesuaian dengan perkembangan itu. Bahkan, harus dapat mengantisipasi sejauh mungkin perkembangan selanjutnya. Namun didalam penyesuaian kebijaksanaan luar negeri dengan situasi Internasional yang berkembang, landasan dan dasar-dasar dari politik luar negeri tetap sama dan tidak berubah, karena dasar-dasar yang pokok dapat dikembalikan pada UUD 1945.

Dasar-dasar yang pokok daripada politik luar negeri Republik Indonesia tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea pertama yang menyatakan, bahwa :..... “kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan”. Selanjutnya, mukadimah UUD 1945 menyatakan dalam ayat ke-4 bahwa Pemerintah/ Negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk seluruh tumpah

darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial. Selain itu, dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dikatakan : Dalam bidang politik luar negeri yang bebas aktif diusahakan agar Indonesia dapat terus meningkatkan peranannya dalam memberikan sumbangannya untuk turut serta menciptakan perdamaian dunia yang abadi, adil dan sejahtera.³¹

a). Ciri-ciri “Bebas” Politik Luar Negeri Republik Indonesia

Pengertian bebas bahwa Indonesia tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang ada pada dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa sebagaimana dicerminkan dalam Pancasila. Bebas membawakan falsafah konsepsi dan kepribadian nasional sendiri di dalam kehidupan antara bangsa-bangsa di dunia Internasional.³² Bukan “*netral policy*” penetralan situasi perang, dimana Negara tidak turut serta berperang atau tidak membantu salah satu pihak yang sedang berperang. Bebas/independent berarti bebas membawa falsafah, konsepsi dan kepribadian nasional sebagaimana termaktub dalam UUD 1945, dan ketetapan MPRS.

³¹ A. Heuken SJ, dkk. *Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila Jilid I*. Jakarta : Yayasan Ciptaloka Caraka, 1983, hlm. 139.

³² Mochtar Kusumaadmadja. *Politik Luar Negeri Indonesia dan Pelaksanaannya Dewasa ini*. Bandung : Alumni, 1983, hlm. 7.

Bebas mengenai pengertian yang dimaksud sebagai kebebasan politik untuk menentukan dan menyatakan pendapat sendiri terhadap tiap-tiap persoalan Internasional sesuai dengan nilainya masing-masing tanpa memihak salah satu blok. Arti lain mengenai perkataan bebas dalam politik bebas aktif adalah mengabdikan kepada kepentingan nasional. Karena kalau kita tidak memberikan batasan tentang politik bebas aktif itu, yakni kebebasannya ke mana dan siapa, maka akan membahayakan Negara dan bangsa kita. Bebas berfalsafah sendiri berkepribadian sendiri, bebas pada suatu perjuangan anti Kolonialisme-Imperialisme. Maka dari itu, batas dari politik bebas aktif terletak pada nilai apakah politik itu menguntungkan bangsa atau tidak. Selain itu, bebas berarti tidak terikat oleh suatu Ideologi atau oleh politik negara asing atau blok negara-negara tertentu.³³ Selanjutnya, Pancasila juga merupakan salah satu faktor objek yang berpengaruh atas politik luar negeri Republik Indonesia, sehingga golongan atau partai politik manapun yang berkuasa di Indonesia tidak dapat menjalankan suatu politik negara yang menyimpang dari Pancasila.³⁴

³³ A. Heuken SJ, dkk, *op.cit.*, hlm. 139.

³⁴ Moh Hatta. *Mendayung Antara Dua Karang*. Jakarta : Bulan Bintang, 1988, hlm. 11.

b). Ciri-ciri “Aktif” Politik Luar Negeri Republik Indonesia

Politik luar negeri bebas aktif sebenarnya adalah politik yang tidak mengikatkan diri dengan persetujuan militer adikuasa, tetapi bukan netral. Dalam hubungan ini, Moh. Hatta dalam karyanya yang berjudul *Dasar Politik Luar Negeri Indonesia* menegaskan bahwa politik luar negeri Indonesia bukanlah politik netral, karena bertujuan memperkokoh dan memperjuangkan perdamaian di dunia.³⁵

Aktif berarti bahwa di dalam menjalankan kebijaksanaan luar negerinya, Indonesia tidak bersikap pasif reaktif atas kejadian-kejadian Internasionalnya melainkan bersikap aktif.³⁶ Selain itu, aktif artinya dengan sumbangan realitas giat mengembangkan kebebasan, persahabatan dan kerjasama Internasional dengan menghormati kedaulatan negara-negara lain.³⁷

Politik bebas aktif sejak lahirnya sudah ditakdirkan aktif. Pembukaan UUD 1945 alenia pertama, mengumandangkan: “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan”. Kemudian dalam pembukaan UUD 1945 alenia

³⁵ Moh Hatta. *Dasar Politik Luar Negeri Republik Indonesia*. Jakarta, 1953, hlm. 19 – 20.

³⁶ Mochtar Kusumaadmadja, *op.cit.*, hlm. 7.

³⁷ A. Heuken SJ, dkk, *op.cit.*, hlm. 139.

keempat dicanangkan pula bahwa Indonesia berkewajiban untuk “ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.³⁸

Secara jujur diakui bahwa dalam masa perjuangan fisik (1945 -1950) Indonesia tidak dapat aktif keluar dalam menjalankan politik luar negerinya, melainkan aktif kedalam karena untuk mempertahankan kemerdekaan yang sedang terancam oleh Belanda. Setelah berakhir perang kemerdekaan sampai tahun 1953, Indonesia terpaksa masih harus menyelesaikan masalah-masalah dalam negeri yang tertinggal setelah sengketa Indonesia_Belanda. Dalam keadaan perekonomian yang kacau disamping kerusuhan yang bermunculan sebagai akibat pemberontakan pihak-pihak oposisi, Indonesia sungguh sangat terikat ke dalam sehingga tidak mampu untuk mengambil tindakan aktif ke luar.

Baru pada tahun 1953, ketika Ali Sastroamidjojo menjabat Perdana Menteri, politik bebas aktif mulai direfleksikan ke luar. Hal yang demikian ini sangat berbeda dengan kabinet sebelumnya. Kabinet Ali Sastroamidjojo dengan tekad baru untuk memainkan peranan aktif pada momentum diplomasi Internasional. Konferensi Asia Afrika di Bandung

³⁸ H.M. Sabir, *op.cit.*, hlm.24.

dari tanggal 18 – 24 April adalah bukti nyata bahwa politik luar negeri Republik Indonesia adalah aktif dan sekaligus merupakan pengejawantahan dari alenia pertama pembukaan UUD 1945 yang berbunyi “penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan”.³⁹

E. Hipotesis

Berdasarkan pada perumusan masalah yang akan dikaji dalam penulisan, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

1. Jikalau ada faktor pendukung yang sama, maka akan terselenggara Konferensi Asia Afrika I dari tanggal 18 – 24 April 1955 di Bandung.
2. Jikalau semua persiapan dalam Konferensi benar-benar matang atau siap, maka Konferensi Asia Afrika I dari tanggal 18 – 24 April 1955 di Bandung akan berjalan dengan lancar.
3. Jikalau Konferensi Asia Afrika I dari tanggal 18 – 24 April 1955 di Bandung itu berhasil, maka akan tercipta saling pengertian antara negara-negara anggota Konferensi Asia Afrika I.

Berdasarkan hipotesis yang dikemukakan tersebut, maka akan diuraikan sedikit mengenai faktor pendukung yang sama terselenggaranya Konferensi

³⁹ *Ibid.*, hlm. 25 – 27.

Asia Afrika I dari tanggal 18 – 24 April 1955 di Bandung. Adapun faktor pendukung yang sama itu, pertama ialah kuatnya dan mendalamnya cita-cita solidaritas Asia Afrika dalam hati sanubari rakyatnya dalam menghadapi dominasi Barat dalam segala bentuk dan manifestasinya, seperti Kolonialisme, Imperialisme, Fasisme, Komunisme dan sebagainya. Faktor yang kedua ialah situasi dan kondisi sekitar tahun 1954/1955 yang merupakan ladang yang subur bagi seminya, tumbuhnya dan berkembangnya cita-cita tersebut. Cita-cita solidaritas Asia Afrika dapat terlihat dalam jiwa solidaritas Asia Afrika. Jiwa solidaritas Asia Afrika yang pertama adalah jiwa anti-Kolonialisme dan jiwa pro-Perdamaian; jiwa kedua adalah jiwa toleransi; dan jiwa ketiga adalah jiwa pendekatan non-Militer. Cita-cita dalam jiwa solidaritas Asia Afrika inilah yang nantinya dibawa dalam Konferensi Asia Afrika I di Bandung dan menghasilkan keputusan bersama berupa “Komunike Akhir Konferensi Asia-Afrika” yang di dalamnya mencakup kerjasama ekonomi; kerjasama kebudayaan; hak-hak asasi manusia dan hak menentukan nasibnya sendiri; masalah rakyat-rakyat yang belum merdeka; masalah-masalah lainnya; peningkatan perdamaian dan kerjasama dunia; dan deklarasi tentang peningkatan perdamaian dan kerjasama dunia “Dasasila Bandung”.

Konferensi Bandung memegang teguh jiwa anti-Kolonialisme dan jiwa pro-Perdamaian. Semangatnya adalah cinta damai, tetapi lebih cinta perdamaian. Jadi bukan perdamaian *at any cost*. Bukan perdamaian asal perdamaian, dan dengan harga apa saja. Tetapi perdamaian dalam suasana dan

situasi kemerdekaan, dan yang tidak mengenal kompromi dengan Kolonialisme dalam segala manifestasinya. Istilahnya dalam Dasasila Bandung; Kemerdekaan dan perdamaian kait-mengait. Tak dapat dipisahkannya, itulah jiwa yang pertama dari Bandung.

Jiwa kedua adalah toleransi, yaitu hidup berdampingan secara damai antara bermacam-macam sistem poleksos yang ada di dunia Asia_Afrika itu. Dengan menjunjung tinggi beberapa prinsip hubungan baik demi kerjasama Internasional dan demi keuntungan bersama (*Mutual Benefit*). Prinsip-prinsip itu antara lain adalah menghormati kedaulatan dan integritas territorial masing-masing; *non-Intervensi*, *non-Agresi*, dan *non-Interferensi* dalam masalah domestik negara-negara lain; menghormati hak bela diri secara sendirian; dan kalau perlu secara kolektif, asal tidak untuk membela kepentingan khusus salah satu negara besar. Itulah jiwa kedua Bandung.

Jiwa ketiga adalah pendekatan non-Militer (*non-Military approach*) dalam menyelesaikan segala pertikaian dan pertentangan Internasional. Umpamanya dengan jalan perundingan, persetujuan, arbitrase dan sebagainya, tanpa menggunakan ancaman atau kekerasan. Pokoknya, segala jalan damai diutamakan.⁴⁰

Konferensi Asia Afrika I yang berlangsung tanggal 18 – 24 April 1955 di Bandung dapat berjalan lancar, tidak lain karena semua persiapan dalam Konferensi benar-benar matang atau siap. Ini dapat terlihat dalam Konferensi

⁴⁰ Roeslan Abdulgani. *Indonesia Menatap Masa Depan (Kumpulan Karangan)*. Jakarta : PT Pustaka Merdeka, 1987, hlm. 306.

Bogor yang merupakan Konferensi Persiapan sebelum diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika I tanggal 18 – 24 April di Bandung. Konferensi Bogor merupakan Konferensi lanjutan dari Konferensi Panca Perdana Menteri Colombo. Sehingga, Konferensi Bogor dapat disebut sebagai Konferensi Panca Perdana Menteri yang kedua. Konferensi ini dilaksanakan dari tanggal 28 – 30 Desember 1954 di Istana Bogor. Adapun hal-hal yang dibahas dalam Konferensi Bogor, seperti : maksud dan tujuan Konferensi Asia Afrika, masalah sponsorship, masalah undangan negara, dan masalah waktu pelaksanaan Konferensi Asia Afrika nantinya. Dengan kata lain, Konferensi Bogor adalah Konferensi persiapan yang memberikan dasar dan arah tujuan kelak Konferensi Asia Afrika I yang diselenggarakan pada tanggal 18 – 24 April 1955 di Bandung.

Konferensi Asia Afrika I dari tanggal 18 – 24 April 1955 di Bandung itu berhasil, dan telah menciptakan saling pengertian antara negara-negara anggota Konferensi Asia Afrika I. Ini dibuktikan dengan hasil akhirnya berupa konsensus-konsensus bersama yang tertuang dalam Komunike Akhir Konferensi Asia Afrika. Konsensus-konsensus bersama yang tertuang dalam Komunike Akhir tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut : Kerjasama Ekonomi; Kerjasama Kebudayaan; Hak-hak Azasi Manusia dan Hak menentukan nasib sendiri; Masalah Rakyat-rakyat yang belum merdeka; Masalah-masalah lainnya; Peningkatan perdamaian dan kerjasama dunia; dan Deklarasi tentang peningkatan perdamaian dan kerjasama dunia. Dari hal-hal

yang tercakup dalam Komunike Akhir Konferensi Asia Afrika tersebut, yang paling terkenal ialah Deklarasi tentang peningkatan perdamaian dan kerjasama dunia. Deklarasi tentang peningkatan perdamaian dan kerjasama dunia ini dikenal sebagai “Dasasila Bandung”. Dengan kata lain, secara umum hasil Konferensi ini telah memberikan dukungan terhadap pemeliharaan dan peningkatan perdamaian serta keamanan Internasional, sehingga akan tercipta kesejahteraan dan kemakmuran dunia.

F. Metodologi Penelitian

1. Metode Pengumpulan Data dan Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah, karena penelitian ini berhubungan dengan kenyataan yang terjadi pada masa lampau. Pengertian dari metode sejarah adalah suatu proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan pada masa lampau.⁴¹ Untuk mempermudah penggunaan metode perlu adanya penegasan istilah untuk menghindari kekaburan makna dan kesalahan penafsiran judul skripsi. Adapun penegasan istilah yang digunakan dalam judul ini, yaitu sebagai berikut :

- a. Konferensi Asia Afrika I 18 – 24 April 1955 di Bandung adalah suatu pertemuan yang dilakukan oleh 29 negara peserta dikawasan Asia Afrika yang sedang mencapai usaha

⁴¹ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*. Jakarta : UI Press, 1975, hlm. 32.

kemerdekaannya di gedung Merdeka dan Dwi Warna Bandung yang diwakili oleh utusan delegasi dari 29 negara tersebut dan mencapai suatu keputusan hasil akhir berupa Komunike Akhir Konferensi Asia Afrika. Dari Komunike Akhir ini yang paling terkenal ialah Deklarasi tentang memajukan perdamaian dunia dan kerjasama Internasional (Dasasila Bandung atau Deklarasi Bandung) yang bermanfaat bagi masa depan bangsa-bangsa yang berusaha mencapai kemerdekaannya serta usaha mengatasi situasi dunia yang panas.

- b. Suatu tinjauan historis politik luar negeri Republik Indonesia adalah meninjau suatu peristiwa dari sudut pandang sejarah tentang politik luar negeri Republik Indonesia.

Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sejarah dan politik, tetapi proses penelitiannya dititik beratkan pada tinjauan aspek-aspek sejarahnya. Ini didasarkan pada konferensi Asia Afrika I terselenggara karena adanya politik luar negeri Republik Indonesia. Dengan kata lain konferensi Asia Afrika merupakan wujud nyata dari keberhasilan politik luar negeri Republik Indonesia “Bebas aktif”.

Adapun langkah-langkah kerja yang akan digunakan, yaitu :

- 1). Penentuan persoalan pokok (*subject matter*)

Persoalan pokok (*subject matter*) dalam penelitian ini adalah Konferensi Asia Afrika I. Persoalan pokok (*subject matter*) dimaksudkan agar dalam penyusunan skripsi ini tidak terjadi perluasan maupun penyempitan dalam pembahasan dan menghindari kekaburan makna serta kesalahan penafsiran judul skripsi. Persoalan pokok (*subject matter*) memerlukan adanya pembatasan suatu daerah atau wilayah dan lingkup waktu. Lingkup wilayah adalah pembatasan suatu daerah atau kawasan tertentu dimana peristiwa itu terjadi. Sedangkan lingkup waktu adalah pembatasan waktu terjadinya peristiwa sejarah itu.

Dengan kata lain, dimana dan kapan Konferensi Asia Afrika I diselenggarakan?, sesuai dengan judul penelitian maka batas daerah atau kawasan dalam penelitian ini adalah Gedung Merdeka dan Gedung Dwi Warna Bandung, karena di kedua gedung inilah sidang Konferensi Asia Afrika yang bersifat terbuka dan tertutup dilaksanakan. Sementara dalam penelitian ini pembatasan waktu ditentukan pada waktu diselenggarakannya konferensi ini, yaitu tanggal 18 – 24 April 1955. Di masa ini merupakan masa demokrasi liberal. Dengan demikian, penulisan ini memfokuskan pada peristiwa-peristiwa sejarah Konferensi Asia Afrika I tanggal 18 – 24 April 1955 yang berkaitan dengan suatu tinjauan sejarah politik luar

negeri Republik Indonesia sebagai wujud nyata keberhasilan politik luar negeri Republik Indonesia.

2). Pencarian Sumber

Pencarian sumber merupakan langkah berburu dan mengumpulkan berbagai sumber data yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti, baik yang berupa benda; bangunan; dokumen, arsip, buku, majalah, surat kabar atau tempat bersejarah yang berkaitan lainnya.

a) Sumber Primer

Sumber primer yaitu sumber yang disampaikan oleh saksi mata, bisa tertulis (dokumen) bisa tak tertulis (artefak dan informan). Dalam penelitian ini sumber primernya berupa buku-buku atau karya-karya yang dituliskan oleh saksi mata, seperti : Ali Sastroamidjojo dan Roeslan Abdulgani; maupun dokumen dan arsip-arsip Konferensi Asia Afrika I di Bandung tahun 1955.

b) Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang disampaikan oleh bukan saksi mata, biasanya buku-buku yang ditulis orang yang tidak menyaksikannya, seperti buku karya : Mohamad Sabir, Michael Leifer, A.W. Widjaja dan sebagainya. Dalam penelitian ini sumber sekunder berupa buku-buku, surat kabar, artikel atau majalah yang berkaitan dengan topik penelitian.



c) Teknik Pengumpulan Data

1). Metode Kepustakaan

Yaitu pengumpulan data melalui telaah buku-buku yang relevan dan berhubungan dengan penelitian. Dalam metode kepustakaan ini penulis mengadakan telaah pustaka mengenai buku-buku yang membahas tentang sejarah Konferensi Asia Afrika I 18 – 24 April 1955 di Bandung (Suatu Tinjauan Historis Politik Luar Negeri Republik Indonesia) pada masa demokrasi liberal. Antara lain sebagai berikut :

Roeslan Abdulgani, 1985. *Prolog dan Epilognya Konferensi Asia Afrika Bandung*. Jakarta : Idayu Press

Roeslan Abdulgani, 1980. *The Bandung Connection; Konferensi Asia Afrika Di Bandung Tahun 1955*. Jakarta : PT. Gunung Agung

Roeslan Abdulgani, 1983. *Dari Bandung ke Beograd*. Jakarta

Roeslan Abdulgani, 1977. *Sejarah Cita-cita dan Pengaruhnya Konferensi Asia Afrika Bandung*. Jakarta : Idayu Press

A.W. Widjaja, 1986. *Indonesia Asia Afrika Non Blok Politik Bebas Aktif*. Jakarta : PT. Bina Aksara.

2). Metode Dokumenter

Yaitu menelaah sumber-sumber arsip yang relevan dan berhubungan dengan penelitian.

3). Verifikasi

Setelah topik yang akan diteliti ditetapkan, sumber dikumpulkan, maka tahap selanjutnya adalah mengadakan kritik sumber dari aspek ekstern dan internnya.

Kritik sumber adalah usaha-usaha untuk memperoleh sumber yang benar dalam arti betul relevan dengan sejarah yang akan disusun.⁴²

a) Kritik Ekstern

Kritik ekstern yaitu kritik yang menyangkut sumber data untuk mengetahui otentisitas (keaslian) sumber data.

b) Kritik Intern

Kritik intern yaitu kritik untuk meneliti isi sumber itu dapat dipercaya atau tidak. Caranya yaitu dengan dipelajari, dikaji, dipahami dan dibandingkan dengan sumber-sumber lainnya.

4). Interpretasi

Kegiatan interpretasi dapat ditempuh dengan menganalisis data yang ditemukan dari berbagai sumber dan mensintesis temuan data dari berbagai sumber yang berkaitan dengan topik

⁴² Hariyono. *Mempelajari Sejarah Secara Efektif*. Jakarta : Pustaka Jaya, 1995, hlm. 111 .

penelitian. Interpretasi yang digunakan adalah interpretasi yang bersifat deskriptif, sesuai dengan penelitian ini yang bersifat deskriptif analitis.

5). Penulisan Sejarah (*Historiografi*)

Penulisan sejarah (*historiografi*) merupakan rekonstruksi yang imajinatif daripada masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh suatu proses. Dalam penulisan sejarah (*historiografi*) / penyusunan cerita sejarah perlu memperhatikan hal yaitu : kronologis, sistematis, sentralisasi gaya bahasa. Menurut Louis Gottchalk penelitian sejarah harus sekurang-kurangnya memenuhi empat hal, yaitu memuat *detail factual* yang akurat, kelengkapan bukti yang cukup, struktur yang logis dan masuk akal serta penyajian yang terang dan halus.

Penelitian ini hanya berdasarkan pada studi pustaka dan dokumen, tanpa menggunakan metode wawancara. Penelitian diperlukan untuk menemukan bukti kejadian dimasa lampau, mengubah, mengorganisir dan menafsirkan sedekat mungkin dengan apa yang sesungguhnya terjadi. Penelitian sejarah penting, karena merupakan pengenalan dengan metode dan hakekat sejarah sebagai kisah yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.⁴³

⁴³ *Ibid.*, hlm. 111 – 113.

2. Metode Penulisan

Metode penulisan yang akan digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah deskriptif analitis yang menggambarkan peristiwa masa lampau dengan disertai adanya penyelesaian tentang peristiwa yang akan menjadi bahan kajiannya. Penelitian ini, akan mengkaji masalah Konferensi Asia Afrika I 18 – 24 April 1955 di Bandung (Suatu Tinjauan Historis Politik Luar Negeri Republik Indonesia).

Sikap kehati-hatian dengan menggunakan metode penelitian sejarah sesuai dengan kaidahnya sangat diutamakan dalam pengkajiannya. Hal ini bertujuan agar unsur subyektifitas dalam penelitian berkurang, sehingga unsur obyektifitas penelitian dapat dipertahankan sesuai dengan syarat penulisan karya ilmiah. Penelitian ini penting, paling tidak dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai peristiwa masa itu, tentang apa, mengapa, bagaimana, kapan dan dimana peristiwa tersebut terjadi. Penulisan penelitian sejarah ini dilakukan dengan cara meninjau salah satu masalah dari perspektif sejarahnya berdasarkan pada peninggalan atau dokumen yang ada.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari 3 bagian, yaitu : bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. Bagian awal skripsi ini berisi Halaman Judul, Halaman Persetujuan Pembimbing, Halaman Pengesahan, Persembahan, Motto, Pernyataan Keaslian Karya, Abstrak, Abstract, Kata Pengantar, Daftar Isi, dan Daftar Lampiran.

Sementara, Bagian utama skripsi ini memuat bab-bab : Pendahuluan (Bab I), Pembahasan (Bab II, III, IV), dan Penutup (Bab V). Bab I Pendahuluan (terdiri dari 7 Sub-bab, yaitu : A. Latar Belakang Masalah, B. Perumusan Masalah, C. Tujuan dan Manfaat Penelitian, D. Kajian Pustaka dan Landasan Teori, E. Hipotesis, F. Metodologi Penelitian, dan G. Sistematika Penulisan), Bab II Faktor-faktor Pendukung Terselenggaranya Konferensi Asia Afrika I 18 – 24 April 1955 di Bandung (terdiri dari 4 Sub-bab, yaitu : A. Latar Belakang Konferensi Asia Afrika I di Bandung, B. Politik Luar Negeri RI Menjelang Konferensi Asia Afrika I di Bandung, C. Keadaan Hubungan Internasional Menjelang Konferensi Asia Afrika I di Bandung, dan D. Cita-cita Konferensi Asia Afrika I di Bandung), Bab III Jalannya Konferensi Asia Afrika I 18 – 24 April 1955 di Bandung (terdiri dari 4 Sub-bab, yaitu : A. Persiapan Konferensi Asia Afrika I di Bandung, B. Sidang Pembukaan Konferensi Asia Afrika I di Bandung, C. Jalannya Sidang Konferensi Asia Afrika I di Bandung, dan D. Sidang Penutupan Konferensi Asia Afrika I di Bandung), Bab IV Hasil Akhir Konferensi Asia Afrika I 18 – 24 April 1955 di

Bandung (terdiri 2 Sub-bab, yaitu : A. Hasil Umum Konferensi Asia Afrika I di Bandung, B. Hasil Khusus Konferensi Asia Afrika I di Bandung), Bab V Penutup (terdiri dari 2 Sub-bab, yaitu : A. Kesimpulan, B. Saran). Dan, bagian akhir skripsi ini berisi : Daftar Pustaka, dan Lampiran.



BAB II

FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG TERSELENGGARANYA

KONFERENSI ASIA AFRIKA I 18 – 24 APRIL 1955 DI BANDUNG

A. Latar Belakang Konferensi Asia Afrika I di Bandung

Pertemuan solidaritas Asia Afrika pada kenyataannya bukanlah suatu yang baru. Manifestasinya yang berlarut-larut untuk pertama kali menjelma dalam pertemuan antar mahasiswa Asia Afrika tahun 1926 dan 1927, yaitu di Kota Bierville dekat Paris dan Kota Brussel di Belgia. Dalam pertemuan di kedua Kota ini, mereka secara bersama-sama menggelorakan dan mendengungkan satu suara yang lantang yakni jiwa dan suara rakyatnya yang dijajah, ditindas dan dihina. Selain itu, mereka juga menggelorakan jiwa Nasionalisme dan Patriotisme bangsa-bangsa berwarna melawan Imperialisme dan Kolonialisme Barat.

Adapun suara-suara mereka dalam kedua pertemuan itu, ialah sebagai berikut :

"Liberate the spirit of Asia and you will have peace, not a peace imposed by the's word, but a peace based good will. The spirit of Asia is essentially pasific". (Bebaskan jiwa Asia dan tuan-tuan akan memperoleh kedamaian, bukan perdamaian dengan paksaan pedang, tetapi perdamaian berdasarkan kemauan baik. Jiwa Asia pada dasarnya adalah jiwa damai !).

"The fundamental strunggle between Western Imperialism and the defensive Nationalism of the coloured races"! (Perjuangan

fundamental antara Imperialisme Barat dengan Nasionalisme rakyat-rakyat berwarna untuk bela diri!).¹

Suara-suara mereka ini terus berkumandang dan berdampak luas seiring waktu berjalan, yang nantinya mulai tumbuh subur, berkembang dan terealisasi dalam pertemuan tingkat Perdana Menteri di Colombo, pertemuan tingkat Perdana Menteri di Bogor sampai pada akhirnya diselenggarakan Konferensi Asia Afrika di Bandung yang pertama kalinya. Konferensi Asia Afrika diselenggarakan dalam suasana makin meningkatnya perjuangan bangsa-bangsa terjajah untuk memperoleh kemerdekaannya, serta usaha-usaha untuk menggalang persatuan dan solidaritas di antara negara-negara berkembang dan merdeka. Situasi *intern* pada masa itu diliputi oleh kecemasan akan timbulnya perang atom. Situasi ini, mendorong negara-negara yang sedang berkembang untuk mencari jalan untuk membantu meredakan ketegangan dunia serta memelihara perdamaian dunia.

Jika dilihat dari latar belakangnya, kebangunan solidaritas bangsa-bangsa Asia Afrika untuk menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika di Bandung tanggal 18 – 24 April 1955 itu sudah pernah ada. Kebangkitan solidaritas bangsa-bangsa Asia Afrika itu tumbuh bersamaan dengan bangkitnya kesadaran bangsa-bangsa Asia Afrika untuk menentukan nasibnya sendiri, serta sedikit banyak terpengaruh oleh runtuhnya mitos bahwa bangsa

¹ Roeslan Abdulgani, *The Bandung Connection; Konferensi Asia Afrika di Bandung Tahun 1955*. Jakarta : Gunung Agung, 1980, hlm 10.

Eropa yang berkulit putih itu adalah bangsa yang tidak terkalahkan. Kita sudah dari dulu mengetahui dan mempercayai, bahwa *Paham Asiatisme* itu dapat hidup dan bangkit di dalam pergerakan kita. Menurut Ernest Renan, terbentuknya suatu negara atau bangsa tidak lepas dari keinginan untuk hidup bersama, memiliki satu jiwa, pendirian rohani dan kesetiakawanan yang agung.

Pada tahun 1905 kemenangan Jepang atas Rusia dirasakan oleh dunia Asia sebagai suatu kemenangan Timur atas Barat, dalam mengejar keadilan dan kemerdekaan. Di Eropa pada masa itu banyak pemuda yang berasal dari Asia yang mendapat kesempatan untuk menuntut ilmu. Kesempatan itu memberikan semangat baru, sehingga mereka berkenalan dengan alam yang lain, yakni berkenalan dengan berbagai Ideologi besar yang mengubah dunia dan mengenal arti pentingnya perjuangan dan Demokrasi.

Terdorong oleh pengalaman yang sama sebagai sesama bumi putera dari negara jajahan, para pemuda ini sering berkumpul bertukar pikiran dan pendapat. Mereka berdiskusi tentang berbagai hal yang menyangkut bangsanya yang terhindar oleh bangsa-bangsa Eropa. Seperti yang pernah terjadi di benua Eropa pada bulan Agustus 1926, di kota Bierville dekat Paris tempat diselenggarakannya *Congres Democratique I International* ke-VI . Kongres ini dihadiri oleh para pemuda dari berbagai bangsa, antara lain Duong Van Giau dari Annam (Indocina), Toptchybachy dari Azer Baidjan (Soviet_Asia), Tung Meau dari Tiongkok dan K.M. Panikkau dari India.

Sedangkan, Indonesia diwakili oleh pemuda-pemuda yang menuntut ilmu di negeri Belanda yang tergabung dalam Perhimpunan Indonesia, yakni Mohammad Hatta, Natser Pamuntjak, Ahmad Subardjo, Arnold Manahutu, Gatot Tarumihardjo, dan Abdul Manaf.

Pada kongres tersebut, mereka ikut memainkan peranan dalam membangkitkan solidaritas Asia Afrika bersama-sama dengan pemuda-pemuda dari berbagai bangsa di Asia Afrika. Kongres ini berhasil melahirkan kesepakatan bersama yang menyerukan kepada dunia : *Bebaskan jiwa Asia dan tuan-tuan akan memperoleh perdamaian, bukan perdamaian dengan pedang, tetapi perdamaian berdasarkan kemauan baik. Jiwa Asia pada dasarnya adalah jiwa perdamaian.*²

Selang setahun, yakni bulan Februari 1927 jiwa dan sikap solidaritas yang sama dibawa juga dalam kongres pendirian organisasi Internasional bernama *League against Imperialism, against Colonial Oppression, and for National Independence*. Kongres ini dilaksanakan di Kota Brussel (Belgia), yang hadir dalam kongres yakni Nehru mewakili pemuda India, Liao mewakili pemuda Tiongkok, Hafiz Rahman Bey mewakili pemuda Mesir, Senghor mewakili pemuda Senegal dari Afrika, dan Mohammad Hatta beserta pemuda-pemuda yang pernah hadir dalam kongres Bierville mewakili Indonesia.

² Roeslan Abdulgani, *Sejarah Cita-cita dan Pengaruhnya Konferensi Asia Afrika Bandung*. Jakarta : Idayu Press, 1977, hlm. 13-14.

Selain dalam kongres Bierville dan kongres Brussell, jiwa solidaritas Asia Afrika secara tidak langsung terlihat juga dalam sebuah artikel Ir. Soekarno yang berjudul "*Indonesianisme dan Pan Asiatisme*". Ir. Soekarno mengemukakan pentingnya kesadaran kesetiakawanan antar bangsa-bangsa Asia yang pada masa itu sedang bersamaan berjuang untuk kemerdekaan. Dikemukakan, bahwa dapatkah Nasionalisme kita hubungkan dengan *Paham Pan Asiatisme*, yakni paham yang melintasi batas negeri tanah air kita. Nasionalisme kita bukanlah Nasionalisme yang sempit, Nasionalisme kita tidak timbul dari kesombongan bangsa kita belaka, yakni Nasionalisme yang timbul dari pengetahuan atas susunan dunia dan akhirat, bukan pula Chauvinisme, atau tiruan daripada Nasionalisme Barat. Nasionalisme kita adalah Nasionalisme yang dalam kelebarannya dan keeluasaanannya memberi tempat cinta pada bangsa-bangsa lain.

Ucapan Ir. Soekarno yang terkenal pada tahun 1930- an, tentang cita-cita "*Indonesianisme dan Paham Asiatisme*" yaitu, sebagai berikut :

"Kalau Barong Liong Sai dari Tiongkok bekerjasama dengan Lembu Nandi dari India, dengan Spinx dari Mesir, dengan Burung Merak dari Birma, dengan Gajah Putih dari Siam, dengan Harimau dari Filipina dan dengan Banteng dari Indonesia, maka pasti hancur lebur Kolonialisme Internasional".³

Jiwa solidaritas Asia Afrika yang telah ditaburkan oleh pribadi-pribadi yang bercita-cita tinggi yang tertarik dan merasa terikat kepada nasib dan duka rakyat banyak antara tahun 1926 sampai 1930-an tersebut, akhirnya pada

³ Roeslan Abdulgani, *op.cit.*, 1980, hlm. 9.

tahun 1954 mulai tumbuh, mulai berkembang dan mulai terealisasi. Dan, sampai akhirnya terealisasi dengan terselenggaranya Konferensi Asia Afrika I di Bandung pada tahun 1955.

Pada permulaan tahun 1954, tepatnya ketika bangsa Indonesia sedang membenahi diri untuk menyingkirkan sisa-sisa Kolonial dan membangunnya kembali, datanglah surat undangan resmi dari Pemerintah Srilanka. Maksud surat undangan tersebut, yakni meminta kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk mengirimkan delegasinya hadir dan ikut serta dalam sebuah Konferensi informal di Colombo bersama-sama dengan delegasi lainya dari Burma, India, dan Pakistan. Konferensi Colombo yang diselenggarakan akhir bulan April 1954 adalah Konferensi tingkat Perdana Menteri, sehingga yang hadir dan ikut serta dalam Konferensi ini yakni para Perdana Menteri. Berikut adalah para Perdana Menteri dalam Konferensi Colombo, yaitu : P.M. Srilanka "Sir John Kotelawala", P.M. Burma "U Nu", P.M. Pakistan "Mohammad Ali", P.M. India "Jawaharlal Nehru", dan P.M. Indonesia "Ali Sastroamidjojo". *(Lebih jelasnya, lihat gambar lima (5) P.M. tersebut dalam lampiran 1).*

Adapun maksud dari Konferensi ini adalah untuk membicarakan kepentingan-kepentingan bersama antara negara-negara bertetangga dekat itu. Mengingat kekhawatiran dan keprihatinan mengenai situasi peperangan di Indocina pada waktu itu; mengenai meningkatnya agresi Komunis di bumi Asia, dan mengenai perkembangan persenjataan nuklir. Undangan tersebut

mendapat sambutan baik dari Indonesia, karena politik bertetangga baik telah menjadi program pemerintah dibawah kepemimpinan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo.

Sebelum berangkat ke Konferensi Colombo, sebagai persiapannya diadakanlah Konferensi Dinas di Tugu, Puncak Bogor dari tanggal 9 – 22 Maret 1954 oleh Menteri Luar Negeri Sunario bersama-sama dengan Duta-duta besar kita di negara-negara Asia Afrika. Konferensi Dinas di Tugu ini membahas rumusan-rumusan yang menjadi bahan bagi P.M. Ali Sastroamidjojo untuk dibawa ke Konferensi Colombo, sebagai dasar usul-usul Indonesia dalam meluaskan gagasan kerjasama regional di tingkat Asia Afrika.⁴ Setelah Konferensi Dinas Tugu selesai pertengahan bulan April 1954, P.M. Ali Sastroamidjojo mengadakan pertemuan dengan Presiden Soekarno di Istana Merdeka untuk membicarakan dan menyampaikan gagasan kerjasama Asia Afrika. Serta menunjukkan daftar rombongan yang akan pergi ke Colombo, yakni Mr. Achmad Subardjo, Ir. H. Djuanda, dan Max Maramis.

Bagi Pemerintah Indonesia menyambut undangan dengan baik merupakan peluang untuk melaksanakan garis politik luar negeri Republik Indonesia yang bebas dan aktif menuju perdamaian dunia, artinya tidak condong pada salah satu pihak yang sedang melakukan Perang Dingin. Selanjutnya juga berarti melahirkan inisiatif terbentuknya hubungan tetangga baik secara luas, nantinya akan terjelma dalam Konferensi Asia Afrika. Situasi

⁴ *Ibid.*, hlm. 12

sekitar Indonesia ketika itu memang memaksanya untuk tidak pasif, melainkan untuk aktif. Sehingga nanti dalam Konferensi Panca Perdana Menteri di Colombo wakil Indonesia yaitu P.M. Ali Sastroamidjojo tidak menia-nyiakan kesempatan yang gemilang ini, dengan segera beliau mengusulkan dengan tegas gagasan kerjasama Asia Afrika.

Adapun sumbangan pikiran P.M. Ali Sastroamidjojo dalam kesempatan mengajukan usulnya di dalam Konferensi Colombo, ialah supaya diadakan :

“Suatu Konferensi yang sama hakekatnya dengan Konferensi Colombo sekarang, tapi lebih luas jangkauannya dengan tidak hanya memasukkan negara-negara Asia, tetapi juga negara-negara Afrika Lainnya.” (A Conference similar in nature to the presents Conference, but wider in scope to include not only countries of Asia, but some countries of Africa as well).⁵

Selain itu, P.M. Ali Sastroamidjojo juga menegaskan, bahwa :

“Saya akan merasa puas apabila Konferensi Colombo dapat menyetujui bahwa Indonesia akan men-sponsori sendiri Konferensi Asia Afrika demikian.” (I would be satisfied if the Colombo Conference agreed that a Conference on the lines proposed should be sponsored by Indonesia).⁶

Dari kebulatan usul P.M. Ali Sastroamidjojo inilah, akhirnya Komunike Konferensi Panca Perdana Menteri Colombo mengatakan :

“Para PM telah membicarakan perlu/tidaknya mengadakan sebuah Konferensi Asia Afrika, dan menerima baik usul bahwa PM Indonesia akan menyelidiki kemungkinannya.” (The Prime Ministers discussed the desirability of holding a Conference of

⁵ Ibid., hlm. 13.

⁶ Ibid., hlm. 14.

*African Asian nation, and favored a proposal that the Prime Ministers of Indonesia might explore the possibility of such a Conference).*⁷

Dengan keputusan Komunike Akhir Konferensi Panca Perdana Menteri Colombo tersebut, selesailah Konferensi Colombo. Sebagai kelanjutannya, diadakanlah Konferensi Panca Perdana Menteri yang kedua dari tanggal 28 – 29 Desember 1954 di Istana Bogor. Konferensi Panca Perdana Menteri yang kedua ini dikenal dengan Konferensi Bogor. Konferensi Bogor ini membahas hal-hal, seperti : maksud dan tujuan Konferensi Asia Afrika, masalah *sponsorship*, masalah undangan negara, dan masalah waktu pelaksanaan Konferensi Asia Afrika nantinya. Dengan kata lain, Konferensi Bogor adalah Konferensi persiapan yang memberikan dasar dan arah tujuan kelak Konferensi Asia Afrika I yang diselenggarakan pada tanggal 18 – 24 April 1955 di Bandung.

B. Politik Luar Negeri Indonesia Menjelang Konferensi Asia Afrika I

Undang-undang Dasar Republik Indonesia dalam pembukaannya memuat dua kewajiban pokok bagi pemerintahan Indonesia yang menyangkut bidang hubungan dan politik luar negeri. Pertama, adalah turut menghilangkan penjajahan di atas dunia yang tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan karena kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Bidang kedua, ikut

⁷ *Loc.cit.*

serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Negara Indonesia yang baru merdeka dihadapkan pada berbagai masalah rehabilitasi ekonomi dan ketertiban umum. Masalah-masalah ini diperburuk oleh upaya Separatisme yang gagal di kepulauan Maluku Selatan dan oleh peralihan secara tiba-tiba dari bentuk negara Federal menjadi bentuk negara Kesatuan. Dalam situasi seperti ini, politik luar negeri harus disesuaikan dengan keperluan-keperluan dalam negeri, terutama kepentingan ekonomi yang berstruktur asing yang bersatu dengan realita kemerdekaan politik. Berlanjutnya dominasi asing khususnya Belanda dan masyarakat Cina dalam ekonomi Indonesia yang bersifat Kolonial harus dihapuskan atau dikurangi untuk meningkatkan pemulihan nasional. Keadaan ketergantungan seperti ini berarti bahwa koalisi pemerintahan parlementer yang dipaksakan bersatu dengan unsur-unsur yang stabil, tidak akan mampu mengadakan kompromi dengan pihak asing. Oleh karena itu, politik luar negeri yang dijalankan penuh kendala; politik luar negeri mencerminkan beban yang ditimpakan kedalam konsensus dalam negeri oleh persyaratan-persyaratan penyerahan kedaulatan yang bersifat kontroversial.⁸

Gambaran yang menonjol dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia pada awal tahun 1950-an adalah masalah-masalah dan keputusan-keputusan yang menyangkut politik luar negeri diikutsertakan kedalam arena

⁸ Michael Leifer, *Politik Luar Negeri Indonesia*. Jakarta : PT Gramedia, 1986, hlm. 39.

politik dalam negara. Dalam periode ini pemerintah dapat dikatakan telah melanggar atau mengabaikan prinsip utama kebijakan luar negeri, sehingga mudah dihancurkan oleh tantangan politik yang siap memakai kelemahan dalam kebijakan luar negeri untuk membentuk pemerintah koalisi baru. Gambaran dari pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia tahun 1950-an secara tak langsung dapat dilihat dari pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para pemimpin-pemimpin kabinet, antara lain seperti : Mohammad Hatta, Sukiman, dan Wilopo.

Mohammad Hatta mengemukakan serta menjelaskan, bahwa :

"Indonesia tidak memainkan sikap keberpihakan di antara kedua blok yang bertentangan dan menempuh jalannya sendiri dalam berbagai masalah Internasional. Kebijaksanaan seperti ini disebut dengan istilah bebas dan kemudian untuk menandainya digambarkan sebagai "bebas" dan "aktif". Istilah aktif dapat dimaksudkan sebagai upaya bekerja secara penuh semangat bagi pemeliharaan perdamaian melalui dukungan kuat jika mungkin oleh mayoritas anggota PBB. Konsolidasi internal merupakan tugas utama. Pemerintah harus menunjukkan bukti perbaikan sosial ekonomi jika ingin mengimbangi pengaruh agitasi kelompok radikal. Suatu kebijaksanaan luar negeri yang menunjukkan keberpihakan kepada salah satu negara Adikuasa akan menyebabkan tugas utama ini semakin bertambah sulit".⁹

Sementara, Sukiman mengemukakan bahwa :

"Suatu suasana kesatuan dan solidaritas sangat diperlukan apabila kita ingin mencapai hasil-hasil yang memuaskan dalam usaha-usaha kita pada bidang pembangunan dan stabilisasi. Komitmen atau akibat-akibat yang ditimbulkan oleh hubungan-hubungan luar negeri kita seyogyanya tidak mengganggu atau bahkan mempersukar "keadaan internal" Indonesia".¹⁰

⁹ Ibid., hlm. 42.

¹⁰ Ibid., hlm. 50.

Selanjutnya, Wilopo menyatakan bahwa :

"Pemerintah berharap, kita tidak melupakan bahwa terdapat patokan-patokan adat kebiasaan dalam hubungan-hubungan Internasional yang harus kita taati sebagai negara yang menghormati dirinya sendiri. Sebagaimana dalam kasus yang berkaitan dengan hubungan-hubungan internal yang di dalamnya kita harus menaati peraturan-peraturan tertentu, kita juga harus tunduk dalam hubungan Internasional kita terhadap peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh hukum dan kebiasaan Internasional. Dengan kata lain, pada dasarnya tidak diperkenankan untuk merevisi atau membatalkan suatu persetujuan yang telah kita adakan dengan negara lain secara sepihak -- tanpa persetujuan negara yang bersangkutan -- jika pelaksanaan persetujuan tersebut ternyata tak bermanfaat bagi kita".¹¹

Hubungan luar negeri yang dirintis sejak perang kemerdekaan berkembang sesudah pengakuan kedaulatan pada tahun 1949. Kabinet Republik Indonesia Serikat di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Hatta melaksanakan hubungan luar negeri yang menitik beratkan pada negara-negara Asia dan negara-negara Barat, karena kepentingan ekonomi Indonesia masih terkait di Eropa; pasaran hasil bumi Indonesia masih berpusat di Negeri Belanda dan Eropa Barat pada umumnya. Untuk kepentingan yang sama pemerintah mengirimkan Djuanda guna mencari bantuan yang tidak mengikat ke Amerika Serikat.

Garis itu diteruskan oleh kabinet penggantinya yaitu kabinet Natsir (September 1950 = Maret 1951) setelah kembali kepada bentuk Negara Kesatuan. Adapun kabinet Sukiman (April 1951 – Februari 1952) pengganti

¹¹ *Ibid.*, hlm. 50 – 51.

kabinet Natsir, menempuh kebijaksanaan yang menyimpang dari politik luar negeri bebas aktif. Yakni, pada bulan Januari 1952 Menteri Luar Negeri Ahmad Subardjo mengadakan pertukaran surat dengan Duta Besar Amerika Serikat Merle Cochran dalam rangka mendapatkan bantuan dari Amerika Serikat berdasarkan *Mutual Security Act (MSA)*. Sekalipun masih didalam tingkat pertukaran surat, kejadian ini mengundang reaksi dari berbagai pihak, pemerintah dianggap telah meninggalkan politik luar negeri yang bebas aktif dan memasukkan Indonesia dalam sistem pertahanan blok Barat. Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS) telah menolak ratifikasi perjanjian itu, sehingga kabinet Sukiman jatuh dan digantikan kabinet Wilopo (April 1952 – Juni 1953).¹² Karena disebabkan provensialisme bahkan separatisme sehingga mosi tidak percaya dilancarkan. Sebagai akibatnya, tanggal 2 Juni 1953 Wilopo mengembalikan mandat kabinetnya kepada Presiden.

Setelah perundingan yang berlarut-larut, Wilopo digantikan sebagai Perdana Menteri oleh Ali Sastroamidjojo, seorang tokoh Partai Nasional yang terkenal dan telah menjabat duta besar di Washington Amerika Serikat. Kabinetnya menonjol karena absennya partisipasi Masyumi. Selama masa jabatannya, perhatian yang cukup besar diberikan pada kebijaksanaan luar negeri, tetapi diwujudkan dalam bentuk penekanan bukan dalam bentuk pembaharuan yang radikal. Pengalaman dan wawasan Perdana Menteri baru ini merupakan suatu faktor penting dalam derajat perubahan tersebut. Dunia

¹² Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta : Balai Pustaka, 1993, hlm. 226.

diplomasi tak hanya hal yang tak asing, tetapi juga lebih menarik daripada masalah-masalah sosial ekonomi dalam negeri yang semakin membandel yang dihadapi Indonesia pada pertengahan tahun 1953.

Disamping itu, kebijaksanaan luar negeri lebih digunakan untuk melayani pemerintah yang tengah memegang kewenangan daripada melayani kepentingan oposisi politik. Ali menunjukkan suatu rasa mewakili Indonesia yang kuat. Dia juga tertarik oleh kesempatan-kesempatan baru untuk suatu peranan Internasional yang timbul setelah meninggalnya Stalin dan gencatan senjata di Korea, dan kesempatan-kesempatan baru itu diperlihatkan oleh kesediaan kedua negara Komunis utama untuk menerima realitas politik Non Blok.¹³

Dengan kata lain, sebagai Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo telah mengaku mewakili pencerminan asli kebijakan luar negeri dan mencari bukti bagi pandangan ini, yaitu dengan membedakan wawasan pemerintahannya dengan sikap pendahulunya. Untuk tujuan ini suatu persetujuan untuk menetapkan hubungan diplomatik dengan Uni Soviet dicapai pada bulan Desember 1953. Selain itu, pemerintahannya juga meubah hubungan Uni Indonesia_Belanda menjadi hubungan Internasional biasa, menormalisasi hubungan Indonesia_Jepang, dan mengusahakan penyelesaian Irian Barat. Mengenai usaha meubah hubungan Uni Indonesia_Belanda menjadi hubungan Internasional biasa ini dilakukan pemerintah melalui persetujuan tentang

¹³ Michael Leifer, *op.cit.*, hlm. 54 – 55.

pembubaran Uni dan penghapusan beberapa perjanjian K.M.B yang menyangkut bidang kebudayaan dan militer, yakni dengan mengirimkan delegasi Menteri Luar Negeri Sunario ke Den-Haag tahun 1954 untuk berunding dengan Menteri Luar Negeri Luns. Pembubaran Uni Indonesia_Belanda ini memberikan pengaruh psikologis atas politik Indonesia terhadap pihak Belanda, misalnya : pembubaran Uni tersebut bisa menjadi perangsang untuk memperjuangkan pembebasan Irian Barat lebih gigih lagi, hubungan Indonesia_Belanda menjadi normal kembali, dan memungkinkan Indonesia untuk lebih bebas memperjuangkan penghapusan ikatan perjanjian-perjanjian K.M.B.

Sementara, mengenai usaha untuk menormalisasi hubungan Indonesia_Jepang, pemerintah melakukannya dengan mencari dasar yang kuat dan menguntungkan, yakni melalui perjanjian bilateral yang berfokus pada soal ganti rugi perang sebagai pengganti perjanjian San Francisco. Sedangkan, mengenai penyelesaian Irian Barat Pemerintah tidak lagi menggunakan jalur perundingan Bilateral dengan Belanda. Melainkan, Irian Barat diletakkan pada segi Internasional, yakni sebagai problem Kolonialisme mengingat problem ini sedang hebat-hebatnya diperjuangkan di seluruh dunia. Penyelesaian Irian Barat ini mendapat kesempatan pertama pada tanggal 28 April 1954 ketika Indonesia menghadiri Konferensi Panca Perdana Menteri di Colombo, kesempatan kedua terbuka lagi pada tanggal 17 Agustus 1954 dalam sidang umum P.B.B ke-9, kesempatan yang ketiga ialah pada

Konferensi Panca Perdana Menteri di Bogor tanggal 28 – 29 Desember 1954, dan kesempatan yang keempat yakni dalam Konferensi Asia Afrika di Bandung tanggal 18 – 24 April 1955.

Kabinet Ali mempunyai prestasi utama dalam hubungan luar negeri yang dibuktikan dengan diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika I di Bandung tahun 1955. Peristiwa diplomatik bersejarah ini dihadiri oleh tokoh-tokoh Internasional, yang kemudian membawa martabat bagi Indonesia dan kemasyuran politik luar negeri bagi Perdana Menterinya.

Selain itu, dengan diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika tersebut maka negara Indonesia segera mendapat tempat yang terhormat dalam peta politik dunia. Selain meningkatkan kedudukan Internasionalnya, komposisi delegasi peserta konferensi menunjukkan bahwa pemerintah menganut kebijaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Sebagai contoh, kehadiran suatu delegasi Cina memberikan kesempatan untuk memperbaiki hubungan politik yang kurang baik sejak awalnya. Faktor yang mempengaruhi hubungan itu adalah suatu masalah domestik besar mengenai kedudukan penduduk masyarakat etnik Cina di Indonesia. Masalah itu, seperti : masalah penerapan konsep kewarganegaraan etnik tersebut atas dasar identitas ras yang berakibat pada munculnya kekhawatiran, kecurigaan dan kekecewaan dikalangan etnik pribumi (rakyat Indonesia) terhadap etnik Cina.

Usaha memperbaiki hubungan Cina dan Indonesia tersebut, mulai dilaksanakan pada bulan November 1954 yang selanjutnya dilanjutkan pada

tanggal 22 April 1955, yakni dengan penandatanganan suatu perjanjian tentang dihapuskannya prinsip *Jus Sanguinis*. Penandatanganan perjanjian ini dilakukan oleh Perdana Menteri Chou En-lai dengan Menteri Luar Negeri Sunario. Dengan ditinggalkannya prinsip *Jus Sanguinis*, penduduk Cina yang tidak mempunyai kewarganegaraan diberikan hak untuk memilih salah satu dari kewarganegaraan dalam jangka waktu dua tahun. Selain itu, adanya perjanjian tentang *Dwi Kenegaraan* tersebut menandai suatu langkah praktis dalam perkembangan hubungan baru, meski dalam kenyataannya belum dapat menghilangkan benteng-benteng dasar mengenai penduduk masyarakat etnik Cina.

Bagi Indonesia sendiri dengan diadakannya Konferensi Asia Afrika membawa keuntungan yang nyata, yaitu ditandatanganinya persetujuan kewarganegaraan rangkap antara Republik Rakyat Cina (*R.R.C*) dengan Indonesia. Yang memegang *dwi kenegaraan* harus memilih salah satu, menjadi warga negara Indonesia atau Republik Rakyat Cina (*R.R.C.*) dan yang tidak bisa memilih dapat mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Keuntungan yang kedua adalah dukungan yang didapatkan dari keputusan Konferensi Asia Afrika dalam perjuangan merebut kembali Irian Barat.

C. Keadaan Hubungan Internasional Menjelang Konferensi Asia Afrika I

Sebagai negara yang masih muda, Indonesia sedang mengadakan pembenahan dan baru melangkah setelah berakhirnya perang kemerdekaan.

Keadaan dalam negeri masih diliputi kekurangan dan kelemahan di segala bidang. Oleh karena itu, posisi Indonesia benar-benar sulit dalam menghadapi pengaruh dari Blok Barat ataupun Blok Timur. Tahun 1953 perang Korea mulai mereda, tetapi tidak demikian dengan situasi di Indochina. Perancis dengan keunggulannya dalam bidang peralatan militer ternyata tidak berdaya menindas gerakan dibawah kepemimpinan Ho Chi Minh. Pada permulaan tahun 1954 kedudukan Perancis di Indochina semakin parah, Amerika Serikat yang melihat situasi tersebut tidak terlepas dari Perang Dinginnya mulai memberikan bantuan berupa alat-alat persenjataan militer kepada Perancis.

Pada bulan April 1954 situasi semakin bertambah buruk, tepatnya beberapa hari sesudah Konferensi Colombo selesai benteng Dien-Bien Phu yang menjadi kebanggaan Perancis dalam strateginya Jendral Navarre jatuh ke tangan Jendral Vo Nguyen Giap. Kenyataan ini mendorong menteri luar negeri John Foster Dulles dengan idenya untuk membantu Perancis meskipun harus dengan senjata nuklir, namun idenya tersebut tidak mendapat persetujuan dari Inggris maupun dari negara-negara Barat lainnya.

Malapetaka Perancis di Indochina ini mempercepat perundingan Jenewa yang sudah dimulai tanggal 26 April 1954. Konferensi Jenewa menghasilkan suatu rangkaian perjanjian mengenai Vietnam dan menghentikan permusuhan di Laos dan Kamboja. Hasil Konferensi Jenewa ini dirasakan oleh pihak Amerika Serikat kurang memuaskan, sehingga pada tanggal 8 September 1954 Amerika Serikat membentuk persekutuan SEATO

(*South East Asia Treaty Organisation*) yang anggotanya terdiri dari Pakistan, Thailand, Filipina, Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Australia, dan Selandia Baru. Kejadian tersebut, menandakan bahwa mundurnya Perancis di Indochina digantikan dengan merembesnya pengaruh Amerika Serikat ke dalam masalah Indochina. Selain itu, kejadian ini menandakan bahwa Perang Dingin sudah menjalar di kawasan Asia Tenggara.

Perkembangan lain yang menyebabkan ketegangan di Asia ialah peristiwa yang terjadi sekitar Pantai Timur negeri R.R.C. Pulau Quemoy, yang diduduki oleh pasukan-pasukan Chiang Kai Shek dan Amerika, dan dianggap oleh Peking sebagai wilayah Cina, dibom dan dihujani oleh pasukan-pasukan Cina dari suatu tempat terletak di Pantai Baratnya, dekat dari pulau Quemoy tersebut. Oleh karena Amerika mendukung pendirian Chiang Kai Shek, yang mengakui pulau Quemoy sebagai termasuk kekuasaannya di Taiwan, Armada ke-VII di lautan Pasifik digerakkan ke arah laut sekitar Quemoy. Tindakan Amerika dan pemboman pulau tersebut tentulah menimbulkan bahaya meluasnya konflik itu, sehingga bisa menjadi peperangan lebih besar lagi.¹⁴

Dengan kata lain, pada permulaan tahun 1955 dunia tercekam oleh kekhawatiran bahwa dalam waktu dekat Perang Dunia ke-Tiga akan meletus dan senjata-senjata nuklir pasti akan dipergunakan. Kekhawatiran itu disebabkan karena Perang Dingin telah mulai menjadi perang sungguh-sungguh di Perairan sekitar Taiwan. R.R.C. sudah mulai main kekerasan

¹⁴ Ali Sastroamidjojo, *Tonggak-Tonggak di Perjalananku*. Jakarta : PT. Kinta, 1974, hlm. 472.

senjata dengan menembaki pulau-pulau kecil di dekat Pantainya di Lautan Cina yang diduduki oleh Pasukan-pasukan Chiang Kai Shek, seperti Quemoy dan Matsu, dengan meriam-meriam kaliber berat. Amerika yang telah terikat pada janji untuk membela Chiang Kai Shek, pun telah bersiap-siap untuk membalas kekerasan dengan kekerasan. Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat di Washington telah memberikan kekuasaan penuh kepada Presiden Eisenhower untuk mengerahkan Armada ke Tujuh, yang ada di Samudera Pasifik, ke arah Lautan sekitar Taiwan. Sudah barang tentu Moskow, yang pada waktu itu masih bersahabatan erat dengan Peking, tidak tinggal diam dan mempersiapkan diri pula untuk membela R.R.C. dengan kekuatan persenjataannya, baik yang biasa maupun yang nuklir.

Kekhawatiran akan meletusnya Perang Dunia ke-Tiga itu lebih-lebih dirasakan oleh bangsa-bangsa di Asia yang baru saja mencapai kemerdekaan mereka, karena sangat mungkin sekali dengan meletusnya Perang Dunia, kemerdekaan mereka itu akan hilang lagi dan paling sedikitnya usaha-usaha pembangunan negeri-negeri mereka yang baru saja dimulai, tentulah akan terhenti dan menjadi berantakan. Begitu-pun pula yang akan terjadi dengan Negara dan Bangsa kita.¹⁵ Selain itu, tahun 1954 – 1955 ditandai pula dengan meningkatnya perjuangan kemerdekaan nasional di Aljazair, Maroko, Tunisia, Afrika Tengah, Pondi Cherry di Goa setelah Mesir menggerakkan revolusinya menggulingkan rezim raja Farouk. Masa periode ini juga telah terjadi

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 510 – 511.



pergeseran dan perubahan pucuk pimpinan Uni Soviet dari Stalin ke Malenkov, meski berjalan sementara.

Situasi dan kondisi itulah yang mendorong cita-cita solidaritas Asia Afrika yang telah berpuluh-puluh tahun hidup dalam sanubarinya mulai tercetus dalam konferensi Colombo kemudian diperluas dalam konferensi Bogor ke konteks kompleksitas Internasional. Konferensi Colombo dan Konferensi Bogor merupakan alternatif lain daripada cara militer.

D. Cita-cita Konferensi Asia Afrika I

Rumusan Maksud dan tujuan Konferensi Asia Afrika, sebenarnya telah dirumuskan dalam Konferensi Bogor tanggal 28 - 29 Desember 1954.

Adapun maksud dan tujuan Konferensi Asia Afrika, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk memajukan goodwill dan kerjasama antara bangsa-bangsa Asia Afrika, untuk menjelajah serta memajukan kepentingan-kepentingan mereka, baik yang riil dan bersama serta untuk menetapkan dan memajukan persahabatan serta perhubungan sebagai tetangga baik ;
2. Untuk mempertimbangkan soal-soal serta hubungan-hubungan di lapangan sosial, ekonomi dan kebudayaan dari negara-negara yang diwakili ;
3. Untuk mempertimbangkan soal-soal yang berupa kepentingan khusus dari bangsa-bangsa Asia Afrika, misalnya soal-soal yang mengenai kedaulatan nasional dan tentang masalah-masalah rasialisme dan kolonialisme ;
4. Untuk meninjau kedudukan Asia Afrika, serta rakyat-rakyatnya dalam dunia dewasa ini serta sumbangan yang dapat mereka berikan guna memajukan perdamaian serta kerjasama di dunia.¹⁶

¹⁶ Kementrian Penerangan RI, *Konferensi Asia Afrika di Bandung*. Jakarta, 1955, hlm.3.

Cita-cita Konferensi Asia Afrika telah muncul jauh sebelum cita-cita Konferensi Asia Afrika itu secara resmi dirumuskan dalam Konferensi Bogor dan selanjutnya terwujud dengan diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika I di Bandung, meski cita-cita tersebut hanya berupa benih cita-cita yakni ide-ide solidaritas Asia Afrika yang dikumandangkan oleh pelajar atau mahasiswa Asia Afrika di dalam Kongres-kongres, seperti Kongres Bierville tahun 1926 dan Kongres Brussel tahun 1927. Selain itu, ide-ide solidaritas Asia Afrika juga telah dikumandangkan oleh Soekarno dalam artikelnya tahun 1928 maupun dalam wejangan beliau tahun 1930-an di dalam rapat-rapat umum yang berbunyi :

“Kalau Barong Liong Sai dari Tiongkok bekerjasama dengan Lembu Nandi dari India, dengan Spinx dari Mesir, dengan Burung Merak dari Birma, dengan Gajah Putih dari Siam, dengan Harimau dari Filipina dan dengan Banteng dari Indonesia, maka pasti hancur lebur Kolonialisme Internasional”.¹⁷

Selanjutnya, ide-ide solidaritas Asia Afrika kembali berkumandang dan terwujud ketika Ali Sastroamidjojo menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia. Ide-ide solidaritas Asia Afrika ini dikumandangkan Ali Sastroamidjojo ketika memberikan keterangan mengenai politik luar negeri kabinetnya dimuka Parlemen tanggal 25 Agustus 1953 maupun dalam usulnya di Konferensi Colombo serta dalam *Joint Statement*nya yang senada bersama P.M. India (*Nehru*) tanggal 25 September 1954 dan P.M. Burma (*U Nu*)

¹⁷ Roeslan Abdulgani, *op.cit.*, 1980, hlm. 9.

tanggal 28 September 1954. Keterangan Ali Sastroamidjojo dimuka Parlemen, berbunyi :

“Kerjasama dalam golongan negara-negara Asia Arab (Afrika) kami pandang penting benar, karena kami yakin bahwa kerjasama erat antara Negara-negara tersebut tentulah memperkuat usaha kearah tercapainya perdamaian dunia yang kekal. Kerjasama antara Negara-negara Asia Afrika tersebut adalah sesuai benar dengan aturan-aturan P.B.B. yang mengenai kerjasama kedaerahan (*regional arrangements*). Selain dari itu negara-negara itu pada umumnya memang mempunyai pendirian yang sama dalam beberapa soal dilapangan Internasional, jadi mempunyai dasar sama (*Common ground*) untuk mengadakan golongan yang khusus. Dari sebab itu kerjasama tersebut akan kami lanjutkan dan pererat”.¹⁸

Sementara, usul Ali Sastroamidjojo dalam Konferensi Colombo yang diselenggarakan tanggal 28 April sampai 2 Mei 1954, berbunyi :

“Suatu Konferensi yang sama hakekatnya dengan Konferensi Colombo sekarang, tapi lebih luas jangkauannya dengan tidak hanya memasukkan negara-negara Asia, tetapi juga negara-negara Afrika lainnya.” (*A conference similar in nature to the presents Conference, but wider in scope to include not only countries of Asia but, some contries of Afrika as well*).¹⁹

“Saya akan merasa puas apabila Konferensi Colombo dapat menyetujui bahwa Indonesia akan men-sponsori sendiri Konferensi Asia Afrika demikian.” (*I would be satisfied if the Colombo Conference agreed that a Conference on the lines proposed should be sponsored by Indonesia*).²⁰

Sedangkan, dalam Joint Statementnya yang senada bersama P.M. India dan P.M. Burma, berbunyi :

¹⁸ Ali Sastroamidjojo, *op.cit.*, hlm. 460.

¹⁹ Roeslan Abdulgani, *op.cit.*, 1980, hlm.13.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 14.

“Kedua Perdana Menteri membicarakan juga usul untuk mengadakan Konferensi Asia Afrika, dan mereka berdua sependapat bahwa Konferensi demikian sangat perlu, dan akan sangat membantu usaha memperkokoh perdamaian dunia. Seyogyanya Konferensi itu diadakan selekas mungkin”. *(The two Prime Ministers discussed also the proposal to have a Conference of representatives of Asian and African countries and were agreed that a Conference of this kind was desirable and would be helpful in promoting the cause of peace and a common approach to these problems. It should be held at an early date).*²¹

Cita-cita ialah ibarat benih. Benih itu berada dalam hati sanubari manusia. Terutama benih cita-cita itu bersemayam dalam hati nurani manusia, yang menderita; menderita batiniah dan lahiriah, entah karena penindasan entah karena ketidak-adilan. Seperti halnya dengan benih, maka cita-cita itu memerlukan suatu ladang untuk dapat bertumbuh dan berkembang. Ladangnya cita-cita ialah kondisi dan situasi masyarakat dan keadaan. Kalau situasi dan kondisi keadaan itu tidak “*favourable*”, maka benih itu tidak akan memenuhi ladang yang subur; dan karenanya tidak akan tumbuh. Pengumpul dan penyebar benih cita-cita itu kebiasaannya ialah pribadi-pribadi yang bercita-cita tinggi, yang tertarik dan merasa “*committed*”—terikat—kepada nasib derita dan duka rakyat banyak. Mereka ialah pemimpin-pemimpin pergerakan rakyat di masa pra-kemerdekaan, dan negarawan-negarawan jujur dan berkerakyatan dalam alam kemerdekaan. Cita-cita kebangunan Asia

²¹ *Ibid.*, hlm. 19.

Afrika bukan bikinan penganjur-penganjurnya; melainkan sudah hidup lama di kalangan rakyat Asia Afrika sendiri.²²

Dalam hal ini ladangnya cita-cita Konferensi Asia Afrika ialah situasi dan kondisi Internasional tahun 1954 – 1955 yang penuh ketegangan, seperti akibat adanya Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur, akibat meningkatnya perjuangan kemerdekaan nasional di Afrika, ataupun akibat perubahan pimpinan di Uni Soviet. Dari ketegangan itu, terancamlah perdamaian dunia dan secara tidak langsung mempengaruhi pembangunan negara, khususnya negara-negara Asia Afrika yang baru merdeka.

Pada permulaan tahun 1954, P.M. Ceylon mengundang P.M. Burma, India, Indonesia dan Pakistan untuk mengadakan suatu *Informal Conference* antara 5 P.M. di Colombo, dengan maksud membicarakan masalah-masalah kepentingan bersama antara negara tetangga terdekat (*an informal conference to discuss problem of common interest between immediate neighbouring countries*). Indonesia menyetujui ide mengadakan konferensi semacam itu, karena ide yang dikemukakan oleh P.M. Ceylon itu adalah sesuai dengan politik tetangga baik seperti dalam program Pemerintah.

Dalam pada itu kami menjelaskan bahwa sekalipun kita menyetujui ide konferensi tersebut, kami berpendapat bahwa konferensi demikian itu sebaiknya diperluas dengan ikut sertanya negara-negara Asia Afrika. Pikiran tentang mempererat kerjasama antara negara-negara Asia Afrika sebenarnya

²² Roeslan Abdulgani, *op.cit.*, 1977, hlm. 16.

sudah kami kemukakan dari mulai kami memegang pemerintahan sekarang ini, yakni dalam keterangan kami mengenai politik luar negeri dimuka saudara-saudara pada tanggal 25 Agustus 1953.

Pikiran tentang kerjasama antara negara-negara Asia Afrika itu kemudian dipersiapkan dan dibahas pula secara mendalam dan luas didalam suatu konferensi Dinas antara Kepala-kepala Perwakilan kita di negara-negara Asia Afrika yang diadakan oleh Saudara Menteri Luar Negeri di Tugu dari 9 – 22 Maret 1954. Setelah pikiran itu ditinjau dan dibahas secara mendalam dan luas oleh Konferensi di Tugu itu, kemudian didapat bentuk yang lebih tegas. Itulah yang selanjutnya kami bawa sebagai bahan untuk menentukan pendirian Indonesia didalam Konferensi para Perdana Menteri negara-negara Colombo. Karena dalam Konferensi Colombo itu tidak akan dibicarakan persoalan yang mengandung pertentangan antara para negara peserta, dan karena ide Konferensi Asia Afrika itu akan dapat dimasukkan dalam agendanya, maka kami menyatakan menerima baik undangan tersebut.

Pada tanggal 28 April sampai 2 Mei 1954, bertemulah di Colombo 5 Perdana Menteri dari Burma, Ceylon, India, Indonesia, dan Pakistan dalam suatu *Informal Conference* seperti yang dimaksud diatas. Dalam Konferensi itulah, kemudian kami kemukakan ide Konferensi Asia Afrika. Setelah ide itu dibicarakan secara mendalam dan dikupas pelbagai segi-seginya, akhirnya 5 Perdana Menteri tersebut berhasil juga mengambil keputusan yang berbunyi, sebagai berikut : Para Perdana Menteri telah membicarakan perlunya

mengadakan Konferensi Asia Afrika dan menyetujui usul supaya Perdana Menteri Indonesia menyelidiki kemungkinan Konferensi semacam itu.²³

Dengan diambilnya keputusan tersebut, maka Indonesia mendapat kehormatan untuk menelaah langkah-langkah pertama kearah terwujudnya ide Konferensi Asia Afrika. Berbagai cara digunakan untuk menelaah kemungkinan pelaksanaan Konferensi Asia Afrika yang dipandang cukup besar itu. Cara pertama yakni melalui saluran diplomatik delapan belas (18) negara dikawasan Asia Afrika untuk memperoleh pandangan mereka mengenai ide mengadakan Konferensi Asia Afrika yang telah disetujui dalam Konferensi Colombo.

Dalam surat yang dikirimkan melalui kepala-kepala Perwakilan Republik Indonesia kepada delapan belas (18) negara itu, dikemukakan beberapa saran pokok antara lain, sebagai berikut :

1. Supaya yang dijadikan tujuan utama dari pada konferensi tersebut ialah pembicaraan kepentingan bersama dari bangsa-bangsa Asia Afrika didalam keadaan dunia sekarang. Dalam hal itu bukan maksud Pemerintah Indonesia untuk membentuk suatu Blok ke-3, akan tetapi adalah menjadi pendapat Indonesia, bahwa suatu Konferensi Asia Afrika sangat mungkin mendorong terciptanya suatu faktor perdamaian (*reconcilating factor*) dan dapat memberi sumbangan bagi perdamaian dunia.
2. Supaya sebagai dasar undangan setidak-tidaknya diambil golongan Asia Afrika di P.B.B. ditambah dengan negara-negara Colombo.
3. Supaya Konferensi diadakan di Indonesia
4. Supaya Konferensi diadakan dalam akhir tahun 1954.²⁴

²³ Kementrian Penerangan RI, *Keterangan Pemerintah tentang Konferensi Asia Afrika di Bandung*. Jakarta : Yayasan Idayu, 1955, hlm. 1 – 2 .

Dari jawaban yang diperoleh atas surat-surat tersebut, dijumpai berbagai pendapat mengenai waktu diadakannya Konferensi Asia Afrika dan mengenai negara-negara yang akan diundang. Namun demikian, yang terpenting telah diperoleh ketegasan bahwa negara-negara tersebut menyambut baik gagasan untuk mengadakan Konferensi Asia Afrika. Demikian juga mengenai tempatnya terdapat kesepakatan umum yakni di Indonesia.

Selain dengan surat, penjajagan juga dilakukan dengan mengadakan misi kunjungan oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo ke Ibukota keempat dari negara peserta Colombo pada bulan September tahun 1954. Dari penjajagan ini diperoleh beberapa kesepakatan, antara lain sebagai berikut :

“Mereka membicarakan juga usul untuk mengadakan Konferensi Asia Afrika, dan mereka sependapat bahwa Konferensi demikian sangat perlu, dan akan sangat membantu usaha memperkokoh perdamaian dunia. Seyogianya Konferensi diadakan secepat mungkin. Sebelum Konferensi diadakan sangat perlu para Panca Perdana Menteri Konferensi Colombo bertemu sekali lagi, dan seyogianya bertempat di Jakarta”.²⁵

Setelah usaha-usaha penjajagan atau penyelidikan tersebut selesai dan hasilnya memberikan keyakinan yang kuat bahwa Konferensi Asia Afrika itu mungkin diselenggarakan, maka Pemerintah Indonesia kemudian mengambil langkah-langkah lebih lanjut ke arah pelaksanaannya. Langkah pertama

²⁴ Kementrian Penerangan RI, *op.cit.*, hlm. 2 – 3. Lihat juga dalam LKBN Antara, 1985, hlm.12.

²⁵ Roeslan Abdulgani, *op.cit.*, 1980, hlm.19. Lihat juga dalam Kementrian Penerangan RI, *Keterangan Pemerintah tentang KAA di Bandung*. Jakarta : Yayasan Idayu, 1955, hlm.3.

sebagai persiapan pelaksanaannya, Pemerintah Indonesia mengundang para Perdana Menteri dari Burma, Ceylon, India, dan Pakistan untuk mengadakan pertemuan di Indonesia. Pertemuan ini sesuai dengan salah satu keputusan dari hasil Konferensi Colombo, yaitu untuk meninjau kembali berbagai masalah yang berkaitan dengan rencana penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika. Atas undangan Pemerintah Indonesia, tanggal 27 September 1954 para Perdana Menteri Burma, Ceylon, India, dan Pakistan tiba di Jakarta untuk menghadiri dan melaksanakan Konferensi Panca Perdana Menteri yang diselenggarakan di Bogor pada tanggal 28 – 29 Desember 1954. Dalam Konferensi Panca Perdana Menteri itu, akan dibicarakan mengenai maksud dan tujuan Konferensi Asia Afrika; mengenai Sponsor Konferensi Asia Afrika; mengenai waktu, tempat, dan lamanya pelaksanaan Konferensi Asia Afrika; mengenai tingkat delegasi yang hadir dalam Konferensi Asia Afrika; mengenai agenda Konferensi Asia Afrika; dan mengenai negara-negara yang akan diundang.

Dari hal-hal yang dibicarakan dalam Konferensi Bogor diperoleh kesepakatan, yaitu : mengenai maksud dan tujuan Konferensi Asia Afrika terdiri dari empat rumusan yang dibacakan dimuka sidang; mengenai sponsor Konferensi Asia Afrika, Indonesia sebagai sponsor utamanya sedangkan keempat negara Colombo sebagai sponsor kedua yang akan ikut membantu memikul sebagian dari biaya keuangannya ; mengenai waktu _tempat_ lamanya pelaksanaan Konferensi direncanakan pada hari minggu terakhir bulan April

1955, tempatnya di Bandung Jawa Barat, dan lamanya diperkirakan sepuluh (10) hari ; mengenai tingkat Delegasi yang hadir ditentukan, bahwa tingkatnya ialah tingkat Menteri dengan penegasan seyogianya yang dikirim adalah Perdana Menteri dan atau Menteri Luar Negeri ; mengenai agenda Konferensi tidak diambil suatu keputusan yang mengikat ; mengenai negara-negara yang akan diundang, yakni selain kelima (5) negara penyelenggara undangan juga diberikan kepada dua puluh lima (25) negara-negara di Asia dan Afrika yang telah mempunyai pemerintahan sendiri.

Adapun daftar dua puluh lima (25) negara yang diundang itu adalah sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1. Afganistan | 13. Lebanon |
| 2. Camboja | 14. Liberia |
| 3. Central African Federation | 15. Libya |
| 4. China | 16. Nepal |
| 5. Egypt | 17. Philippines |
| 6. Ethiopia | 18. Saudi Arabia |
| 7. Gold Coast | 19. Sudan |
| 8. Iran | 20. Syria |
| 9. Iraq | 21. Thailand |
| 10. Japan | 22. Turkey |
| 11. Jordan | 23. Vietnam (North) |
| 12. Laos | 24. Vietnam (South) |
| | 25. Yaman ²⁶ |

Konferensi Bogor akhirnya selesai, maka segera dibentuklah suatu Sekretariat Bersama oleh kelima negara penyelenggara Konferensi Asia

²⁶ *Ibid.*, hlm.37. Lihat juga daftar undangan negara dalam Departemen Luar Negeri RI, *Hasil-hasil Konferensi Colombo-Bogor-Asia Afrika Bandung*. Jakarta, 1955, hlm.2. yakni pada Komunike Bersama Konferensi Bogor. Disini terdapat perbedaan dalam penulisan nama negara, akan tetapi maksud dan artinya sama. Seperti : Egypt = Mesir, Pantai Emas = Gold Coast (Ghana), China = Tiongkok (R.R.C).

Afrika yang terdiri dari kepala-kepala perwakilan keempat negara penyelenggara yang berada di Jakarta dan sebagai ketuanya ialah Sekretaris Jenderal Kementrian Luar Negeri, Roeslan Abdulgani. Selain itu, dibentuklah juga Panitia Interdepartemental di Jakarta dan Panitia setempat di Bandung untuk membantu Sekretariat Bersama. Selanjutnya, untuk menyiapkan peranan Indonesia sebagai negara peserta sekaligus sebagai negara sponsor utama (tuan rumah), segala sarana dan prasarana semuanya dipersiapkan demi kelancaran jalannya Konferensi Asia Afrika I di Bandung.

Berdasarkan daftar undangan negara-negara peserta itu secara tidak langsung terlihat bahwa banyak diantara anggota-anggota delegasi yang akan hadir dalam Konferensi Asia Afrika I di Bandung tanggal 18 – 24 April 1955 nantinya belum saling mengenal satu sama lain. Bahkan, mereka mempunyai kebangsaan yang berbeda dan mempunyai latar belakang politik, ekonomi, sosial maupun kebudayaan berbeda serta berlainan. Namun dapat dimengerti, bahwa para peserta Konferensi telah dipersatukan oleh hal-hal yang lebih penting daripada keadaan mereka yang beraneka ragam, yakni keadaan yang dipersatukan oleh tujuan yang sama untuk menggalang solidaritas atau kerjasama bangsa-bangsa Asia Afrika demi meningkatnya martabat bangsa-bangsa mereka sesudah mencapai kemerdekaan nasional maupun demi memperjuangkan kemerdekaan bangsa-bangsa Asia Afrika yang masih terjajah oleh penjajahan dari segala bentuk dan manifestasinya, serta demi kepentingan terciptanya perdamaian dunia.

Dengan kata lain, para peserta Konferensi Asia Afrika I di Bandung telah menjunjung tinggi cita-cita solidaritas Asia Afrika berdasarkan tiga jiwa yang begitu lama telah ada didalam diri bangsa Asia dan Afrika. Jiwa tersebut ialah Jiwa jiwa anti-Kolonialisme dan jiwa pro-perdamaian, jiwa toleransi, serta jiwa pendekatan non-militer. Ini diperlihatkan dari keputusan-keputusan Konferensi dapatlah negara-negara Asia dan Afrika membuka mata dunia, bahwa mereka bersatu untuk mencintai perdamaian dan bersedia memberikan sumbangan apa saja untuk terciptanya perdamaian dunia yang abadi. Selain itu, mereka berkumpul sebenarnya telah memperlihatkan praktek hidup berdampingan secara damai.

Secara singkatnya, Konferensi Asia Afrika di Bandung memegang teguh tiga (3) jiwa, pertama ialah jiwa anti-Kolonialisme dan jiwa pro-Perdamaian. Semangatnya adalah cinta damai, tetapi lebih cinta perdamaian. Jadi bukan perdamaian *at any cost*. Bukan perdamaian asal perdamaian, dan dengan harga apa saja. Tetapi perdamaian dalam suasana dan situasi kemerdekaan, dan yang tidak mengenal kompromis dengan Kolonialisme dalam segala manifestasinya. Istilahnya dalam Dasasila Bandung; *Freedom and Peace are interdependent* (kemerdekaan dan perdamaian kait-mengait), tak dapat dipisahkannya. Jiwa kedua adalah toleransi, yaitu hidup berdampingan secara damai antara macam-macam sistem politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang ada di dunia Asia Afrika itu. Dengan menjunjung tinggi beberapa prinsip hubungan baik demi kerjasama Internasional dan demi keuntungan

bersama (*mutual benefit*). Prinsip-prinsip itu antara lain adalah menghormati kedaulatan dan integritas teritorial masing-masing; non-Intervensi, non-Agresi, dan non-Interferensi dalam masalah domestik negara-negara lain; menghormati hak bela diri secara sendirian; dan kalau perlu secara kolektif, asal tidak untuk membela kepentingan khusus salah satu negara besar. Jiwa ketiga, adalah pendekatan non-Militer (*non-military approach*) dalam menyelesaikan segala pertikaian dan pertentangan Internasional. Umpamanya dengan jalan perundingan, persetujuan, arbitrase, dan sebagainya tanpa menggunakan ancaman atau kekerasan. Pokoknya, segala jalan damai diutamakan.²⁷

²⁷ Roeslan Abdulgani, *Indonesia Menatap Masa Depan Kumpulan Karangan*. Jakarta : PT Pustaka Merdeka, 1987, hlm.306.

BAB III

JALANNYA KONFERENSI ASIA AFRIKA I 18 – 24 APRIL 1955

DI BANDUNG

A. Persiapan Konferensi Asia Afrika I di Bandung

Konferensi Asia Afrika yang diselenggarakan di Bandung dari tanggal 18 – 24 April 1955 sebenarnya sudah dipersiapkan jauh hari sebelumnya. Ini terlihat dari, setelah ide cita-cita mengadakan Konferensi Asia Afrika mendapatkan kesepakatan atau persetujuan dalam Konferensi Panca Perdana Menteri Colombo tanggal 28 April sampai 2 Mei 1954, langkah pertama sebagai persiapannya diadakan penyelidikan/penjajagan untuk menelaah tentang kemungkinan diselenggarakan Konferensi Asia Afrika. Penyelidikan/penjajagan ini dilakukan melalui saluran-saluran diplomatik biasa, yakni dengan surat yang dikirimkan kepada 18 negara melalui Kepala-kepala perwakilan Republik Indonesia maupun melalui kunjungan-kunjungan ke empat Ibukota negara-negara peserta Konferensi Colombo pada bulan September 1954 untuk memperoleh pendapat-pendapat serta ketegasan tentang ide mengadakan Konferensi Asia Afrika.

Setelah usaha-usaha penyelidikan/penjajagan selesai dengan hasil yang meyakinkan akan ketegasan terselenggaranya Konferensi Asia Afrika, sebagai kelanjutannya diambil langkah-langkah ke arah pelaksanaannya yakni melalui

Konferensi Bogor tanggal 28 – 29 Desember 1954. Secara singkatnya, gambaran mengenai Konferensi Bogor, yaitu sebagai berikut :

Sejak hari Senin sore, tanggal 27 Desember sampai hari Selasa pagi tanggal 28 Desember 1954 para Perdana Menteri dari Burma, India, Pakistan, dan Srilanka telah tiba di Jakarta kemudian langsung diantarkan ke Bogor. Para Perdana Menteri yang datang tersebut, masing-masing disertai oleh para delegasinya.

Pada hari Selasa sore, tanggal 28 Desember 1954 pukul 14.30 WIB tepatnya sesudah makan siang barulah sidang Konferensi Bogor dibuka oleh P.M. Indonesia Ali Sastroamidjojo dengan pidato pembukaan selama 10 menit, kemudian disusul segera oleh pidato-pidato sambutan dari 4 Perdana Menteri lainnya. Setelah pidato-pidato sambutan selesai, P.M. Indonesia melaporkan hasil penjajagannya tentang Konferensi Asia Afrika kemudian dilanjutkan dengan mengusulkan hal-hal yang hendaknya dibicarakan dalam Konferensi Bogor ini, seperti : (1) Maksud dan tujuan Konferensi Asia Afrika, (2) Siapa Sponsornya, (3) waktu dan lamanya, (4) tingkat delegasi yang diminta hadir, (5) agendanya, dan yang terakhir (6) negara-negara yang diundang.

Usul P.M. Indonesia secara umum disetujui oleh para hadirin, maka segeralah dibicarakan masalah yang pertama yakni maksud dan tujuan Konferensi Asia Afrika. Dalam pembicaraan dan penentuan masalah yang pertama ini tidak mengalami hambatan, karena semua peserta mempunyai

pendapat yang sama sesuai dengan 4 rumusan konkrit dari P.M. Nehru yang dibacakan di muka sidang. Adapun empat rumusan kongkrit itu berbunyi : (1) Untuk memajukan *goodwill* dan kerjasama antara bangsa-bangsa Asia Afrika, untuk menjelajah serta memajukan kepentingan-kepentingan mereka, baik yang riil dan bersama serta untuk menetapkan dan memajukan persahabatan serta perhubungan sebagai tetangga baik, (2) Untuk mempertimbangkan soal-soal serta hubungan-hubungan di lapangan sosial, ekonomi dan kebudayaan dari negara-negara yang diwakili, (3) Untuk mempertimbangkan soal-soal yang berupa kepentingan khusus dari bangsa-bangsa Asia Afrika, misalnya soal-soal yang mengenai kedaulatan nasional dan tentang masalah-masalah rasialisme dan kolonialisme, (4) Untuk meninjau kedudukan Asia Afrika, serta rakyat-rakyatnya dalam dunia dewasa ini serta sumbangan yang dapat mereka berikan guna memajukan perdamaian serta kerjasama di dunia.

Setelah pembicaraan tentang maksud dan tujuan Konferensi Asia Afrika selesai, segera sidang dilanjutkan dengan pembicaraan masalah *Sponsorship*. Dalam pembicaraan masalah ini, disepakati bahwa yang menjadi sponsor utama yang akan mengorganisasi seluruh jalannya Konferensi Asia Afrika adalah Indonesia. Sedangkan, negara-negara peserta lainnya menjadi sponsor kedua yang ikut memikul sebagian dari biaya keuangan Konferensi Asia Afrika. Ini berarti, bahwa di tangan Indonesia-lah diletakkan tanggung jawab serta kehormatan untuk memutarakan roda organisasi dan administrasinya, termasuk keamanannya. Selain itu, akan dibentuk sebuah

Sekretariat Bersama di Indonesia dengan pimpinan sepenuhnya dari Indonesia dan empat (4) negara Kolombo lainnya akan ikut serta.

Pembicaraan masalah *Sponsorship*-pun selesai, selanjutnya dibicarakan mengenai masalah waktu dan lamanya Konferensi Asia Afrika. Dalam pembicaraan masalah ini, ditentukan bahwa Konferensi akan dimulai pada pekan terakhir dari bulan April 1955, dan lamanya diperkirakan sepuluh hari. Sedangkan, tempatnya ialah Indonesia yakni di Kota Bandung. Mengenai tingkat delegasi ditentukan, bahwa tingkatnya adalah tingkat menteri, dengan penegasan seyogianya yang dikirim adalah Perdana Menteri dan/atau Menteri Luar Negerinya.

Mengenai agenda Konferensi, tidak diambil suatu keputusan yang mengikat. Cukup diingatkan saja kepada semua negara yang akan diundang tentang empat (4) pokok maksud dan tujuan Konferensi Asia Afrika itu sebagai dasarnya, sehingga para peserta Konferensi Asia Afrika mempunyai ruang gerak yang leluasa dan tidak terikat oleh peraturan tata tertib yang kaku atau ketat. Dengan kata lain, Konferensi Bogor hanya memberikan dasar dan arah tujuannya!²⁸

Yang terakhir adalah mengenai masalah negara-negara yang diundang dalam Konferensi Asia Afrika. Pembicaraan mengenai masalah undangan tidak seperti pembicaraan masalah-masalah sebelumnya. Ini terlihat, dari rencana sidang yang sebelumnya akan ditutup hari Selasa pukul 17.00 WIB

²⁸ Roeslan Abdulgani, *op.cit.*, 1980, hlm.27.

tanggal 28 Desember 1954 ternyata mundur sampai hari Rabu malam pukul 19.40 WIB tanggal 29 Desember 1954. Sidang hari Selasa dari pukul 16.30 WIB sampai pukul 17.00 WIB membicarakan dua masalah yang perlu dipecahkan, yakni :

“Pertama : Apakah selain pemerintah dari negara-negara yang sudah merdeka, diperkenankan juga ikut serta dalam Konferensi Asia Afrika itu nanti wakil-wakil pergerakan nasional di daerah-daerah yang belum merdeka? Umpama pemimpin-pemimpin pergerakan nasional dari Malaya, Tunisia, Maroko, Palestina, Afrika Selatan dan sebagainya?

Kedua : Apakah diperbolehkan suatu negara yang sudah merdeka tidak mengirimkan “peserta”, melainkan hanya datang sebagai *observer* saja? Hal ini disebabkan karena ada keseganan dari sementara negara untuk ikut serta dalam suatu konferensi dan duduk dalam satu meja perundingan dengan negara lain, yang belum diakuinya dan karenanya belum mempunyai hubungan diplomatik. Berhubung dengan itu, mereka sebenarnya ingin datang tetapi tidak sebagai “peserta”, melainkan sekedar sebagai “peninjau”.²⁹

Dari kedua masalah tersebut, akhirnya sidang hari Selasa memberikan kesimpulan bahwa semua negara di benua Asia Afrika yang sudah merdeka atau sudah berpemerintahan sendiri akan diundang sebagai peserta penuh. *Status observer* tidak dikenal. Dan untuk menghilangkan keseganan dan keragu-raguan ditentukan suatu prinsip yang nantinya dituangkan dalam pokok ke-9 dari komunike Konferensi Bogor.

Adapun prinsip itu, berbunyi :

“Para Perdana Menteri ingin menegaskan bahwa penerimaan undangan oleh sesuatu negara sekali-kali tidak akan mengakibatkan atau mengandung suatu perubahan dalam

²⁹ *Loc.cit*

pemandangannya tentang status sesuatu negara lainnya. Penerimaan undangan itu hanya mengandung bahwa negara yang diundang itu pada umumnya mereka menyetujui maksud-maksud Konferensi. Mereka juga ingat akan asas, bahwa bentuk pemerintahan serta cara hidup sesuatu negara sekali-kali tidak akan dikenakan percampuran tangan sesuatu negara lainnya. Sesuatu pandangan yang diucapkan dalam konferensi oleh satu atau lebih negara peserta tidak akan mengikat atau dianggap diterima oleh sesuatu negara lainnya, terkecuali kalau tersebut belakangan menginginya. Maksud pokok dari konferensi ialah supaya negara-negara yang bersangkutan akan lebih mengenal pandangan masing-masing negara. Para Perdana Menteri mengharap, bahwa penjelasan ini akan memungkinkan semua negara yang diundang untuk menerima undangan mereka”.³⁰

Sementara, hari Rabu tanggal 29 Desember 1954 pukul 09.30 WIB konferensi dilanjutkan. Dari konferensi segera diputuskan bahwa 14 negara yang telah dijajagi oleh Indonesia, yaitu : Afghanistan, Mesir, Ethiopia, Iran, Iraq, Yordania, Libanon, Liberia, Libya, Filipina, Saudi Arabia, Muangthai, Syria, dan Yaman, semuanya akan diundang. Selanjutnya, sidang membicarakan negara-negara yang dinyatakan sebagai “*border-lines cases*” (negara-negara yang dianggap masih belum jelas situasinya), seperti : Israel, Nepal, Turki, Jepang, Vietnam Utara, Vietnam Selatan, Laos, Kamboja, Sudan, Gold Coast/Ghana, Federasi Afrika Tengah, Afrika Selatan, Republik Rakyat Cina, Mongolia, Korea Utara, Korea Selatan, dan Taiwan.

Dari pembicaraan undangan kepada negara-negara yang dinyatakan sebagai “*border-lines cases*” tersebut, yang paling memakan banyak waktu ialah pembicaraan undangan ke Republik Rakyat Cina. Ini disebabkan tak lain

³⁰ *Ibid.*, hlm.28.

dan tak bukan karena soal R.R.C. adalah soal yang penting sekali atau menjadi fokus perhatian dunia Internasional dan R.R.C. adalah faktor kunci yang menentukan dalam usaha meredakan situasi di Asia Tenggara. Akhirnya, pembicaraan tersebut memutuskan semua negara akan diundang terkecuali Israel, Afrika Selatan, Mongolia, Korea Utara, Korea Selatan, dan Taiwan. Dengan demikian, setelah sidang penutupan terakhir Konferensi Bogor pukul 19.40 WIB diumumkan bahwa jumlah negara yang akan diundang berjumlah 25 negara dan bersama para negara sponsor berjumlah 30 negara.

Segera, setelah Konferensi Bogor berakhir oleh kelima negara penyelenggara Konferensi Asia Afrika dibentuk suatu Sekretariat Bersama yang terdiri dari kepala-kepala Perwakilan ke-empat negara penyelenggara tersebut yang ada di Jakarta dan Saudara Sekretaris Jenderal Menteri Luar Negeri yang menjadi ketuanya.

Adapun susunan Sekretariat Bersama yaitu, sebagai berikut :

Ketua	: Roeslan Abdulgani	(Sekjend dari Kemlu)
Anggota	: B.F.H.B. Tyabji	(Dubes India)
Anggota	: Choudri Khaliquzzaman	(Dubes Pakistan)
Anggota	: M. Saravanamuttu	(Menteri Sialan)
Anggota	: Mya Sein	(KuasaUsahaBirma) ³¹

³¹ Djawatan Kepolisian Negara Bagian D.P.K.N, *Risalah Konferensi Asia Afrika di Bandung*. Jakarta, 1955, hlm.23.

Sekretariat Bersama ini terbagi lagi dalam beberapa Komite. Ada Komite Politik, Sosial, dan Ekonomi, yang harus menampung dan/atau menyiapkan "*working papers*" di bidang semua itu. Ada Komite yang mengurus keuangan, hubungan pers, akomodasi, transport, dan logistik.³² (*Mengenai susunan Komite (Sub-Panitia), lebih jelasnya lihat dalam lampiran 5*).

Atas nama lima (5) negara penyelenggara Konferensi Asia Afrika, Pemerintah Indonesia mengirimkan undangan kepada dua puluh lima (25) negara seperti yang telah diputuskan dalam Konferensi Bogor. Reaksi-reaksi yang datang setelah undangan itu dikirimkan, menunjukkan bahwa pada umumnya ide mengadakan Konferensi Asia Afrika serta tujuannya itu mendapatkan sambutan yang baik dari kalangan negara-negara yang diundang. Mula-mula hal tersebut terbukti pada reaksi-reaksi pers dunia. Kemudian sambutan yang baik itu terbukti pula pada jawaban yang diterima dari para undangan. Terkecuali, negara Federasi Afrika Tengah, semua negara yang diundang menjawab dengan menyatakan kesediaannya untuk menghadiri Konferensi Asia Afrika dan menyatakan pula persetujuannya atas tujuan-tujuan Konferensi Asia Afrika sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Konferensi Bogor. Bahkan, negara Federasi Afrika Tengah yang menyatakan tidak dapat hadir-pun menerangkan bahwa negaranya tidak menolak tujuan-tujuan Konferensi Asia Afrika, melainkan menerangkan ketidakhadirannya

³² Roeslan Abdulgani, *op.cit.*, 1980, hlm.39.

dikarenakan berhubung dengan sibuknya pekerjaan Perdana Menteri dan para Menterinya. Sementara itu, Sekretariat Bersama meminta kepada calon negara peserta untuk mengirimkan usul tentang agenda dan *rules of procedure* yang hendak diperkuat dengan *working papers*.³³

Dalam pada itu, tidak kurang dari 30 kertas kerja atau "*working papers*" telah masuk ke Joint Sekretariat (Sekretariat Bersama) berasal dari negara-negara peserta. Semua itu harus dipelajari, dikompilir dan diperbanyak untuk memudahkan pembicaraan nanti. Joint Sekretariat (Sekretariat Bersama) sendiri membuat kurang lebih 10 kertas kerja. Kertas-kertas kerja itu mencakup semua bidang dari situasi Internasional, persenjataan nuklir dan non-nuklir sampai ke hubungan ekonomi dan kerjasama ilmu dan kebudayaan.³⁴ Dari jawaban seluruh undangan dikirimkan, terlihat bahwa yang menyatakan tidak akan datang hanya *Central African Federation* (Federasi Afrika Tengah). Dengan begitu, maka jumlah keseluruhan peserta yang menghadiri Konferensi Asia Afrika adalah 29 negara (24 negara yang diundang dan 5 negara sponsor).

Untuk membantu Sekretariat Bersama dan menjaga supaya Sekretariat ini berakar dalam aparatur Pemerintahan Indonesia, dibentuklah oleh Ketua Sekretariat Bersama dua Panitia. Pertama ialah Panitia Interdepartmental di Jakarta, dan kedua ialah Panitia Lokal di Bandung. Dalam Panitia

³³ Kementrian Penerangan RI, *Keterangan Pemerintah tentang Konferensi Asia Afrika di Bandung*. Jakarta : Yayasan Idayu, 1955, hlm. 5.

³⁴ Roeslan Abdulgani, *op.cit.*, 1980, hlm. 41.

Interdepartemental ini, sebagai ketuanya adalah Roeslan Abdulgani dan komposisinya terdiri dari wakil-wakil Departemen Luar Negeri, Perhubungan, Penerangan, Keuangan, Pekerjaan Umum, Pendidikan, Dalam Negeri, Pertahanan, dan Kepolisian. Sementara, dalam Panitia Lokal di Bandung yang duduk sebagai ketuanya adalah Gubernur Jawa Barat Sanusi Hardjadinata. Adapun tugas Panitia Lokal ini yakni melaksanakan segala persiapan teknis, administratif, security, dan sebagainya di Kota Bandung dan sekitarnya. *(Mengenai susunan kedua Panitia tersebut, lebih jelasnya lihat dalam lampiran 6).* Selanjutnya, untuk memelihara hubungan tetap baik antara Sekretariat Bersama dan Panitia Interdepartmental, maupun dengan Panitia setempat di Bandung ditunjuklah Khurana dari India dan S.M. Husein dari Pakistan menjadi Pejabat Penghubung (*Liaison officer*) yang masing-masing mengurus soal akomodasi, transport, dan mengenai pers.³⁵ Selain Panitia-panitia tersebut, Pemerintah Indonesia juga membentuk suatu Panitia Interdepartemental Politik untuk memenuhi permintaan Sekretariat Bersama maupun untuk menyiapkan peranan Indonesia sebagai negara peserta. Dalam panitia ini, sebagai ketuanya yakni Mr. Sunario (Menteri Luar Negeri Indonesia).

Panitia Interdepartemental Politik ini mempunyai tiga bagian, yaitu :
(1) Bagian Politik dengan ketuanya Mr. Sunario, (2) Bagian Ekonomi dengan ketuanya Ir. Djuanda, dan (3) Bagian Kebudayaan dan Sosial dengan ketuanya

³⁵ Kementrian Penerangan RI, *Berita Konferensi Asia Afrika No.2*. Jakarta : Kementrian Penerangan RI, 1955, hlm. 4.

Dr. Abuhanifah. Ketiganya tersebut, bertugas menyiapkan usul-usul agenda dan *working papers*. Dalam waktu yang telah ditentukan, panitia tersebut berhasil menyiapkan usul-usul agenda dan *working papers* dalam lapangan politik, lapangan ekonomi, serta lapangan kebudayaan dan sosial, yang semuanya dikoordinir satu sama lainnya sesuai dengan politik negara kita, yakni :

- a). Politik bebas aktif berdasarkan kepentingan rakyat dan menuju kearah perdamaian dunia;
- b). Politik kearah kerjasama yang erat antara negara-negara Asia Afrika, dan
- c). Politik tetangga baik.

Kemudian, usul-usul agenda dan *working papers* itu dikirimkan kepada Sekretariat Bersama sebagai usul-usul Delegasi Indonesia pada awal bulan Maret 1955. Sesuai dengan dasar-dasar politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif serta sejalan dengan program kabinet tentang politik luar negeri, maka pokok-pokok agenda yang diusulkan oleh Pemerintah Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Kerjasama antara negara-negara-negara Asia Afrika untuk kepentingan bersama dan perdamaian dunia;
2. Peaceful co-existence antara bangsa-bangsa;
3. Kolonialisme;
 - a. Masalah umum :

a.a. Masalah Kolonialisme dan sisa-sisanya yang masih ada
di Asia dan Afrika.

a.b. Rasialisme

b. Masalah khusus :

Afrika Utara, Indo-China dan sebagainya.



4. Kerjasama ekonomi antara negara-negara Asia Afrika;
5. Hubungan kebudayaan antara negara-negara Asia Afrika;
6. Pemakaian tenaga nuklir untuk tujuan-tujuan damai;
7. Tinjauan sekitar P.B.B.³⁶ (*Mengenai susunan Panitia Interdepartmental politik, lebih jelasnya lihat pada lampiran 7).*

Dan selanjutnya, menjelang pembukaan Konferensi Asia Afrika dibentuklah pula Delegasi Indonesia sebagai wakil Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika. (*Mengenai daftar nama dan foto/gambar Ketua Delegasi beserta daftar susunan Delegasi negara peserta dapat dilihat dalam lampiran 3 dan 4).* Pada permulaan bulan April, selesailah segala persiapan untuk Konferensi Asia Afrika baik dalam lapangan teknis maupun dalam lapangan politik. Untuk memastikan bahwa segala persiapan penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika tersebut sudah benar-benar selesai, kurang lebih sepuluh hari sebelum Konferensi Asia Afrika dimulai Presiden Soekarno

³⁶ Kementrian Penerangan RI, *Keterangan Pemerintah tentang Konferensi Asia Afrika di Bandung*. Jakarta : Yayasan Idayu, 1955, hlm.5 – 6.

mengadakan pemeriksaan terakhir, kemudian disusul pemeriksaan terakhir oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo dengan didampingi Ketua Sekretariat Bersama yakni kira-kira lima hari sebelum pembukaan Konferensi Asia Afrika.

B. Sidang Pembukaan Konferensi Asia Afrika I di Bandung

Pada tanggal 17 April 1955, tepatnya hari Minggu pagi sekitar pukul 10.00 WIB yakni sehari sebelum pembukaan Konferensi Asia Afrika secara resmi di ruang sidang Gedung Merdeka dengan segala upacara keresmian dan kekhidmatan, para ketua-ketua delegasi dan/atau anggota Stafnya dari 22 negara peserta berkumpul di salah satu ruang Sekretariat Gedung Merdeka untuk mengadakan suatu pertemuan pendahuluan secara informal. Adapun maksud dari pertemuan pendahuluan secara informal itu ialah untuk saling mengenal satu sama lain, serta untuk saling bertukar pikiran mengenai agenda dan tata tertib Konferensi Asia Afrika agar supaya nantinya Konferensi berjalan lancar.

Rapat informal para ketua delegasi itu segera dapat menyetujui beberapa ketentuan tentang prosedur Konferensi Asia Afrika. Pertama-tama disetujui bahwa prosedur itu harus sesederhana mungkin, yaitu tidak perlu diadakan sistim suara terbanyak, melainkan dengan diadakan sistim musyawarah dan mufakat. Sistim ini dinamakan sistim mendapat konsensus. Disetujui pula, tidak diadakan pidato-pidato sambutan, terkecuali bagi pidato

pembukaan oleh Presiden Sukarno dan pidato penerimaan oleh ketua Konferensi yang terpilih. Adapun naskah-naskah pidato para ketua delegasi yang telah tersedia akan diperbanyak dan disiarkan kepada para peserta demi menghemat waktu.

Selain daripada itu, disetujui pula dengan suara bulat bahwa Perdana menteri Indonesia akan dipilih oleh sidang umum pertama sebagai Ketua Umum Konferensi. Selanjutnya, disetujui juga bahwa rapat-rapat Konferensi akan dibagi menjadi dua macam, yang satu bersifat terbuka yang boleh dihadiri oleh pers dan umum, dan yang lainnya bersifat tertutup, artinya rahasia. Rapat-rapat tertutup itu ialah rapat-rapat Panitia-panitia yang akan dibentuk pada hari pembukaan Konferensi, tanggal 18 April, sesudah pembukaan resmi oleh Presiden Sukarno. Telah disetujui pula bahwa hanya akan dibentuk tiga buah Panitia, yaitu Panitia Politik yang beranggotakan semua Ketua delegasi dengan disertai penasehat-penasehat mereka, Panitia Ekonomi dan Panitia Kebudayaan, yang masing-masing terdiri dari anggota-anggota para delegasi. Adapun Panitia Politik diketuai oleh Ketua Umum Konferensi, Panitia Ekonomi oleh Menteri Perekonomian Ir. Rooseno dan Panitia Kebudayaan oleh Menteri P.P. dan K. Mr. Moh. Yamin. Panitia-panitia tersebut berhak juga membentuk panitia-panitia *ad hoc*, apabila dianggap perlu. Rapat ini menyetujui juga supaya acara Konferensi dibuat

sesederhana mungkin, sesuai dengan apa yang telah disetujui oleh Lima Perdana Menteri di Bogor.³⁷

Beberapa ketentuan-ketentuan yang telah disetujui dalam rapat informal ketua delegasi tersebut, sifatnya hanya sementara dan memerlukan pengesahan formal oleh Konferensi Asia Afrika sendiri yang esok harinya akan dibuka. Namun, meski beberapa ketentuan-ketentuan tersebut bersifat sementara, akan tetapi ada satu hal pokok dan penting tersirat didalamnya. Yaitu, bahwa sidang-sidang tidak akan diadakan “pungutan suara”. Ini mengandung arti, bahwa prinsip musyawarah dan mufakat dijadikan landasan dan pegangan dalam mencari dan menentukan kata sepakat bersama. Dengan begitu, semua keputusan bersama bersifat konsensus.³⁸

Pada hari Senin, tanggal 18 April 1955 secara resmi Konferensi Asia Afrika dibuka, yakni dengan sidang pembukaan Konferensi Asia Afrika di Gedung Merdeka Bandung. Sidang pembukaan ini, pertama-tama dibuka oleh Presiden Sukarno dengan pidato pembukaan yang menimbulkan pengaruh terhadap perkembangan Konferensi selanjutnya, antara lain seperti : dengan pidato beliau ini tumbuhlah dikalangan peserta konferensi akan kebesaran hati ke arah persaudaraan dan persatuan, dan dengan pidato beliau ini juga tumbuhlah kepercayaan kepada diri peserta konferensi dalam menghadapi masalah-masalahnya.

³⁷ Ali Sastroamidjojo, *op.cit.*, hlm. 485.

³⁸ Roeslan Abdulgani, *op.cit.*, 1980, hlm. 59.

Begitu pidato pembukaan Presiden Sukarno selesai, dan begitu beliau beserta wakil Presiden Bung Hatta meninggalkan ruang sidang, maka dilanjutkan dengan pertemuan informal untuk mengesahkan ketentuan-ketentuan yang telah disetujui dalam pertemuan informal sebelumnya. Pertemuan informal ini diusulkan oleh delegasi-delegasi yang belum hadir pada pertemuan informal sebelumnya, seperti : delegasi dari Yaman, Turki, Pakistan, Lebanon, dan Ethiopia. Dalam pertemuan informal ini dihasilkan beberapa keputusan yaitu, sebagai berikut : Pertama, bahwa tiap Ketua Delegasi diberi hak kesempatan untuk mengucapkan pidato dalam sidang pembukaan Konferensi terbuka sekarang ini; sekalipun dengan permintaan untuk sesingkat mungkin guna memburu waktu. Kedua, bahwa agenda Konferensi adalah lima pokok, yaitu : (1) *Economic cooperation* (kerjasama ekonomi), (2) *Cultural cooperation* (kerjasama kebudayaan), (3) *Human right and self-determination* (hak asasi manusia dan hak menentukan nasib sendiri), (4) *Problems of dependent peoples* (masalah bangsa-bangsa terjajah), dan (5) *Promotion of World Peace and Cooperation* (memajukan perdamaian dunia dan kerjasama Internasional). Ketiga, bahwa tata tertib seperti yang disetujui dalam pertemuan informal pertama diterima dengan baik. Dan ke-empat, bahwa tidak dibentuk sekretariat baru bagi Konferensi Asia Afrika, melainkan ditentukan, bahwa : (1) Joint Sekretariat dalam bentuk sekarang akan berfungsi selaku Sekretariat Konferensi Asia Afrika, (2) Komunike-komunike yang dirumuskan oleh Sekretariat harus lebih dulu disetujui oleh Konferensi,

dan (3) Setiap delegasi dapat mengirimkan wakilnya ke Sekretariat, apabila dianggap perlu untuk membantu dalam penyusunan rumusan komunikasi-komunikasi.³⁹

C. Jalannya Sidang Konferensi Asia Afrika I di Bandung

Sidang Konferensi Asia Afrika terbagi menjadi dua (2), yakni sidang pleno terbuka dan sidang pleno tertutup. Adapun jalannya sidang Konferensi, yaitu : Senin, tanggal 18 April 1955 tepatnya setelah pertemuan informal untuk mengesahkan beberapa ketentuan yang telah disetujui dalam pertemuan informal sebelumnya itu selesai, segera dibukalah sidang pleno terbuka Konferensi Asia Afrika. Dalam sidang pleno terbuka ini, pertama-tama disetujui dengan suara bulat bahwa Perdana Menteri Indonesia yakni Ali Sastroamidjojo ditunjuk sebagai Ketua Konferensi dan Sekretariat Bersama ditunjuk sebagai Sekretariat Konferensi dengan Sekretaris Jendral Konferensinya saudara Roeslan Abdulgani. Kemudian, Ketua Konferensi Ali Sastroamidjojo menyampaikan pidato pembukaan yang intinya menjelaskan asal-usul gagasan Konferensi Asia Afrika beserta dasar dan tujuan Konferensi Asia Afrika tersebut. Selain itu, Beliau juga menekankan dalam pidatonya bahwa perdamaian adalah masalah pokok bagi kita semua. Oleh sebab itu, ketegangan-ketegangan yang membahayakan perdamaian dunia perlu

³⁹ *Ibid.*, hlm. 62.

ditangani mulai dari sumbernya, entah itu kolonialisme, rasialisme, eksploitasi ekonomi, perlombaan senjata, dan lain sebagainya.

Sementara, setelah pidato pembukaan Ketua Konferensi itu selesai, sidang pleno terbuka segera diskors dan akan dibuka kembali sore harinya dengan acara pidato-pidato oleh para Ketua delegasi. Pada sidang terbuka sore hari itu, tujuh (7) delegasi menyumbangkan pikirannya. Adapun tujuh (7) delegasi tersebut yaitu : Afghanistan, Kamboja, Srilanka, Mesir, Pantai Emas (sekarang Ghana), Iran, dan Iraq. Delegasi Afghanistan dan Srilanka tidak membacakan pidatonya. Tetapi secara tertulis disampaikan dan diedarkan kepada sidang, ini untuk menghemat waktu. Namun, "*on record*" kedua pidato itu termasuk dalam notulen dan dianggap sebagai diucapkan di muka umum.

Adapun delegasi-delegasi Kamboja (Pangeran Norodom Sihanouk), Mesir (Presiden Gamal Abdul Nasser), Pantai Emas (Menteri Negara Kojo Botsio), Iran (Dubes Dr. Djalal Abdoh), dan Iraq (Anggota Parlemen Dr. Mohammad Fadhel Jamali) semua mengucapkan pidatonya secara lisan.⁴⁰ Akan tetapi, sebelum acara pidato-pidato dalam sidang pleno terbuka sore tersebut dimulai, terlebih dahulu acara pembentukan Panitia Politik, Panitia Ekonomi dan Panitia Kebudayaan. Konferensi menyetujui untuk membentuk Panitia Ekonomi dan Panitia Kebudayaan, terdiri dari semua Peserta, diketuai masing-masing oleh Prof. Ir. Rooseno, Menteri Perekonomian kita, dan oleh

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 97.

Prof. Mr. Mohammad Yamin, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita. Sedangkan, Panitia Politik terdiri dari Ketua-ketua Delegasi dan diketuai oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo.⁴¹

Pagi harinya, hari Selasa tanggal 19 April 1955 sidang dan acara Konferensi masih sama dengan sidang dan acara hari sebelumnya, yakni sidang pleno terbuka dengan acara pidato-pidato oleh para ketua delegasi. Dalam sidang pleno terbuka hari Selasa pagi ini, telah angkat bicara sepuluh (10) Ketua delegasi. Adapun kesepuluh Ketua delegasi yang telah angkat bicara itu, yaitu : dari Ethiopia (Dubes Deressa), Jepang (Menteri Negara Tatsunosuke Takasaki), Jordan (Menlu Sayyed Wahid Saleh), Laos (P.M. Katay D. Sasoriti), Lebanon (P.M. Sami Solh), Liberia (Menlu Momolu Dukuly), Nepal (Mayor Jendral Sovag Jung Thapa), Pakistan (P.M. Moh. Ali), Filipina (Jendral Carlos P. Romulo), dan Sudan (P.M. Sayed Ismael El-Azhari).

Sedangkan, sore harinya yang angkat bicara lima (5) Ketua Delegasi, yaitu : dari Syria (Menlu Khaled El-Kazem), Muangthai (Menlu Pangeran Wan Waithayakon), Turki (Wakil P.M. Rustu Zorlu), R.R.C (P.M. Chou En Lai), dan Vietnam Selatan (Menteri Nguyen Qan Thoai). Sementara, Ketua-ketua Delegasi Vietnam Utara, yaitu P.M. Pham Van Dong dan Yemen, yaitu P.M. Emir Seif-el Islam Al-Hassan, menyampaikan pidatonya secara tertulis.⁴²

Dari semua pidato para Ketua delegasi, baik yang disampaikan secara lisan

⁴¹ *Loc.cit*

⁴² *Ibid.*, hlm. 97 – 98.

maupun tertulis dalam sidang pleno terbuka hari Senin tanggal 18 April 1955 maupun hari Selasa tanggal 19 April 1955, dapat dikatakan bahwa hampir semua Ketua delegasi dalam pidatonya menekankan perlunya untuk bersikap dan berpendirian bebas terhadap *Power Politic*-nya negara-negara besar, terutama para negara besar antagonisnya Perang Dingin. (*Lebih jelasnya, lihat dalam lampiran 9*).

Pagi harinya, Rabu tanggal 20 April 1955 mulailah dibuka sidang pleno tertutup Konferensi Asia Afrika oleh tiga (3) Panitia yang telah dibentuk Konferensi, yaitu : Panitia Ekonomi, Panitia Kebudayaan, dan Panitia Politik di Gedung Dwi Warna (dulunya Gedung Dana Pensiun). Dalam sidang pleno tertutup yang dilakukan oleh Panitia Ekonomi dan Panitia Kebudayaan dapat dikatakan berjalan lancar, meski seringkali ada perbedaan pendapat didalamnya. Sedangkan, dalam sidang pleno tertutup yang dilakukan oleh Panitia Politik dapat dikatakan suasana sidangnya penuh ketegangan dengan adanya perbedaan pendapat yang tajam diantara pesertanya. Akan tetapi, meski penuh ketegangan dalam sidangnya namun sidang akhirnya berjalan lancar.

Dalam sidang pleno tertutup yang dilakukan oleh Panitia Politik, agendanya meliputi tiga (3) hal, yaitu :

1. *Human right and self-determination*, (Hak-hak asasi manusia dan hak menentukan nasib diri sendiri),

2. *Problems of dependent peoples*, (Persoalan-persoalan rakyat yang masih dijajah),
3. *Promotion of World Peace and Cooperation* (Memajukan perdamaian dunia serta kerjasama Internasional).⁴³

Sesuai dengan agenda pertama, segera sidang pleno tertutup Panitia Politik membicarakan masalah hak-hak asasi manusia dalam hubungannya dengan Piagam P.B.B, dan hak-hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri, termasuk didalamnya Rasialisme maupun perjuangan rakyat-rakyat Aljazair, Maroko, Tunisia, serta Palestina; sementara mengenai Irian Barat dan Aden dibicarakan dalam sidang pleno selanjutnya. Pembicaraan mengenai soal Palestina menimbulkan sedikit ketegangan di antara peserta Delegasi sidang pleno terutama antara Delegasi negara-negara Arab, Pakistan, Afghanistan, dan Iran dengan India dan Burma, sehingga memunculkan reaksi dari delegasi Lebanon dan Republik Rakyat China. Ketegangan ini terlihat ketika mereka saling beradu pendapat mengeluarkan pendapat atau opininya mengenai hal *Zionisme Internasional*.

Begitu halnya, ketika masalah *human rights* (Hak Asasi Manusia) dihubungkan dengan Piagam P.B.B., maupun ketika sidang pleno akan mengangkat Pangeran Wan dari Muangthai sebagai *rapporteur* (Pelapor) Panitia, muncullah sedikit ketegangan antara Muangthai dengan Republik Rakyat China. Namun, ketegangan-ketegangan yang ditimbulkan dari

⁴³ *Ibid.*, hlm. 109 – 110.

perbedaan pendapat mengenai hal tersebut dapat terselesaikan karena adanya saling pengertian mereka semua, dan akhirnya dapat diputuskan bersama suatu rumusan yang menegaskan bahwa Konferensi Asia Afrika menyatakan sokongannya kepada hak-hak asasi bangsa Arab atas Palestina dan menyerukan dilaksanakannya resolusi-resolusi P.B.B. mengenai Palestina, serta menyerukan dilaksanakan tercapainya suatu penyelesaian dengan jalan damai.

Setelah pembicaraan tentang Palestina, selanjutnya esok harinya yaitu hari Kamis tanggal 21 April 1955 dimulailah tukar pikiran mengenai soal-soal Afrika Utara dan Irian Barat. Dalam pembicaraan tentang Irian Barat, muncul juga ketegangan yakni ketika merumuskan masalah tentang dukungan Konferensi Asia Afrika terhadap Irian Barat. Dapat dikatakan bahwa ketegangan dalam pembicaraan tentang Irian Barat ini muncul karena hal kecil saja "rumusan", tetapi hal kecil itu berubah menjadi besar dalam sidang pleno tertutup Panitia Politik. Sebagai alternatifnya, Panitia Politik akhirnya membentuk Panitia kecil untuk menyelesaikan masalah rumusan itu. Panitia kecil yang dibentuk ini terdiri dari wakil-wakil Indonesia, Syria, Birma, Republik Rakyat China, Iran, Turki, Lebanon, Muangthai, dan Irak. Ketuanya adalah Menteri Luar Negeri Indonesia, yaitu Mr. Sunario.

Adapun bunyi rumusan tersebut, ialah : "Supaya Konferensi Asia Afrika melahirkan penyesalannya, bahwa PBB gagal untuk membantu kedua

belah pihak (Indonesia – Belanda) mencapai penyelesaian secara damai”.⁴⁴ Akhirnya, ketegangan yang ditimbulkan rumusan tersebut dapat diselesaikan oleh Panitia kecil yang dibentuk Panitia Politik. Dengan penuh pengertian Panitia kecil segera merubah rumusan, yakni memperlunak artinya dengan mengganti “penyesalan” menjadi “harapan” agar P.B.B membantu. Bunyi keputusan Panitia kecil, sebagai berikut :

“Dalam hubungan sikap yang telah dinyatakan mengenai penghapusan Kolonialisme, Konferensi Asia Afrika menyokong kedudukan Indonesia dalam persoalan Irian-Barat, yang didasarkan pada persetujuan yang telah dicapai antara Indonesia dan Belanda. Konferensi Asia Afrika mendesak Pemerintah Belanda untuk secepat mungkin memulai lagi perundingan-perundingan untuk menepati kewajiban-kewajiban mereka seperti yang ditentukan dalam persetujuan tersebut di atas tadi, dan menyatakan harapan supaya PBB mau membantu pihak-pihak yang bersangkutan untuk menyelesaikan perselisihan ini dengan jalan damai”.⁴⁵

Hari Kamis sorenya, keputusan Panitia kecil tersebut dilaporkan dalam sidang pleno tertutup Panitia Politik, dan hasilnya diterima dengan suara bulat. Ini berarti, bahwa sokongan terhadap perjuangan Irian Barat bertambah meluas dan mendalam karena Konferensi Asia Afrika. Meski, sokongan ini baru terwujud pada tahun 1962 yakni setelah Presiden Sukarno mencanangkan program Trikoranya maupun diplomasinya untuk mendesak Belanda, akhirnya Belanda mau menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia.

Selanjutnya, setelah sidang pleno tertutup Panitia Politik hari Kamis sore menyetujui dan menerima secara bulat rumusan keputusan Panitia kecil

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 112 – 113.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 114.

tersebut, sekira pukul 17.00 WIB meledaklah kembali ketegangan dalam sidang pleno tertutup Panitia Politik. Ketegangan ini muncul kembali ketika sidang membicarakan masalah *right of self determination* (Hak menentukan nasib diri sendiri), yakni antara Delegasi Srilanka dan Delegasi Republik Rakyat Cina, tepatnya pada saat masalah ini diistilahkan *Kolonialisme* oleh P.M. Srilanka Sir John Kotelawala. Ketegangan antara kedua Delegasi ini terus memuncak, sampai waktu sidang habis dan ditutup oleh P.M. Ali Sastroamidjojo pukul 18.25 WIB dengan pernyataannya bahwa masalah tersebut akan dilanjutkan besok pagi.

Pagi harinya, Jum'at tanggal 22 April 1955 suasana sidang masih tegang, meski suasana sidang terlihat jauh lebih baik daripada hari Kamis sore kemarin. Suasana sidang menjadi lebih baik karena, adanya kesadaran antara P.M. Srilanka Sir John Kotelawala dan P.M. R.R.C Chou En Lai terhadap masalah tersebut. Ini terlihat, P.M. Srilanka telah memberikan penjelasan secara singkat bahwa usulnya kemarin tidak dimaksudkan untuk menggagalkan Konferensi maupun meng-introdukir suatu resolusi, akan tetapi usulnya kemarin hanya sekedar mengemukakan pendapatnya sendiri. Begitu halnya dengan P.M. R.R.C, beliau juga memberikan penjelasan secara singkat bahwa maksud kedatangannya ke Bandung bukan untuk mencari titik-titik pertikaian, melainkan titik-titik pertemuan.

Suasana benar-benar mulai mereda. Tetapi, “bola” Kolonialisme bentuk baru itu sudah dioper dan ditendang terus oleh Pakistan, Turki, Iraq,

dan Filipina. Akhirnya, Ketua sidang P.M. Ali Sastroamidjojo menegahi jalannya perdebatan dengan mengusulkan pembentukan sebuah Panitia kecil untuk merumuskan konsensus mengenai hal ini. Disetujui, bahwa Panitia kecil perumus terdiri dari wakil-wakil Burma, Srilanka, India, Indonesia, Lebanon, Pakistan, Filipina, R.R.C., Syria, dan Turki, dengan Ketuanya Oom Palar dari Indonesia. Setelah Pembentukan Panitia kecil perumus, sidang pleno segera diskors pukul 12.00 WIB untuk memberikan kesempatan kepada para Delegasi muslim melakukan sholat Jum'at. Panitia kecil perumus istilah "*Kolonialisme*" segera bekerja dan berusaha semaksimal mungkin untuk merumuskan istilah tersebut. Akhirnya, setelah begitu lama saling bertukar pikiran dan pendapat Panitia kecil perumus ini berhasil merumuskan istilah tersebut pada hari Minggu siang tanggal 24 April 1955. Adapun hasil dari rumusan Panitia kecil perumus itu, berbunyi : "*Kolonialisme dalam segala manifestasinya adalah suatu kejahatan yang harus diberantas secepat mungkin*". (*Colonialism in all its manifestations is an evil which should be brought to an end*).⁴⁶

Dan sore harinya, sidang pleno tertutup Panitia Politik dilanjutkan dengan mulai membicarakan hal baru yakni soal lima (5) prinsip hidup berdampingan secara damai atau *peaceful co-existence* dalam hubungannya dengan Blok-blok atau pakta-pakta militer, seperti : SEATO, CENTO, dan NATO. Dari para Delegasi dalam Panitia Politik, terlihat bahwa mereka ada

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 120.

yang *pro* terhadap Blok-blok atau Pakta-pakta militer dan *skeptis* terhadap pelaksanaan lima (5) prinsip *peaceful co-existence*, maupun sebaliknya mereka *kontra* terhadap Blok-blok atau Pakta-pakta militer dan *pro* terhadap pelaksanaan *peaceful co-existence*.

Adapun Delegasi yang *pro* terhadap Blok-blok atau Pakta-pakta militer dan *skeptis* terhadap pelaksanaan lima (5) prinsip *peaceful co-existence* adalah Irak, Turki, Pakistan, Filipina, dan Muangthai. Sedangkan, Delegasi yang *kontra* terhadap Blok-blok atau Pakta-pakta militer dan *pro* terhadap pelaksanaan *peaceful co-existence* adalah India, Burma, Indonesia, Mesir, dan R.R.C. Dengan begitu, pada saat mulai pembicaraan masalah lima (5) prinsip *peaceful co-existence* dan hubungannya dengan Blok-blok atau Pakta-pakta militer, terjadilah perbedaan pendapat diantara mereka yang didasarkan atas pandangan maupun pengalaman negaranya.

Pada umumnya, para Delegasi yang *pro* terhadap Blok-blok atau Pakta-pakta militer dan *skeptis* terhadap pelaksanaan lima (5) prinsip *peaceful co-existence* mengatakan, bahwa perdamaian dan hidup berdampingan secara damai akan tercapai dengan adanya Blok-blok atau Pakta-pakta militer, sehingga mereka menginginkan lima (5) prinsip *peaceful co-existence* harus ditambah dengan dua (2) prinsip berdasarkan pasal 51 Piagam PBB. Selain itu, mereka juga mengatakan bahwa Blok-blok atau Pakta-pakta militer bersifat defensif dan tidak bersifat agresif. Dan sebaliknya, para delegasi yang *kontra* terhadap Blok-blok atau Pakta-pakta militer dan *pro* terhadap

pelaksanaan lima (5) prinsip *peaceful co-existence*, mereka pada umumnya mengatakan bahwa perdamaian dan hidup berdampingan secara damai itu akan tercapai dengan pelaksanaan lima (5) prinsip *peaceful co-existence*, perdamaian akan terancam dengan adanya Blok-blok atau Pakta-pakta militer karena mereka bersifat Agresif dan bukan bersifat defensif.

Sidang Jum'at sore belum dapat mencapai titik terang mengenai masalah lima (5) prinsip *peaceful co-existence* dalam hubungannya dengan Blok-blok atau Pakta-pakta militer sampai waktu sidang habis. Oleh sebab itu, sidang pembicaraan masalah lima (5) prinsip *peaceful co-existence* dalam hubungannya dengan Blok-blok atau Pakta-pakta militer akan dilanjutkan esok harinya.

Esok harinya, hari Sabtu tanggal 23 April 1955 sidang pembicaraan masalah lima (5) prinsip hidup berdampingan secara damai dan hubungannya dengan Blok-blok atau Pakta-pakta militer segera dilanjutkan. Dalam sidang lanjutan hari Sabtu inipun dapat dikatakan sama dengan sebelumnya, karena perdebatan masih terus berlanjut dalam jalannya persidangan dan belum tercapai titik terang dalam masalah tersebut. Sebagai alternatifnya, pada malam harinya tepatnya pada jamuan makan malam di Bungalow Ciembuluit dibukalah tukar pikiran secara terbuka dalam Panitia Politik. Adapun tujuannya, agar semua peserta mempunyai kesempatan untuk lebih mengenal pendapat dan pendiriannya mengenai masalah perdamaian dunia dan hidup berdampingan secara damai.

Dalam tukar pikiran secara terbuka tentang masalah tersebut, akhirnya diambil suatu keputusan untuk membentuk Panitia Perumus yang terdiri dari R.R.C., India, Mesir, Burma, Kamboja, Lebanon, Jepang, Liberia, Srilanka, Pakistan, Turki, dan Filipina, dengan ketuanya adalah Presiden Gamal Abdul Nasser dari Mesir. Sedangkan Pangeran Wan dari Muangthai, sebagai *reporteur* (pelapor). Selain itu, dari tukar pikiran secara terbuka Panitia Politik memperoleh keputusan untuk membentuk suatu Panitia Perumus, diperoleh juga suatu jalan keluar mengenai masalah yang sangat peka dan pelik, yakni ketegangan disekitar hubungan R.R.C. dengan Amerika (masalah Taiwan). Ini terlihat, dari pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh PM. Chou En Lai kepada pers, yang lengkapnya berbunyi :

“Rakyat Tiongkok adalah bersahabat dengan rakyat Amerika. Rakyat Tiongkok tidak suka berperang dengan Amerika Serikat. Pemerintah Tiongkok bersedia untuk duduk bersama-sama dengan wakil Pemerintah Amerika, dan berunding soal meredakan ketegangan di Timur Jauh dan khususnya di daerah Taiwan”. (*The Chinese people are friendly toward the American people. The Chinese people do not want to have war with the United States. The Chinese Government is willing to sit down and enter into negotiations with the United States Government to discuss the question of relaxing tension in the Taiwan area*).⁴⁷

Dengan adanya tukar pikiran secara terbuka tersebut, menandakan bahwa ada aktivitas lain di luar sidang Konferensi Asia Afrika yang mempunyai arti cukup besar bagi para peserta Konferensi maupun bagi dunia luar. Bagi para peserta, yakni hilangnya keragu-raguan diantara negara-negara

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 136.

Asia Afrika (terutama pandangan mereka terhadap rezim Peking), yang sangat membantu usaha-usaha negara Asia Afrika untuk meredakan suasana genting akibat Perang Dingin. Sementara, bagi dunia luar yakni terbukanya lingkaran kurungan Amerika terhadap R.R.C. yang kelak nantinya akan membuka jalan ke arah normalisasi hubungan mereka. Meski, hubungan tersebut baru mulai dirintis lima belas tahun kemudian.

Aktivitas lain di luar sidang Konferensi, selain tukar pikiran secara terbuka tersebut ialah penandatanganan komunike bersama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah R.R.C. mengenai perjanjian Dwi Kewarganegaraan. Penandatanganan komunike bersama ini dilaksanakan pada hari Kamis sore, tanggal 22 April 1955 di kediaman Gubernur Jawa Barat. Pemerintah Indonesia diwakili oleh Menteri Luar Negeri, Mr. Sunario, sementara Pemerintah R.R.C diwakili oleh Menteri Luar Negerinya, PM. Chou En Lai.

Adapun bunyi komunike bersama itu, sebagai berikut :

“Pemerintah Republik dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok untuk menyelesaikan sebaik-baiknya masalah Dwi Kewarganegaraan, telah mengadakan perundingan pendahuluan di Peking dari tanggal 2 November sampai tanggal 23 Desember 1954 dan kemudian kedua Pemerintah tersebut berdasarkan hasil-hasil yang telah dicapai pada perundingannya di Peking itu, mengadakan perundingan lanjutan di Jakarta dan Bandung dari tanggal 29 Maret sampai 20 April 1955.

Kedua pihak, berdasarkan prinsip persamaan derajat, saling memberi manfaat dan saling tidak mencampuri politik dalam negeri masing-masing, dengan kerjasama dalam persahabatan telah mengadakan perundingan yang sepenuhnya, dan mendapat persetujuan untuk membuat suatu perjanjian antara Republik Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok mengenai masalah Dwi Kewarganegaraan itu.

Perjanjian tersebut ditandatangani di Bandung pada tanggal 22 April 1955 oleh wakil-wakil berkuasa penuh dari kedua Pemerintah.

Yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia untuk menandatangani perjanjian itu ialah Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Yang Mulia SUNARIO.

Yang mewakili Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok untuk menandatangani perjanjian itu ialah Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok, Yang Mulia CHOU EN LAI.

Perundingan-perundingan itu seluruhnya diadakan didalam suasana persahabatan yang erat. Perjanjian tersebut akan dimulai berlaku setelah disyahkan oleh kedua negara dengan setelah diadakan pertukaran surat pengesahan di Peking".⁴⁸

Memang, sewaktu Konferensi Asia Afrika berjalan banyak terjadi aktivitas diplomatik bilateral. Yaitu aktivitas antara negara-negara yang secara bilateral ingin menyelesaikan beberapa persoalan antar mereka sendiri. Itu biasa, ditengah-tengah aktivitas multilateral selalu ada aktivitas bilateral.⁴⁹

D. Sidang Penutupan Konferensi Asia Afrika I di Bandung

Hari Minggu, tanggal 24 April 1955 merupakan sidang pleno terakhir atau sidang Penutupan Konferensi Asia Afrika. Ini berarti, sidang pleno tertutup yang dilaksanakan oleh Panitia Politik, Panitia Ekonomi, dan Panitia Kebudayaan harus sudah melaporkan hasil pekerjaannya masing-masing kepada Panitia Politik.

Pada hari Minggu pagi, Panitia Ekonomi yang dipimpin oleh Prof. Ir. Rooseno dan Panitia Kebudayaan yang dipimpin oleh Prof. Mr. Mohammad

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 137 – 138.

⁴⁹ *Loc.cit.*

Yamin langsung datang ke rapat Panitia Politik untuk melaporkan hasil pekerjaannya agar supaya disahkan oleh Panitia Politik. Sementara, Panitia Politik pada saat itu belum dapat melaporkan hasil pekerjaannya, karena Panitia Politik belum dapat menghasilkan konsensus lengkap dari masalah-masalah yang dibicarakan dalam sidang plenonya. Dengan kata lain, Panitia Politik masih disibukkan dengan pekerjaannya menyelesaikan konsensus yang lengkap secepat mungkin. Kesibukan ini terlihat dari, Panitia Politik masih melanjutkan acara pembicaraan-pembicaraan mengenai masalah perdamaian dunia dan kerjasama Internasional dengan sub-acaranya, seperti : tentang beberapa aspek P.B.B, masalah perlucutan senjata konvensional dan nuklir, tentang Vietnam, dan tentang prinsip *peaceful co-existence* dalam hubungannya dengan Blok-blok militer.

Dalam acara pembicaraan mengenai masalah perdamaian dunia dan kerjasama Internasional, tepatnya mengenai sub-acara tentang beberapa aspek P.B.B, masalah perlucutan senjata konvensional dan nuklir serta masalah Vietnam, sidang pleno Panitia Politik dilingkupi ketegangan. Ketegangan itu disebabkan sewaktu membicarakan persoalan negara-negara yang dianggap telah memenuhi syarat-syarat Piagam P.B.B untuk disarankan ke Dewan Keamanan P.B.B supaya diterima menjadi anggota P.B.B. Adapun negara itu, seperti : Kamboja, Srilanka, Jepang, Yordania, Libya, Nepal, dan Vietnam yang bersatu. Saran atau anjuran kepada Dewan Keamanan P.B.B tersebut didasarkan atas alasan dan tujuan. Alasannya, bahwa banyak negara-negara

peserta Konferensi Asia Afrika yang telah diblokir oleh Dewan Keamanan P.B.B untuk dapat menjadi anggota P.B.B. Pemblokiran ini, sebenarnya merupakan dampak dari adanya permainan saling menggunakan *Veto* antara Uni Soviet dan Amerika. Sedangkan, tujuannya yakni agar supaya Dewan Keamanan P.B.B dalam menerima negara calon anggotanya berdasarkan asas universal P.B.B dan demi efektivitas kerjasama dalam forum P.B.B.

Selain itu, ketegangan juga muncul sewaktu membicarakan rumusan "*Vietnam yang bersatu*". Munculnya ketegangan dalam pembicaraan rumusan ini, terlihat ketika Delegasi Vietnam Selatan menolaknya secara emosional dengan mengatakan bahwa tidak ada "*Vietnam yang bersatu*", tetapi cukup Vietnam saja. Kemudian, dilanjutkan tuduhannya kepada India yang tidak adil sebagai Ketua Komisi Pengawasan terhadap pelaksanaan Perjanjian Jenewa. Dengan perkataannya itu, artinya Vietnam Selatan tidak menginginkan masalah Indocina dalam kerangka Perjanjian Jenewa dibongkar dan disokong oleh Konferensi Asia Afrika. Karena itu, dalam Komunike terakhir masalah Indocina ini sama sekali tidak disinggung-singgung.⁵⁰

Mengenai sub-acara tentang prinsip *peaceful co-existence* dalam hubungannya dengan Blok-blok militer, dibicarakan secara khusus oleh Panitia Perumus yang dipimpin Presiden Gamal Abdul Nasser dalam sidangnya di tingkat dua Gedung Dwiwarna. Dalam pembicaraan sub-acara yang dibicarakan dalam sidang Panitia Perumus itu, dapat dikatakan memakan

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 144.

waktu paling lama dan paling menegangkan suasananya. Ini terlihat, dari Minggu pagi sampai sore pukul 16.00 WIB belum ada perkembangan dan kemajuan dalam pembicaraan Panitia Perumus itu. Malahan sebaliknya, terjadi *dead-lock* dan keputusasaan dalam Panitia Perumus. Akan tetapi, *dead-lock* dan keputusasaan dalam Panitia Perumus itu dapat diatasi oleh Ketua Konferensi P.M. Ali Sastroamidjojo dengan menyerukan agar supaya mereka mencoba sekali lagi, dan jangan lekas putus asa.

Adapun seruan beliau berbunyi, sebagai berikut : “Sukses Konferensi ini sungguh hanya tergantung pada tuan-tuan ! Haraplah tuan-tuan sekali lagi saling beri-memberi toleransi demi kepentingan kita bersama, kepentingan Asia Afrika !”.⁵¹

Segera, setelah Ketua Konferensi Asia Afrika P.M. Ali Sastroamidjojo selesai menyerukan agar supaya mereka mencoba kembali membicarakan masalah prinsip *peaceful co-existence* dalam hubungannya dengan Blok-blok militer, akhirnya mereka mencoba kembali membicarakan masalah itu. Dan sekitar pukul 17.00 WIB, akhirnya mereka berhasil mencapai konsensus tentang masalah tersebut. Dengan begitu, sudah lengkaplah hasil pekerjaan Panitia Politik. Selanjutnya, hasil pekerjaan itu segera disyahkan oleh Panitia Politik. Setelah hasil pekerjaan disyahkan, kemudian hasil pekerjaan yang berupa konsensus tersebut dibacakan secara bersama-sama dengan hasil pekerjaan Panitia Ekonomi maupun Panitia Kebudayaan, oleh Sekretaris

⁵¹ Ali Sastroamidjojo, *op.cit.*, hlm. 504.

Jenderal Konferensi Roeslan Abdulgani pada sidang penutupan Konferensi Asia Afrika pukul 18.50 WIB di Gedung Merdeka. Konsensus-konsensus hasil pekerjaan ketiga Panitia tersebut dituangkan dalam sebuah "*Final Comunique*" yang terdiri dari 6 Bab, yaitu :

- A. *Economic Cooperation* (Kerjasama Ekonomi);
- B. *Cultural Cooperation* (Kerjasama Kebudayaan);
- C. *Human Right and Self-determination* (Hak-hak Asasi Manusia dan Hak menentukan nasib sendiri);
- D. *Problems of dependent people* (Masalah Rakyat Jajahan);
- E. *Other Problems* (Masalah-masalah lain);
- F. *Declaration on the Promotion of World Peace and Cooperation* (Deklarasi tentang memajukan perdamaian dunia dan kerjasama Internasional).⁵²

Komunike F itulah yang kemudian terkenal sebagai Deklarasi Bandung atau Dasasila Bandung. Setelah selesai pembacaan konsensus yang dituangkan dalam *Final Comunique* tersebut, maka sidang penutupan dilanjutkan dengan acara pidato-pidato sambutan dari para ketua Delegasi. Segera, setelah pidato-pidato sambutan dari para ketua Delegasi selesai, maka Ketua Konferensi P.M. Ali Sastroamidjojo pada pukul 21.30 WIB menyatakan secara resmi dengan pidato singkat penutupannya, bahwa Konferensi Asia Afrika telah selesai dan secara resmi telah ditutup.

⁵² Roeslan Abdulgani, *op.cit.*, 1980, hlm. 146.

BAB IV

HASIL AKHIR KONFERENSI ASIA AFRIKA I 18 – 24 APRIL 1955

DI BANDUNG

A. Hasil Umum Konferensi Asia Afrika I di Bandung

Konferensi Asia Afrika yang diselenggarakan dari tanggal 18 – 24 April 1955 di Bandung telah nyata menghasilkan konsensus bersama berupa Komunike Akhir Konferensi Asia Afrika yang terdiri dari 6 (enam) bab yaitu : Kerjasama Ekonomi; Kerjasama Kebudayaan; Hak-hak Asasi Manusia dan Hak menentukan nasib sendiri; Masalah rakyat-rakyat yang belum merdeka (Jajahan); Masalah-masalah lainnya; dan Deklarasi tentang peningkatan perdamaian dan kerjasama dunia. *(Adapun secara lengkapnya, bunyi Komunike Akhir Konferensi Asia Afrika dapat dilihat pada lampiran 11).*

Dengan tercapainya konsensus bersama itu, membuktikan bahwa negara-negara peserta Konferensi Asia Afrika mempunyai kesadaran akan rasa saling pengertian dan praktek hidup berdampingan secara damai. Ini diperlihatkan dari sikap-sikap mereka pada saat bersidang ataupun dari kesepakatan, saran, pendapat, dan dukungan yang mereka tuangkan dalam konsensus bersama Konferensi Asia Afrika.

Adapun sikap-sikap yang mencerminkan kesadaran akan rasa saling pengertian dan praktek hidup berdampingan secara damai dalam sidang-sidang Konferensi, seperti : dihilangkannya segala bentuk perbedaan di antara

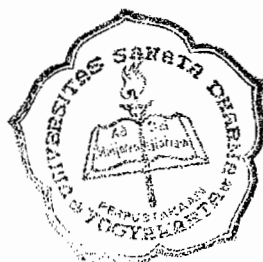
mereka dengan maksud dan tujuan yang sama, yakni membangun tonggak kerjasama Asia Afrika, serta dilupakannya rasa pedih, pahit, dan getirnya masa lampau mereka dengan menancapkan segala harapan ke masa depan. Dengan kata lain, mereka menjadikan Konferensi Asia Afrika ini sukses dengan semboyan persatuan dalam bermacam-ragaman, yang merupakan suatu kekuatan yang mempersatukan dan membawa mereka bergabung menjadi satu untuk mencari perbincangan yang bersifat persaudaraan dan bebas, serta mencari jalan dan cara yang dapat menjamin kemungkinan bagi masing-masing untuk menjalani hidupnya dengan caranya sendiri dalam suasana harmoni dan damai.

Selain itu, mereka berusaha menjunjung tinggi cita-cita kemerdekaan nasional dan kebebasan, berusaha saling mengetahui tentang keadaan masing-masing, berusaha saling mengerti, berusaha saling menghargai, berusaha saling menaruh simpati masalah masing-masing, berusaha saling mengutamakan toleransi satu sama lain, dan berusaha membuktikan ataupun menegaskan bahwa negara Asia-Afrika dapat menjadi sejahtera dengan bersatu yang nantinya akan menjamin keamanan seluruh dunia, maupun berusaha sebaik mungkin agar hasil buah berkumpul mereka dapat menjadi pedoman umat manusia untuk menentukan jalan keselamatan dan perdamaian.

Sementara, kesadaran akan rasa saling pengertian dan praktek hidup berdampingan secara damai yang mereka cerminkan pada kesepakatan, saran, pendapat, dan dukungannya dalam Konsensus Bersama, seperti :

dibicarakannya masalah-masalah yang menjadi perhatian dan kepentingan bersama negara-negara Asia Afrika, serta dibahasnya cara-cara dan upaya-upaya agar rakyat mereka dapat mencapai kerjasama ekonomi, kebudayaan, dan politik yang lebih erat.

Kesadaran akan rasa saling pengertian dan praktek hidup berdampingan secara damai dalam upaya mencapai kerjasama ekonomi, misalnya : mereka sepakat untuk saling memberikan bantuan teknis, berupa tenaga-tenaga ahli pertukaran pengetahuan dan pendirian tempat-tempat latihan atau penelitian nasional guna penyebaran pengetahuan/ ketrampilan teknis melalui kerjasama dengan lembaga-lembaga Internasional yang ada; mereka menyarankan pembentukan sedini mungkin dana khusus P.B.B untuk pembangunan ekonomi, berupa alokasi sebagian besar sumber-sumber Bank Internasional untuk rekonstruksi dan pembangunan negara-negara Asia-Afrika, pembentukan segera lembaga keuangan Internasional yang kegiatan-kegiatannya meliputi upaya penanaman modal secara adil, dan mendorong peningkatan terbentuknya perusahaan-perusahaan patungan di antara negara-negara Asia-Afrika sejauh dapat mengembangkan kepentingan bersama; mereka menyarankan agar negara-negara Asia-Afrika mengambil langkah-langkah bersama untuk memantapkan harga dan permintaan komodite-komodite primer di pasaran Internasional melalui pengaturan-pengaturan bilateral dan multilateral, sejauh mungkin dikehendaki atau dilakukan; mereka menyarankan agar negara-negara Asia-Afrika menganeka-ragamkan bersama



perdagangan ekspor dengan mengolah bahan mentah sebelum dijual, sejauh cara ini ekonomis dan mungkin dilakukan, secara bersama-sama meningkatkan pekan-pekan perdagangan antar wilayah dan mendorong pertukaran delegasi-delegasi perdagangan atau kelompok-kelompok pengusaha melalui pertukaran informasi/contoh barang demi kemajuan perdagangan antar wilayah dan melalui pemberian fasilitas-fasilitas yang wajar untuk perdagangan transit kepada negara-negara yang tidak berpantai; mereka sepakat memberikan dorongan bagi pembentukan bank-bank dan perusahaan-perusahaan asuransi nasional atau regional; dan lain sebagainya.

Sementara, kesadaran akan rasa saling pengertian dan praktek hidup berdampingan secara damai dalam upaya mencapai kerjasama kebudayaan, misalnya : mereka sepakat untuk mengutuk pelanggaran-pelanggaran hak-hak asasi manusia dalam bidang pendidikan dan kebudayaan di beberapa bagian negara-negara Asia-Afrika dengan ragam atau bentuk penindasannya, karena hal itu akan menghalangi kerjasama kebudayaan serta menindas kebudayaan nasional rakyat; berpegang pada sikap toleransi dan universalitas yang merupakan tradisi lama, mereka berpendapat bahwa kerjasama kebudayaan Asia-Afrika dapat dikembangkan dalam kerjasama dunia yang lebih luas dengan alasan untuk memperkaya kebudayaan Asia-Afrika serta untuk membantu meningkatkan peningkatan perdamaian dan saling pengertian dunia; mereka menganjurkan kepada kelompok negara-negara Asia-Afrika yang lebih maju dalam lembaga-lembaga pendidikan atau ilmu pengetahuan

agar menyediakan fasilitas-fasilitas untuk mendidik para siswa dan *trainees* dari negara-negara yang kurang maju, maupun menyediakan fasilitas-fasilitas lain bagi penduduk di Asia-Afrika yang belum memperoleh kesempatan pendidikan yang lebih tinggi; mereka berpendapat bahwa peningkatan kerjasama antara negara-negara Asia-Afrika hendaknya diarahkan kepada saling mengenal di antara sesama negara, pertukaran kebudayaan, dan pertukaran informasi; dan lain sebagainya.

Kesadaran akan rasa saling pengertian dan praktek hidup berdampingan secara damai dalam upaya mencapai kerjasama politik, misalnya : mereka menyatakan dukungannya terhadap prinsip-prinsip dasar Hak-hak Asasi Manusia dan prinsip menentukan nasib sendiri seperti yang tercantum di dalam Piagam P.B.B; mereka menyesalkan semua kebijakan dan praktek pemisahan/ diskriminasi rasial yang ada di sebagian besar wilayah Afrika ataupun bagian-bagian lainnya di dunia, serta merasa simpati dan menyokong perjuangan para korban Rasialisme ini dengan ketegasannya untuk bertekad menghapus setiap bentuk rasialisme yang ada di negara Asia-Afrika; mereka bersepakat menyatakan, bahwa penjajahan dalam segala bentuknya adalah suatu kejahatan yang segera harus diakhiri; mereka menegaskan bahwa pemaksaan rakyat pada penindasan, dominasi, dan eksploitasi asing merupakan pengingkaran atas hak-hak asasi manusia yang bertentangan dengan Piagam P.B.B dan menghalangi peningkatan kerjasama serta perdamaian dunia; mereka menyatakan dukungannya terhadap

perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa yang terjajah; mereka menyerukan kepada negara-negara yang berkepentingan agar menyerahkan kebebasan dan kemerdekaan kepada bangsa-bangsa yang terjajah; dan mengingat situasi yang tidak menentu di Afrika Utara serta banyaknya pelanggaran yang terjadi terhadap hak-hak rakyat Afrika Utara untuk menentukan nasibnya sendiri, mereka menyatakan dukungannya terhadap hak-hak rakyat Aljazair, Maroko, dan Tunisia untuk menentukan nasib dan kemerdekaannya sendiri, serta mendesak Pemerintah Perancis agar segera memecahkan masalah itu secara damai; mereka menyatakan dukungannya terhadap hak-hak penduduk Arab Palestina dan menyerukan agar resolusi-resolusi P.B.B tentang Palestina dilaksanakan serta dicapainya penyelesaian damai persoalan Palestina; mereka menyatakan dukungannya terhadap masalah Irian Barat dan mendesak agar Pemerintah Belanda segera membuka kembali perundingan dengan Pemerintah Indonesia, serta berharap sepenuhnya terhadap P.B.B untuk membantu terselesainya masalah ini secara damai; mereka menyatakan dukungannya terhadap posisi Yaman dalam masalah Aden dan bagian-bagian Selatan Yaman "*Protektorat*" dan mendesak pihak-pihak yang berkepentingan agar menyelesaikannya secara damai; mereka menyerukan agar Dewan Keamanan P.B.B menerima negara-negara peserta Konferensi Asia Afrika, seperti : Kamboja, Srilanka, Jepang, Yordania, Libia, Nepal, dan Vietnam yang bersatu menjadi anggota; mereka menyatakan bahwa perlucutan senjata sedunia merupakan syarat mutlak untuk mempertahankan perdamaian,

dan memberikan himbauan agar semua negara mengadakan peraturan pembatasan pengawasan pengurangan pelarangan pembuatan percobaan serta penggunaan pasukan bersenjata atau persenjataan yang berdaya ledak besar, maupun membentuk pengawasan Internasional yang efisien demi terciptanya perdamaian; dan mereka mengeluarkan Deklarasi tentang peningkatan perdamaian serta kerjasama dunia "Dasasila Bandung", selanjutnya disarankan oleh mereka agar semua bangsa melaksanakan tenggang rasa dan hidup bersama berdampingan secara damai dengan mengembangkan kerukunan kerjasama berdasarkan prinsip yang ada dalam Deklarasi tersebut.

Dalam upaya menanamkan atau menumbuhkan kesadaran akan saling pengertian dan praktek hidup berdampingan secara damai oleh 29 negara Asia-Afrika yang beraneka ragam itu, baik dalam sikap-sikap pada saat bersidang ataupun dalam saran, pendapat, kesepakatan, dan dukungan yang akan dituangkan dalam Konsensus Bersama tidak luput dari salah pengertian, kecurigaan, dan ketegangan. Ini terlihat, dari adanya perbedaan pendapat atau pandangan di antara 29 negara ketika sidang maupun pada saat membicarakan dan memutuskan Konsensus bersama. Itu berarti, upaya menanamkan dan menumbuhkan kesadaran akan rasa saling pengertian dan praktek hidup berdampingan secara damai dalam usaha melahirkan hasil Konferensi tidaklah mudah, disertai penuh salah pengertian, kecurigaan, dan ketegangan. Meski, pada akhirnya hasil Konferensi dapat lahir dengan selamat, berkat toleransi

dan kebijaksanaan serta kerjasama yang baik di antara para negarawan Asia Afrika di dalam Konferensi Asia Afrika Bandung.

Jadi tepatlah, yang dikatakan oleh P.M. Ali Sastroamidjojo tentang hasil Konferensi dalam bagian pidato penutupannya pada sidang penutupan Konferensi Asia Afrika, yaitu :

“...Dokumen itu yang—Saya yakin—akan mengambil tempat yang sepatutnya dalam sejarah dunia, adalah hasil dari pekerjaan dan pertukaran pikiran kita. Tidak mudah bagi siapapun juga, yang tidak mengikuti perundingan kita dari dekat, untuk menilai tingkat daripada saling mengerti dan *good-will* yang diperlukan untuk mencapai hasil ini.

Akan tetapi jelaslah kiranya, bahwa tidak mungkin melahirkan suatu dokumen dari persetujuan yang penting, menyatakan pendapat-pendapat yang sefaham dan keputusan dari lebih setengahnya penduduk dunia, kalau tidak pemimpin-pemimpin negara yang berkumpul disini adalah orang-orang pecinta damai dan berpengetahuan, dapat dan mau bekerja bersama-sama untuk memberikan kepada dunia perdamaian yang tulen, yang seluruh dunia sangat merindukannya.

...Demikianlah, pertemuan kita itu tumbuh menjadi lebih bernilai daripada hanya sesuatu konferensi semata-mata. Kita menjadi saling mengerti dalam suasana ramah tamah dan tulus hati. Kita menjadi percaya atas kecakapan kita untuk memberikan bantuan yang berharga buat perdamaian dunia, meskipun kita meninjau tujuan kita bersama itu dari sudut berlainan.

Jika Saya menamakan Komunike Bersama kita itu adalah suatu dokumen yang bersejarah, oleh karena kita mengharap bahwa pendapat kita itu akan berarti bukan saja bagi benua-benua kita, akan tetapi bahkan lebih lagi buat seluruh dunia.

...Saya berharap sungguh-sungguh, bahwa jika sebagian dunia lainnya memperhatikan sepatutnya keputusan-keputusan kita, mereka akan berbuat demikian pula dengan *good-will* yang sama bersemangat toleransi, sabar, dan arif bijaksana sebagaimana telah diperlihatkan dengan menakjubkan selama konferensi ini.

Bukan hanya masalah-masalah politik saja yang menjadi perhatian kita. Komunike bersama tuan-tuan memberi bukti, bahwa kita memberikan banyak tempo kita yang terbatas itu guna fasal-fasal ekonomi dan kebudayaan dan dicapai persetujuan dimana saja kita dapat menemukan titik persesuaian.

...Semoga kita dapat meneruskan perjalanan kita diatas jalan yang telah kita pilih bersama-sama dan semoga Konferensi Bandung ini tetap tegak sebagai sebuah mercusuar yang membimbing kemajuan di masa depan dari Asia Afrika.”⁵³

B. Hasil Khusus Konferensi Asia Afrika I di Bandung

Selain menghasilkan konsensus bersama berupa Komunique Akhir Konferensi Asia Afrika, Konferensi Asia Afrika di Bandung juga telah menghasilkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Telah dapat dielakkan, bahwa Konferensi itu menjadi medan pertentangan Perang Dingin yang tidak dapat berdamai sebagai yang mungkin diinginkan oleh sementara pihak.
- b. Sebaliknya dari itu, dengan Konferensi ini dapat diredakan ketegangan Internasional yang pada saat-saat sebelum Konferensi makin memuncak, terutama di beberapa bagian benua Asia-Afrika.
- c. Ternyata, bahwa cara musyawarah dan mufakat – suatu cara yang merupakan soko guru asli dalam penghidupan ketatanegaraan dan kemasyarakatan Indonesia – telah dapat dipakai dalam suatu Konferensi Internasional yang besar dengan hasil yang baik. Kalau di dunia Barat kebanyakan Konferensi Internasional diadakan dengan memakan waktu

⁵³ Kementrian Penerangan RI, *Konferensi Asia Afrika di Bandung*. Jakarta : Kementrian Penerangan RI, 1955, hlm.60.

yang panjang tetapi kurang membawa hasil yang memuaskan, misalnya : Konferensi Jenewa 26 April – 21 Juli 1954, Konferensi Organisasi Internasional di San Fransisco 25 April – 26 Juni 1945. Akan tetapi, Konferensi Asia-Afrika di Bandung itu menunjukkan, bahwa cara musyawarah dan mufakat yang dipakai oleh bangsa-bangsa Asia-Afrika telah mencapai hasil yang baik, dalam waktu yang singkat, meliputi masalah-masalah yang penting dan di antara aliran-aliran yang beraneka warna coraknya. Hal itu memberi harapan untuk suatu cara “*approach*” baru dalam lapangan perundingan Internasional.

- d. Berkumpulnya 29 negara Asia-Afrika, yang mempunyai beraneka warna dasar hidup kemasyarakatan, perekonomian, dan ketatanegaraan itu, sebenarnya telah memperlihatkan *co-existence* secara damai dalam praktek. Dengan demikian, Indonesia memang benar-benar merupakan titik pertemuan dari berbagai aliran-aliran yang terdapat di seluruh benua Asia-Afrika, seperti yang dikatakan Presiden Sukarno dalam pidato pembukaannya “*Indonesia adalah Asia Afrika dalam bentuk kecil*”, maupun yang dikatakan P.M. Nehru dalam pidatonya di dalam sidang penutupan “*Bandung adalah pusat dan Ibukota Asia Afrika yang berani mengumandangkan suaranya*”.

- e. Konferensi Asia Afrika telah membuka jalan untuk kerjasama yang erat antara negara-negara Asia Afrika dalam lapangan ekonomi dan kebudayaan.
- f. Konferensi Asia Afrika menunjukkan kemenangan daripada toleransi *good-will* dan *common-sence* didalam bersama-sama mencari jalan ke arah perdamaian dunia, berdasarkan atas sepuluh Azas Piagam Bandung.
- g. Konferensi Asia Afrika telah berhasil memperjuangkan semangat anti-Kolonial dalam hal yang berhubungan dengan masalah penentuan nasib sendiri.⁵⁴

Dalam perkembangan selanjutnya, Semangat Bandung telah memberikan inspirasi kepada bangsa-bangsa Asia Afrika yang pada waktu itu masih dijajah. Berkat inspirasi itu puluhan bangsa Asia Afrika menjadi merdeka. Konferensi Bandung juga telah melahirkan Gerakan Non-Blok 1961. Konferensi Bandung telah mendorong para mahasiswa, pemuda, wartawan, ulama dari benua Asia Afrika untuk terus menghidupkan Dasasila Bandung.⁵⁵ Ini dapat dibuktikan dari diselenggarakannya beberapa konferensi dalam lingkup Asia Afrika setelah Konferensi Asia Afrika di Bandung selesai, misalnya : Konferensi Makanan Asia Afrika di Bandung tahun 1956, Konferensi Pendahuluan Pengarang Asia Afrika di New Delhi tahun 1956,

⁵⁴ Kementrian Penerangan RI, *Keterangan Pemerintah tentang Konferensi Asia Afrika di Bandung*. Jakarta : Yayasan Idayu, 1955, hlm. 11 – 12.

⁵⁵ Roeslan Abdulgani, *Prolog dan Epilognya Konferensi Asia Afrika Bandung*. Jakarta, 1985, hlm. 2.

Konferensi Setiakawan Rakyat Asia Afrika di Kairo tahun 1956, Konferensi Persiapan Wanita Asia Afrika di Colombo tahun 1958, Konferensi Pemuda Asia Afrika di Kairo tahun 1959, Konferensi Organisasi Solidaritas Rakyat Asia Afrika di Conakry tahun 1960, Konferensi Wartawan Asia Afrika di Jakarta tahun 1953, Konferensi Buruh Asia Afrika di Jakarta tahun 1964, Konferensi Pendahuluan Islam Asia Afrika di Jakarta tahun 1965, dan Konferensi Islam Asia Afrika di Bandung tahun 1956.⁵⁶

Selain itu, karena desakan Konferensi Bandung pada tahun 1956/1957 tidak kurang dari 20 negara-negara yang sebelumnya selalu menjadi korban permainan Perang Dingin tidak dapat masuk menjadi anggota P.B.B, dimasukkan dalam "package deal" antara Amerika dan Uni Soviet, antara lain negara-negara peserta Bandung, seperti *Ceylon, Kamboja, Yordania, Laos, Libya, Nepal, dan Jepang*; disamping negara-negara korban Perang Dingin seperti *Irlandia, Portugal, Italia, Austria, Finlandia, Spanyol* dari Blok Barat yang selalu diveto oleh Uni Soviet; dan *Albania, Hongaria, Rumania* dan *Bulgaria* dari Blok Timur yang selalu diveto Amerika. Semua kemudian dapat masuk karena semangat Bandung. Akibatnya ialah dominasi Uni Soviet di Dewan Keamanan P.B.B dengan vetonya patah; dominasi Amerika di Majelis Umum 2/3 mayoritasnya patah. Tumbuh suatu P.B.B di mana suara negara-negara yang berpolitik bebas dari Asia Afrika dan Amerika Latin ikut menentukan jalannya sidang. Dengan kata lain, komposisi mayoritas

⁵⁶ Kementrian Penerangan RI, *Seperempat Abad Konferensi Asia Afrika*. Jakarta, 1980, hlm. 22.

pendukung rekomendasi Majelis Umum P.B.B mengalami suatu perubahan yang mendalam dengan masuknya 20 anggota baru dalam tahun 1956/1957. Saat itu merupakan suatu titik tolak dalam sejarahnya P.B.B, menutup suatu fase lama dan membuka suatu fase baru. Ini berarti bahwa terjadi perubahan yang sangat besar di dalam struktur P.B.B, dan P.B.B yang lama menjadi badan pemerintahan Internasional yang baru sama sekali.⁵⁷

Dengan melihat hasil-hasil Konferensi Asia Afrika di Bandung itu, dapat dikatakan bahwa Bandung adalah negasinya Perang Dingin. Bandung adalah penolakan pretensi negara-negara *Super Power* dan para antagonisnya Perang Dingin, seakan-akan tidak ada jalan lain bagi negara-negara nasional yang baru merdeka pada waktu itu, selain membuntut saja salah satu di antara mereka. Bandung adalah suara hati nuraninya mayoritas umat manusia, yang mempositifkan nasionalisme dan patriotisme-nya masing-masing ke tingkat yang lebih religius dan lebih sosialis. Bandung adalah jalan tengah dan jalan bebasnya bangsa-bangsa Asia Afrika di antara jalan *ekstrim*-nya para antagonis Perang Dingin. Konsensus Bandung lebih merupakan suatu pegangan dan pedoman daripada suatu persetujuan formal. Namun demikian, *moral force*-nya besar sekali, tidak hanya ke dalam bagi kepentingan nasionalnya para peserta masing-masing, namun juga keluar bagi situasi

⁵⁷ Roeslan Abdulgani, *Sejarah Cita-cita dan Pengaruhnya Konferensi Asia Afrika Bandung*. Jakarta : Idayu Press, 1977, hlm. 26.

Internasional pada waktu itu. Bandung adalah jawaban positif dan realistis atas tantangan zaman waktu itu.⁵⁸

Semangat Bandung adalah kemerdekaan dan perdamaian. *Freedom and Peace are interdependent*. Semangat Bandung merupakan kekuatan jiwa Konferensi Asia Afrika yang diselenggarakan di Bandung pada tanggal 18 sampai dengan 24 April 1955.⁵⁹ Semangat Bandung itu sangat luhur dan karenanya memerlukan suatu proses yang cukup lama dan panjang untuk dimengerti, dihayati, dan diamalkan oleh bangsa-bangsa Asia Afrika. Relevan atau tidaknya semangat Bandung untuk masa kini ia tetap merupakan suatu “Deklarasi” yang pernah diucapkan oleh wakil-wakil dua pertiga umat manusia yang mendiami kawasan Asia-Afrika. Semangat Bandung dengan Dasa Silanya bukanlah sebagai hasil suasana para pelamun yang tenggelam dalam keporak-harapan palsu. Ia adalah hasil analisis dan aksi para pejuang di antara aturan main kedua negara Adikuasa. Konferensi Bandung bertujuan untuk mempersatukan dan memupuk rasa solidaritas bangsa-bangsa Asia-Afrika dan telah pula melakukan suatu adegan kebalikan adagium negara Adikuasa seperti berikut : Biarkan bangsa-bangsa Asia Afrika menyelesaikan masalahnya sendiri “walaupun agak rapuh karena adanya perbedaan prinsip dari mereka sendiri”. Bandung tidak anti Barat, Bandung anti usaha Barat yang mengadu domba Asia-Afrika sebagai tempat gelanggang adu ayam. Bagi

⁵⁸ Roeslan Abdulgani, *op.cit.*, 1980, hlm. 148 – 149.

⁵⁹ A.W. Widjaja, *Indonesia Asia Afrika Non Blok Politik Bebas Aktif*. Jakarta : PT. Bina Aksara, 1986, hlm. 25.

Bandung, Barat bukan saja Washington tetapi juga Moskow. Di mata Bandung baik Washington maupun Moskow mempunyai peradaban dan kebudayaan yang bersumber pada sejarah peradaban dan kebudayaan yang sama.⁶⁰

Konferensi Bandung tahun 1955 adalah satu alternatif yang positif terhadap *Military Approach* dari negara-negara besar untuk menyelesaikan antagonisme Perang Dingin. Konferensi Bandung juga merupakan satu *self assertion* untuk menunjukkan kepada dunia, bahwa dunia ini bukan hanya dunianya orang Amerika disatu pihak, melainkan dunia ini juga dunianya bangsa Asia dan Afrika. Bandung adalah juga satu penolakan terhadap *Colonialism in all it's manifestations*.⁶¹ Dan secara idiil Dasasila Bandung 1955 mempunyai cakrawala yang lebih luas serta berdasarkan aspirasi umat manusia untuk menuju tertib dunia yang dilandasi kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 di Bandung merupakan manifestasi dari hidup berdampingan secara damai, tenteram, dan aman di dunia. Momentum ini telah melahirkan berpuluh-puluh negara merdeka baru yang dijuluki Dunia III.⁶²

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 29 – 30.

⁶¹ Ali Murtopo, *Tri Windu Konferensi Asia Afrika 1955 – 1979*. Jakarta : Yayasan Idayu, 1979, hlm. 31.

⁶² Loekito Santoso, *Orde Perdamaian Memecahkan Masalah Perang (Penjelajahan Polemologik)*. Jakarta : UI Press, 1986, hlm. 8.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor pendukung terselenggaranya Konferensi Asia Afrika I tanggal 18 – 24 April 1955 di Bandung, yaitu : pertama, ialah kuat dan mendalamnya cita-cita solidaritas Asia Afrika di dalam hati dan sanubari rakyatnya dalam menghadapi dominasi Barat dari segala bentuk dan manifestasinya, seperti Kolonialisme, Imperialisme, Fasisme, Komunisme, dan sebagainya. Kedua, ialah situasi dan kondisi tahun 1954 – 1955 yang menjadikan cita-cita solidaritas Asia Afrika atas dasar tiga jiwa (jiwa anti-Kolonialisme dan jiwa pro-Perdamaian, jiwa toleransi, dan jiwa pendekatan non-Militer) ini tumbuh subur, mulai direalisasikan dan akhirnya dapat terealisasikan dengan terselenggaranya Konferensi Asia Afrika di Bandung. Ketiga, ialah kebulatan tekad dari bangsa Indonesia sendiri di bawah P.M. Ali Sastroamidjojo untuk memprakarsainya.

Konferensi Asia Afrika I yang diselenggarakan dari tanggal 18 – 24 April 1955 di Bandung berjalan lancar, meski terjadi perbedaan pendapat atau pandangan di antara peserta. Jalannya Sidang Konferensi Asia Afrika terbagi menjadi dua, yakni sidang pleno bersifat terbuka yang dilaksanakan di Gedung Merdeka dan sidang pleno bersifat tertutup yang dilaksanakan di Gedung Dwi

Warna. Sidang pleno terbuka dimulai sejak hari pertama setelah sidang pembukaan Konferensi Asia Afrika tanggal 18 April 1955 sampai hari kedua, yaitu hari Selasa tanggal 19 April 1955. Sementara, sidang pleno tertutup baru dimulai hari Rabu tanggal 20 April 1955 sampai hari Minggu tanggal 24 April 1955. Kelancaran jalannya Konferensi Asia Afrika dari tanggal 18 – 24 April 1955 di Bandung itu, tidak dapat dilepaskan dari adanya rasa saling pengertian di antara peserta akan satu tujuan dan maksud yang sama sesuai dengan empat (4) pokok tujuan dan maksud seperti telah dikemukakan dalam Konferensi Bogor dan tidak dapat dilepaskan juga dari segala persiapan yang dilakukan untuk mendukung ataupun menjamin sebaik mungkin kelancaran jalannya Konferensi Asia Afrika.

Konferensi Asia Afrika I yang diselenggarakan pada tanggal 18 – 24 April 1955 di Bandung telah menghasilkan suatu hasil umum yang nyata berupa Konsensus Bersama, yakni Komunike Akhir Konferensi Asia Afrika yang terdiri dari enam (6) Bab yaitu : A. Kerjasama Ekonomi, B. Kerjasama Kebudayaan, C. Hak-hak Asasi Manusia dan Hak Menentukan Nasib Sendiri, D. Masalah Rakyat Jajahan, E. Masalah-masalah lain, dan F. Deklarasi tentang Memajukan Perdamaian Dunia dan Kerjasama Internasional.

Hasil nyata Konferensi Asia Afrika itu membuktikan adanya rasa saling pengertian dan hidup berdampingan secara damai di antara negara-negara Asia Afrika untuk membantu usaha menciptakan perdamaian dunia dengan membuka jalan kerjasama yang erat dalam lapangan Politik, ekonomi, maupun

kebudayaan. Selain itu, hasil nyata yang dilahirkan oleh Konferensi Asia Afrika I di Bandung merupakan jawaban terhadap masalah-masalah bangsa Asia dan Afrika sendiri maupun menggugah pikiran dunia yang lebih maju untuk kemerdekaan dan mengadakan tekanan-tekanan terhadap kekuasaan Kolonial, serta telah membuka mata dunia Barat yang selalu menganggap rendah dan remeh dunia Asia Afrika. Dengan kata lain, tepatlah jika hasil Konferensi Asia Afrika yang dituangkan dalam komunique akhirnya itu menjadi pedoman untuk membina perdamaian dan kerjasama bangsa-bangsa Asia Afrika maupun dunia.

B. Saran

Setelah penulis memahami Konferensi Asia Afrika I 18 – 24 April 1955 di Bandung (Suatu Tinjauan Historis Politik Luar Negeri Republik Indonesia) melalui kajian skripsi ini, maka penulis berkeinginan menyampaikan beberapa saran, yaitu :

1. Bagi generasi muda bangsa Indonesia agar menjunjung tinggi serta menjiwai semangat Bandung dalam langkah-langkah kehidupannya yang positif, misalnya : selalu mengedepankan toleransi, mengedepankan perdamaian dalam mengatasi persoalan dan pro-perdamaian dimanapun dirinya berada.

2. Bagi calon pendidik ataupun pendidik yang profesional harus dapat mencerminkan jiwa semangat Bandung dalam kehidupannya, serta harus dapat menanamkannya kepada semua siswa-siswanya.
3. Bagi Pemerintah Republik Indonesia harus dapat menerapkan dan mengamalkan jiwa semangat Bandung dalam menghadapi persoalan-persoalan dalam ataupun luar negerinya demi terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran bangsa dan negaranya.
4. Bagi negara-negara peserta Konferensi Asia Afrika agar tetap menghidupkan semangat solidaritas Asia Afrika sepanjang jaman dan berusaha merealisasikan konsensus bersama yang telah mereka sepakati dalam Konferensi Asia Afrika demi kemakmuran serta kesejahteraan Asia Afrika.
5. Bagi masyarakat dunia Internasional agar jiwa semangat Bandung dengan Dasasilanya tetap dijadikan pedoman bersama untuk pemeliharaan dan peningkatan perdamaian serta keamanan Internasional demi terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran semua.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Sastroamidjojo.
1974 : *Tonggak-Tonggak Di Perjalananku*. PT Kinta, Jakarta.
- A. W. Widjaja.
1986 : *Indonesia Non Blok Politik Bebas Aktif*. PT Bina Aksara, Jakarta.
- Ali Murtopo.
1979 : *Tri Windu Konferensi Asia Afrika 1955 - 1979*. Yayasan Idayu, Jakarta.
- Departemen Luar Negeri RI.
1955 : *Hasil-hasil Konferensi Colombo_Bogor_Asia Afrika Bandung*. Jakarta.
- Departemen Penerangan RI.
1980 : *Seperempat Abad Konferensi Asia Afrika*. Jakarta.
- Djawatan Kepolisian Negara Bagian D.P.K.N.
1955 : *Risalah Konferensi Asia Afrika di Bandung*. Jakarta.
- Didi Krisna.
1993 : *Kamus Politik Internasional*. Gramedia, Jakarta.
- Dahlan Nasution.
1984 : *Perang atau Damai dalam Wawasam Politik Internasional*. Remadja Karya CV Bandung, Bandung.
- Gottschalk, Louis.
1975 : *Mengerti Sejarah*. UI Press, Jakarta.
- Heuken SJ, A. dkk.
1983 : *Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila Jilid I*. Yayasan Ciptaloka Caraka, Jakarta.
- Hariyono.
1995 : *Mempelajari Sejarah Secara Efektif*. Pustaka Jaya, Jakarta.
- Kementrian Penerangan RI.
1955 : *Keterangan Pemerintah Tentang Konferensi Asia Afrika di Bandung*. Yayasan Idayu, Jakarta.

-
- 1955 : *Konferensi Asia Afrika di Bandung*. Jakarta.
-
- 1955 : *Berita Konferensi Asia Afrika No. 2*. Jakarta.
-
- 1955 : *Himpunan Dokumen Konferensi Asia Afrika*. Jakarta.
-
- 1955 : *Komunike Akhir Konferensi Asia Afrika*. Jakarta.
- Kirdi Dipoyudo.
1982 : *Afrika Dalam Pergolakkan*. CSIS, Jakarta.
- Leifer, Michael.
1986 : *Politik Luar Negeri Indonesia*. PT Gramedia, Jakarta.
- Loekito Santoso.
1986 : *Orde Perdamaian Memecahkan Masalah Perang (Penjelajahan Polemologik)*. UI Press, Jakarta.
- Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto.
1993 : *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Maribun.
1996 : *Kamus Politik*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Mohammad Sabir.
1987 : *Politik Bebas Aktif Tantangan dan Kesempatan*. CV Haji Masagung, Jakarta.
- Mohammad Hatta.
1953 : *Dasar Politik Luar Negeri Republik Indonesia*. Tinta Mas, Jakarta.
-
- 1988 : *Mendayung Antara Dua Karang*. Bulan Bintang, Jakarta.
- Mochtar Kusumaadmadja.
1983 : *Politik Luar Negeri dan Pelaksanaannya Dewasa Ini*. Alumni, Bandung.
- Pius Partanto.
1994 : *Kamus Politik Internasional*. Arkola, Surabaya.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Roeslan Abdulgani.

1977 : *Sejarah Cita-cita dan Pengaruhnya Konferensi Asia Afrika Bandung*. Idayu Press, Jakarta.

1987 : *Indonesia Menatap Masa Depan (Kumpulan Karangan)*. PT Pustaka Merdeka, Jakarta.

1980 : *The Bandung Connection; Konferensi Asia Afrika di Bandung Tahun 1955*. Gunung Agung, Jakarta.

Roy, S.L.

1995 : *Diploma Manajemen*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ricklefs, M.C.

2001 : *Sejarah Indonesia Modern 1200 – 2004*. PT Serambi Ilmu Semesta, Jakarta.

Scalapino, Robert A., Seizaburo Sato.

1990 : *Masalah Keamanan Asia*. CSIS, Jakarta.

Sufri Yusuf.

1989 : *Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri*. Sinar Harapan, Jakarta.



Lampiran **PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI**

Gambar lima (5) Perdana Menteri Sponsor Konferensi Asia Afrika



P.M. Sir John Kotelawala
dari Srilanka



P.M. Mohammad Ali
dari Pakistan

P.M. Ali Sastroamidjojo
dari Indonesia



P.M. Pandit Jawaharlal Nehru
Dari India

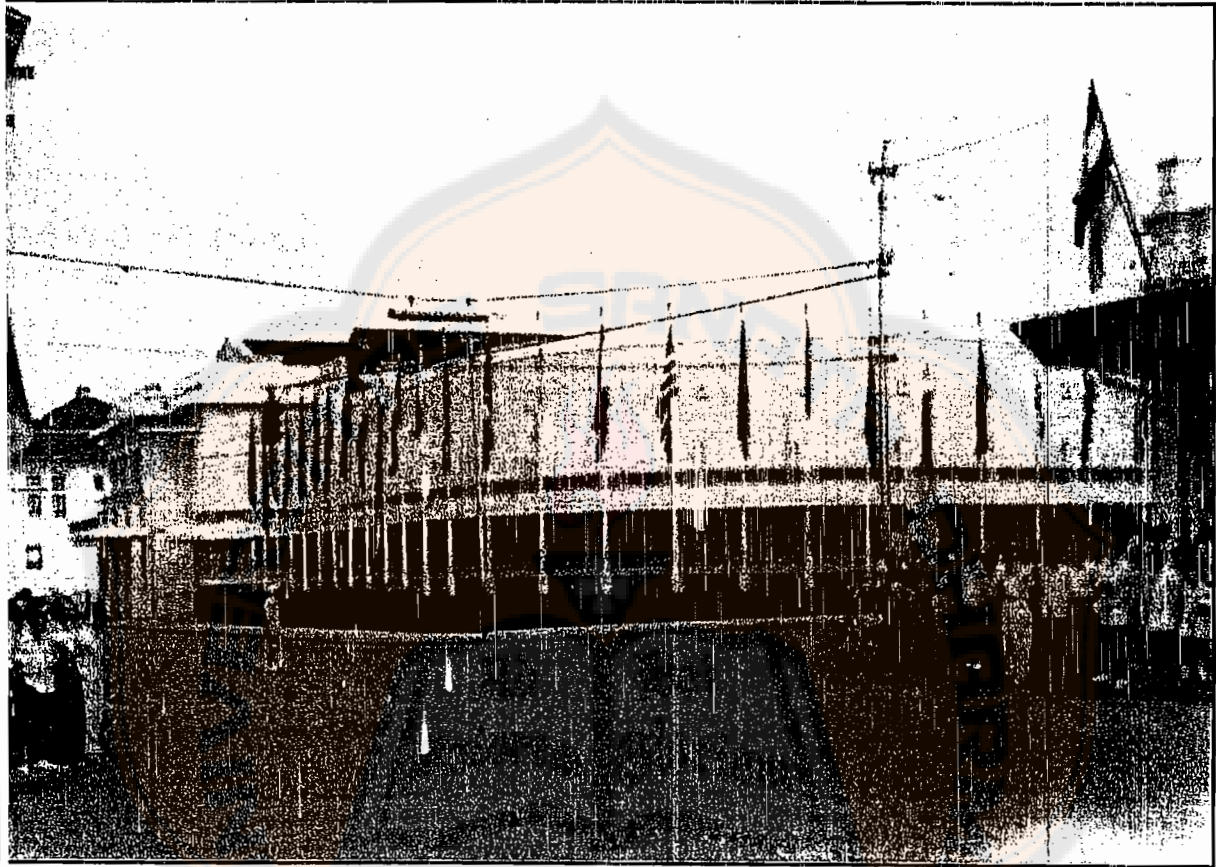


P.M. U Nu
dari Burma

Sumber : Kementrian Penerangan RI.
1955 : *Himpunan Dokumen KAA*. Jakarta.

Lampiran : 2

Gambar Gedung tempat Berlangsungnya Konferensi Asia Afrika



Gedung Merdeka Bandung

Gedung ini merupakan tempat berlangsungnya sidang pembukaan Konferensi Asia Afrika, tempat sidang pleno bersifat terbuka, dan tempat sidang penutupan Konferensi Asia Afrika.

Sumber : Kementrian Penerangan RI.

1955 : Himpunan Dokumen KAA. Jakarta.



Gedung Dwi Warna

*Gedung ini digunakan sebagai tempat sidang pleno tertutup Panitia Politik,
Panitia Ekonomi, dan Panitia Kebudayaan.*

Sumber : Kementrian Penerangan RI.

1955 : Himpunan Dokumen KAA. Jakarta.



Foto Penulis : *Foto Gedung Merdeka tampak dari depan.*

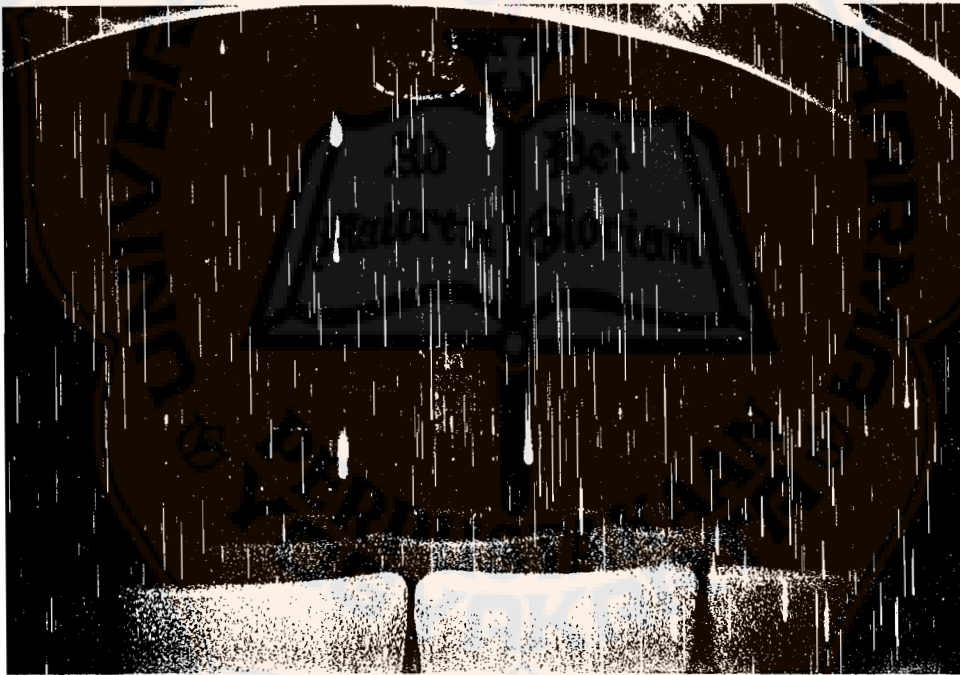


Foto Penulis : *Foto Ruang Gedung Merdeka yang digunakan sebagai tempat sidang pembukaan Konferensi Asia Afrika, tempat sidang pleno terbuka, dan tempat sidang penutupan Konferensi Asia Afrika.*

Lampiran : 3

**DAFTAR NAMA DAN FOTO
KETUA DELEGASI NEGARA PESERTA**

NAMA NEGARA

NAMA KETUA DELEGASI

1. Afghanistan	Sardar Mohammad Naim
2. Birma (Myanmar)	U Nu
3. Kamboja	Norodom Sihanouk
4. Srilanka	Sir John Kotelawala
5. Republik Rakyat Tiongkok (China)	Chou En-Lai
6. Mesir	Gamal Abdel Nasser
7. Ethiopia	Yilma Deressa
8. Pantai Emas (Ghana)	Kojo Botsio
9. India	Jawaharlal Nehru
10. Indonesia	Ali Sastroamidjojo
11. Iran	Ali Amini
12. Irak	Mohammad Fadhil Jamali
13. Jepang	Tatsunosuke Takasaki
14. Yordania	Sayyed Wahid Salah
15. Laos	Katay Don Sasorith
16. Lebanon	Sami Bek Solh
17. Liberia	Momolu Dukuly
18. Libya	Mahmoud Muntasser
19. Nepal	Sovag Jung Thapa
20. Pakistan	Mohammed Ali
21. Filipina	Carlos P. Romulo
22. Saudi Arabia	Emir Faisal Ibn Abdul Azis Al Saud
23. Sudan	Sayed Ismail El Azhari
24. Syria	Khaled El Azm
25. Muang Thai	Wan Waithayakon Krommun Naradhip Bongsprabandh

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| 26. Turki | Fatin Rustu Zorlu |
| 27. Republik Demokrasi Viet-nam | Pham-Van-Dong
(Viet-nam Utara) |
| 28. Viet-nam Selatan | Nguyen Van Thoai |
| 29. Yaman | Emir Seif El Islam
Al Hassan |





**Sardar
Mohammad Naim
Afghanistan**



**U Nu
Birma (Myanmar)**



**Norodom
Sihanouk
Kamboja**



**Sir John
Kotelawala
Srilanka**



**Chou En-Lai
Republik Rakyat
Tiongkok (China)**



**Gamal
Abdel Nasser
(Mesir)**



**Yilma Deressa
Ethiopia**



**Kojo Botsio
Pantai Emas
(Ghana)**



**Jawaharlal Nehru
India**



Ali Sastroamidjojo
Indonesia



Ali Amini
Iran



Mohammad
Fadhil Jamali
Irak



Tatsunosuke
Takasaki
Jepang



Sayyed Wahid
Salah
Yordania



Katay Don
Sasorith
Laos



Sami Bek Solh
Lebanon



Momolu Dukuly
Liberia



Mahmoud
Muntasser
Libya



Sovag Jung Thapa
Nepal



Mohammed Ali
Pakistan



Carlos P. Romulo
Filipina



**Emir Faisal Ibn
Abdul Azis Al
Saud**
Saudi Arabia



**Sayed Ismail El
Azhari**
Sudan



Khaled El Azm
Syria



Wan Waithayakon
Krommun Naradhip
Bongsprabandh
Muang Thai



Fatin Rustu Zorlu
Turki



Pham-Van-Dong
Republik
Demokrat
Viet-nam Utara



Nguyen Van
Thoai
Viet-nam Selatan



Emir Self El Islam
Al Hasan
Yaman

Sumber : Kementrian Penerangan RI.

1955 : *Himpunan Dokumen KAA*. Jakarta.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Lampiran : 4

DAFTAR SUSUNAN DELEGASI PESERTA KAA

COMPOSITION OF THE 29 DELEGATIONS ATTENDING THE ASIAN-AFRICAN CONFERENCE AT BANDUNG, 18TH 24TH APRIL, 1955. *)

In compiling the following lists all names have been committed of persons who were clearly guests, secretarial personnel or staff. The total number of persons brought by the Delegations to Bandung exceeded 400.

AFGHANISTAN

- SARDAR MOHAMMAD : Minister for Foreign Affairs,
NAIM Deputy Prime Minister.
- ABDUL MALIK : Brigadier; Acting Minister
ABDURRAHIMZAI for Finance and Acting
Minister for National Economy
- NAJIBULLAH : Ambassador in London
TORVAYANA ABDUL
HADI DAVI : Envoy Extraordinary and
Minister Plenipotentiary to
Indonesia
- MOHAMMAD HASHIM : Chief of Press Department
MAIWANDWAL in the present Cabinet of
Afghanistan
- ABDUL RAHMAN : Director, Section 3rd Po-
PAZHWAQ litical Department and Ac-
ting Director United Na-
tions Section; Ministry of
Foreign Affairs
- MOHAMMED : Director, Section of Banks,
GHOUSALIZO Ministry of Finance
- ABDUL WAHAB : Director General, Central
Supplies
- HABIB ULLAH THARIN : Legation First Secretary,
Jakarta

BURMA

- U NU : Prime Minister
- DUWA ZAU LAWN : Minister for State Kachin
- U ZAHRE LIAN : Minister for Chin Affairs
- U RAESCHID : Minister for Trade Devel-
opment and Labour
- U TUN WIN : Minister for Information
- MAHA THRAY SITHU : Ambassador in Washington
JAMES BARRINGTON
- THADO THIRI : Ambassador to China
THUDHAMMA U HLA
MAUNG
- MYINT THEIN : Judge, Supreme Court of
Burma
- U MYA SEIN : Charge d'Affairs in Jakarta

U OHN SEIN

U TUN SEIN

HUANG HUA

TA PU-SENG

EGYPT

- GAMAL ABDEL : Prime Minister; President
NASSER of the Council of Ministers;
President of the Revolu-
tionary Command Council
- SALAHEDDIN : Minister for National Guid-
MOUSTAFA SALEM ance; Minister of State for
Sudan Affairs; Member of
the Council of Revolution
- MAHMOUD FAWZY : Minister for Foreign Affairs
- EL SHEIKH AHMAD : Minister for Wakaf Affairs
ELBAKOURY
- MOHAMED ABDEL : Ambassador, Secretary
KHALIK HASSOUNA General of the Arab League
- MOHAMMED ABU : Deputy Minister for Com-
NOSSEIR merce and Industry
- ALI AL AMROUSI : Envoy Extraordinary and
Minister Plenipotentiary to
Indonesia
- MOSTAFA KAMEL : Professor, Cairo University
- ALI SABRI : Director, Prime Minister's
Cabinet
- ABDALLAH EL-ERIAN : Lecturer, Cairo University
- ETHIOPIA
- YILMA DERESSA : Chairman of Ethiopia's
Delegation to the U.N.
- BLATTA DAWIT : Vice-Minister in the Minis-
OGBAZZY try of Foreign Affairs
- GABRE HEYWOT : Permanent Representative
ZWADE of Ethiopia to the UN.
with rank of Ambassador

*) Daftar Susunan Delegasi Peserta KAA ini dikutip dari Buku Asia Afrika speaks from Bandung (The Ministry of Foreign Affairs, Jakarta 1955) yang memuat keterangan jabatan dan penjelasan lainnya dalam bahasa Inggris.

ENDALKACHEW MAKONNEN	: Director General at the Ministry of Foreign Affairs (in charge of Middle Eastern and Western Affairs)	CHINA	
MIKAEL IMRU	: Director-General of Communications and Civil Aviation	CHOU EN-LAI	: Prime Minister and Foreign Minister
KETEMA YIFRU	: Director-General at the Ministry of Foreign Affairs	CHEN YI	: Vice Prime Minister
GOLD COAST		YEH CHI-CHUANG	: Minister for Foreign Trade
KOJO BOTSIO	: Minister of State; Member of the Legislative Assembly	CHANG HAN-FU	: Vice Minister for Foreign Affairs
MIGUEL FRANCIS DELANANG	: Secretary to the Ministry of Recruitment and Training	HUANG CHEN	: Ambassador to Indonesia
JAMES GILBERT MARKHAM	: Joint Secretary, Asian Socialist Conference, 1954	LIAO CHENG-CHIH	: Vice-Chairman of the Commission of Overseas Chinese Affairs
TUN THIN	: Director of Central Statistical and Economic Departments	YANG CHI-CHING	: Vice-Minister for Public Security
U AYE HLAING	: Lecturer in Economics at the University of Rangoon	CHIAO KUAN-HUA	: Assistant to the Minister for Foreign Affairs
		CHEN CHIA-KANG	: Assistant to the Minister for Foreign Affairs; Director of the 1st Department of Asian Affairs of the Ministry of Foreign Affairs
		INDIA	
CAMBODIA		JAWAHARLAL NEHRU	: Prime Minister
NORODOM SIHANOUK	: Ex-King of Cambodia	SYED MAHMUD	: Minister for External Affairs
NORODOM MONTANA	: Minister for National Education	V.K. KRISHNA MENON	: Head of the Permanent Delegation to the U.N.O.
PENN-NOUTH	: Member of the Royal Supreme Council	SUBMAL DUTT	: Commonwealth Secretary
SON SANN	: Governor of the National Bank	BADRUDDIN FAIZ	: Ambassador to Indonesia
PRAK SARINN	: Under-Secretary of State for Foreign Affairs	HASAN BADRUDDIN TYABJI	
MAU SAY	: Secretary General of the Royal Supreme Council	C.S. JHA	: Joint Secretary, of the Ministry of External Affairs
DHAMAVARA	: Counsellor	B. K. NEHRU	: Joint Secretary, Ministry of Finance
		K. B. LALL	: Joint Secretary, Ministry of Commerce and Industry
CEYLON		T. J. NATARAJAN	: Deputy Secretary, Ministry of External Affairs
SIR JOHN KOTELAWALA	: Prime Minister	A. J. KIDWAI	: Deputy Secretary, Ministry of External Affairs
MANIKASOTHY SARAVANAMUTTU	: Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary to Indonesia and Commissioner to Singapore and Malaysia	V. R. BHATT	: Public Relations Officer
		VAIDYANATHAN	: Commercial Secretary
		P. S. KANWAL	: Administrative Officer
		INDONESIA	
E.B. WIKRAMANAJAKE	: Minister for Justice	ALI SASTROAMIDJOJO	: Prime Minister
GUNASENA DE SOYZA	: Permanent Secretary, Ministry of Defence and External Affairs	SUNARIO	: Minister for Foreign Affairs
RAJENDRA COOMARASWAMY	: Assistant Secretary, Ministry of Finance	MUHAMAD YAMIN	: Minister for Education and Culture
C.E.L. WICKREME- SINGHE	: Specialist in Foreign Affairs; Publisher in Ceylon	ROOSSENSO	: Minister for Economic Affairs
N.J.L. JANSZ	: Assistant Secretary, Ministry of Defence and External Affairs	SURJOHADIKUSUMO	
		P.L. TOBING	: Minister for Information
		K. H. MASKUR	: Minister for Religion
		ROESLAN ABDULGANI	: Secretary-General of the Ministry of Foreign Affairs

ACHMAD SUBARDJO	: General Adviser to the Minister for Foreign Affairs	I R A N	
SUJONO HADINOTO	: Adviser to the Minister for Foreign Affairs	ALI AMINI	: Minister for Finance
ABU HANIFAH	: Adviser to the Minister for Foreign Affairs	DJALAL ABDOH	: Permanent Representative to the U.N.
NAZIR DATUK PAMONTJAK	: Head of Division for European and African Affairs, Ministry of Foreign Affairs	MOHAMMAD GHAVAM	: Chief, Fifth Political Department of the Ministry of Foreign Affairs
SUKARDJO WIRJOPRANOTO	: Head of Division for Asian and Pacific Affairs, Ministry of Foreign Affairs	ALI FOTOUHI	: Chief, Economic Department
UTOJO RAMELAN	: Head of Division for Economic and Legal Affairs, Ministry of Foreign Affairs	FERENDOUNE ADAMIYAT	: Chief, United Nations Department
DJUANDA	: Head of the State Planning Bureau	MADJID RAHNEMA	: Deputy Chief, U.N. Department, Ministry of Foreign Affairs
LAMBERTUS NICODEMUS PALAR	: Ambassador to India	EMIR ASLAN AFSHAR	: Member U.N. Department, Ministry of Foreign Affairs
SUDJARWO TJONDRONEGORO	: Head of the Permanent Delegation to the United Nations	DHANGUIR TAFAZZOLI	: Member of Parliament
ABDULKADIR I. A. MUIS	: Ambassador to Egypt; Member of Parliament, Head of Foreign Affairs Section	I R A Q	
SANUSI HARDJADINATA	: Governor, Province of West Java	MOHAMMAD FADHIL JAMALI	: Member of Parliament
SUGIARTO	: Treasurer-General	ABDUL MAJIB ABBAS	: Expert in International Relations
LUKMAN HAKIM	: Director, Bank Indonesia	ABDUL MUTTALIB AMIN AL-HASHIMI	: Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary to Indonesia
R.A. ASMAUN	: Director-General, Economic Relations Division, Ministry of Economic Affairs	ABDUL HAMID KHADIM	: Minister for Education 1954
KASLAN A. TOHIR	: Functionary, Ministry of Agriculture	FAISAL DAMLUJI	: Head of the Commercial Section in the Ministry of Foreign Affairs
S. DIAPARI	: Head, Administrative and Executive Council, Irian Bureau	HASHIM HILLI	: Head of the Political Department of the Ministry of Foreign Affairs, Public Information Division
MRS PUDJOBUNTORO	: Member, Administrative and Executive Council, Irian Bureau	RASHID RAOUF	: Assistant Director, Political Department Ministry of Foreign Affairs
MRS MARIA ULFAH SANTOSO	: Secretary, Prime Minister's Cabinet	J A P A N	
ABDULMUTHALIB	: Functionary, Ministry of Communications	TATSUNOSUKE TAKASAKI	: Minister of State; Director General of the Economic Council Board; Chief of the Economic Deliberation Committee
S. MANGUNSARKORO	: Head of Deliberative Council for National Culture	MASAYUKI TANI	: Adviser to the Minister for Foreign Affairs, Ambassador
S. TEDJASUKMANA	: Head of Indonesian Chamber of Commerce	TOSHIKAZU KASE	: Special Assistant to the Minister for Foreign Affairs; Ambassador
SUDJATMOKO	: Director, Pembangunan Ltd.	SABURO OHTA	: Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to the Union of Burma
SUTARTO HADISUDIBJO	: Member of Parliament, Education and Culture Section	KOICHIRO ASAKAI	: Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary
S.H. TAJIBNAPIS	: Acting Head, Directorate III, Ministry of Foreign Affairs		

ELJI WAJIMA	: Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary	KARIM AZKOUL	: Director, Department U.N. Affairs & International Conference
HIROKICHI NADAO	: Member, House of Representatives (Liberal Party)		
GISABURO TAKATA	: Vice-Director of Ishihara Sangyo Co. Ltd.	LIBERIA	
ETSUJIRO UYEHARA	: Member, House of Representatives (Democratic Party)	MOMOLU DUKULY	: Acting Secretary of State
TADATAKA SATA	: Member, House of Representatives (Social Democratic Party)	HENRY F. COOPER	: Ambassador to Great Britain and Northern Ireland
EKI SONE	: Member, House of Councillors (Social Democratic Party)	CHRISTIAN ABAYOMI CASSELL	: Attorney General
SHIGEYOSHI KAJIWARA	: Member, House of Councillors (Independents Party)	CHARLES DUNBAR SHERMAN	: Economic Adviser
AIICHIRO FUJIYAMA	: President of Asia Kyokai (The Society for Economic Co-operation in Asia)	JOSEPH RUDOLPH GRIMES	: Counsellor, Department of State
		JOSEPH S. OLIVER COLEMAN	: First Secretary, Washington
		JAMES B. DENNIS	: Under Secretary of the Treasury
		CHARLES DUNBAR BURGEES KING	: President of Republic of Liberia, 1920-1930
JORDAN			
SAYYED WAHID SALAH	: Minister for Foreign Affairs	LIBYA	
HUZA EL MAJALI	: Minister of Justice	MAHMOUD MUNTASSER	: Ambassador in London
AZMI NASHASHIBI	: Adviser	SULEIMAN EL JERBI	: Under-Secretary for Foreign Affairs
LAOS		AHMED F. BEN SAOUD	: Head of Press and Information Department, Ministry of Foreign Affairs
KATAY DON SASORITH	: Prime Minister	ABDURRAZAK OMAR MISSALATI	: Head of Department, Ministry of National Economy
PHOU SANANIKONE	: Deputy Prime Minister and Minister for Foreign Affairs		
PHAGNA NITH SINGHARAJ	: Representative to the State of Viet-Nam	NEPAL	
PHOUVONG PHIMMASONE	: Secretary General of the Prime Minister's Office	SOVAG JUNG THAPA	: Foreign Secretary
THAO LANE	: Chief of Foreign Affairs Section Ministry of Foreign Affairs	RAMA PRASAD MANANDHAR	: Secretary, Education, Health, & Local Self-Government
TIAO SOUVANNARATH	: Member of the King's Council	YADU NATH KHANAL	: Head of Department of English at Tri-Chandra College
HOUMPHENG BODHIVARN	: Member of the Second Chamber of Laos	NARESHMAN SINGH	: Member, Council of Asian Relations
THAO LEUM	: Embassy First Secretary, Bangkok	PADMA BAHADUR	: Director of Military Training in the Army H.Q.
LIBANON		PAKISTAN	
SAMI BEK SOLH	: Prime Minister	MOHAMMED ALI	: Prime Minister
ALFRED NACCACHE	: Minister for Foreign Affairs	N. A. M. RAZA	: Ambassador to Iran
CHARLES HABIB MALIK	: Ambassador to the U.S.A	CHAUDHRI KHALIQUZZAMAN	: Ambassador to Indonesia
HALIM ABU IZZEDDIN	: Director General of the Ministry of Information	JALALUDDIN ABDUR RAHIM	: Secretary of the Ministry of Foreign Affairs & Commonwealth Relations
		AZIZ AHMED	: Secretary to the Cabinet
		S. M. SHARIF	: Educational Adviser

- AGHA SHAHI** : Deputy Secretary, Ministry of Foreign Affairs & Commonwealth Relations
- A. RASHID IBRAHIM** : Deputy Secretary, Ministry of Economic Affairs
- SYED TAYYEB HUSAIN** : Deputy Secretary, Ministry of Information and Broadcasting
- FARHAT ALI** : Officer on Special Duty, Ministry of Foreign Affairs & Commonwealth Relations
- HABIB IBRAHIM RAHIMTOOLA** : Minister for Commerce
- PHILIPPINES**
- CARLOS P ROMULO** : Special and Personal Envoy of the President of the Philippines to the U.S.A. with the rank of Ambassador.
- EMMANUEL PELAEZ** : Member of the Senate
- DOMOCALO ALONTO** : Member of House Representatives and Under-Secretary of Foreign Affairs
- RAUL S. MANGLAPUS** : Under-Secretary of Foreign Affairs
- JOSE FUENTEBELLA** : Ambassador to Indonesia
- ROMEO S BUSUEGO** : Chief, Division of Coordination and Review, Department of Foreign Affairs
- TIBUCIO C. BAJA** : First Secretary and Consul in Jakarta
- NICANOR T. JIMENEZ** : Chief, Public Affairs Armed Forces
- ERNESTO F. SANTOS** : Senior Armed Forces Attache, at Jakarta
- MARIO P. MARCOS** : Senior Economic, Central Bank of the Philippines, Manila
- DIOSDADO MACAPAGAL** : Member of House of Representatives
- SAUDI ARABIA**
- EMIR FAISAL IBN ABDUL AZIZ AL SAUD** : President of the Council of Ministers; Minister for Foreign Affairs
- MIDHAT SHAIKH AL ARD** : Minister of State
- ALI A ALIREZA** : Minister of State
- SAYED HASSAN FAQI** : Minister Plenipotentiary and Envoy Extraordinary to Indonesia
- FUAD NAZIR** : Functionary, Ministry of Foreign Affairs
- FUAD HUSSAINI** : Functionary, Ministry of Foreign Affairs
- OMAR HALIQ** : Alternative Representative, Permanent Delegation to U.N.
- SUDAN**
- SAYED ISMAIL EL** : Prime Minister, Minister for Home Affairs, Defence and M.H.R. for Omdurman Northern Constituency
- SAYED MUBARAK ZAROUK** : Minister for Communications; Leader of the House of Representatives
- SAYED HASAN AWADALLA** : Minister for Agriculture
- KHALIFA ABBAS EL OBEID** : Deputy Under-Secretary, External Affairs
- SYRIA**
- KHALED EL AZM** : Minister for Foreign Affairs
- FAKER EL KAZALE** : Minister for National Economics
- MAMOUN EL KUZBARI** : Minister for Justice
- MONAFFAC KOUDZI** : Head of the Minister's Cabinet
- AHMED CHUKEIRI** : Ambassador
- MOHAMMED SALAHEDDINE EL-BITAR** : Member of Parliament
- SALEH AKIL** : Member of Parliament
- ADIB DAOUDY** : Director, Palestine Arab Refugees Institution
- HAISSAM KEILANI** : Counsellor
- THAILAND**
- WAN WATHAYAKON** : Minister for Foreign Affairs
- KROMMUN NARADHIP BONGSPRABANDH** : Under-Secretary of State for Foreign Affairs
- DILOKRIT KRIDAKON** : Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary to Indonesia
- LUANG RATANADB** : Under-Secretary of the Ministry of Culture
- LUANG VICHEN BAEDYAKHOM** : Director-General of U.N. Department
- MANU AMATAYAKUL** : Technical Assistant to the Under-Secretary of State for Finance
- NAI PUEY ENGPACHORN** : Acting Director-General of Asia and Africa Department
- SUWIT WATHANA** : Chief of South and South-East Asia Division, Ministry of Foreign Affairs
- VADHANA ISARABHAKDI** : Chief of South and South-East Asia Division, Ministry of Foreign Affairs

TURKEY

FATIN RUSTU ZORLU : Deputy Prime Minister;
Minister of State

ORHAN ERALP : Director General 2nd Department, Ministry of Foreign Affairs

TURGUT MENEMENCIOGLU : Deputy Permanent Representative to the U.N.

ZEKI KUNERLAP : Director General First Department, Ministry of Foreign Affairs

TALAT BENLER : Deputy Director General Third Department Foreign Office

HAYREDDIN OZANSOY : Attache in Washington D.C.

DEMOCRATIC REPUBLIC OF VIET-NAM

PHAM-VAN-DONG : Deputy Prime Minister;
Minister for Foreign Office

HOANG MINH GIAM : Minister for Information

PHAM NGOC THACH : Vice-Minister for Health

CA-VAN-THINH : Chief of the South-East Asian Department, Ministry of Foreign Affairs

HOANG-VAN-DUC : Member of the Economic Council

PHAN HIEN : Official of Ministry of Foreign Affairs

DANG CHAN LIEU : Official of Ministry of Foreign Affairs

HOANG NGUYEN : Official of Ministry of Foreign Affairs

NGUYEN VAN HONG : Official of Ministry of Foreign Affairs

DUONG GIA THOAI : Official of Ministry of Foreign Affairs

VU VAN MINH : Official of Ministry of Foreign Affairs

TRAN VIET PHUONG : Official of Ministry of Foreign Affairs

TRAN QUANG CO

NGUYEN VAN THUY : Official of Ministry of Foreign Affairs

LU DAT THANH : Official of Ministry of Foreign Affairs

TAN VAN NHO : Official of Ministry of Foreign Affairs

STATE OF VIET-NAM

NGUYEN VAN THOAI : Minister of Planning and Reconstruction

TRINH MINH THE : Lt-General, Armed Forces

VU-QUOC-THONG : President, Council of State

BULU KINH : Lawyer

VU-VAN-MAU : President of the Court of Appeal

TRINH-HOAI-DUC : Assisted in rallying National Government of 1953

NGUYEN HUU CHAU : Official of Ministry of Foreign Affairs

NGUYEN PHUONG THIEP

VO VAN TANH BONZE : Delegate of the Workers Syndicates

TRAN THANH HIEP : President, Students Association

HA VAN AN

YEMEN

EMIR SEIF EL ISLAM : Prime Minister

AL HASSAN

SAYED HASSAN IBRAHIM

SAYED ABDOLLAH ALAWI

AMIN EL-HUSSEINI : Grand Mufti of Jerusalem

SEYYID THARICK CHEHAB EL-HUSEYNI

SEYYID ALI YAHYA EL-HUSEYNI

Sumber : Departemen Penerangan RI.

1980 : *Seperempat Abad Konferensi Asia Afrika. Jakarta.*

Lampiran : 5

Susunan Komite (Sub-Panitia) Sekretariat Bersama

Staf

Burma :

U Tin Maung
U San Myein

Indonesia :

Nugroho
Max Maramis
Iljas Hamzah
Munawir Sjadzali

Ceylon :

Moorthy

Pakistan :

S.M. Hussein

India :

Dr. Appodorai
M. Yunus

Politik

Burma	: U Mya Sein
Ceylon	: M. Saravanamuttu
India	: B. F. H. B. Tyabji
Indonesia	: Sukardjo Wirjopranoto
Pakistan	: Choudri Khaliquzzaman

Ekonomi

Burma	: U Mya Sein
Ceylon	: S. Cruse
India	: P. Vaidyanathan
Indonesia	: Utojo Ramelan
Pakistan	: Dr. S. M. Siddiq

Sosial dan Kebudayaan

Burma	: U Kyawt maung
Ceylon	: Miss Jansze
India	: G. H. Jansen
Indonesia	: -----
Pakistan	: Muh. Sultan

Anggaran Belanja

Burma	: U Kyawt Maung
Ceylon	: M. Saravanamuttu
India	: P. L. Bhandari
Indonesia	: J. P. Pardede
Pakistan	: S. M. Hussein
Pembantu	: Angwar Bani
	Bahroen Noor
	Chalid Fadyl
	A. Diponegoro
	J. H. Massie
	P. Siahnenia
	Sam Surat

Perlengkapan

Burma	: U Kyawt Maung
Ceylon	: Moorthy
India	: P. L. Bhandari
Indonesia	: Dr. J. Ismail
Pakistan	: S. M. Hessein

Press (Pers)

Burma	: U Kyawt Maung
Ceylon	: S. Cruse
India	: Rajendranath Gupta (?)
Indonesia	: Max Maramis
Pakistan	: Syed Rasul Rasa
Pembantu	: W. Latumeten
	A. Kamil

Sumber : Kementrian Penerangan RI.
1955 : Berita Konferensi Asia Afrika No. 2. Jakarta.

Lampiran : 6

Susunan Panitia Interdepartemental di Jakarta dan Panitia Lokal di Bandung

Susunan Panitia Interdepartemental di Jakarta

Ketua	: Roeslan Abdulgani	(Wakil dari Kementrian Luar Negeri)
Anggota	: Mohammad Johannes	(Wakil dari Kementrian Perhubungan)
	Harjoto	(Wakil dari Kementrian Penerangan)
	Oesman Raliby	(Wakil dari Kementrian Penerangan)
	M. S. Mintaredja	(Wakil dari Kementrian Keuangan)
	J. A. H. Ondang	(Wakil dari Kementrian Pekerjaan Umum)
	Dr. C. H. V. de Villeneuve	(Wakil dari Kementrian Perekonomian)
	Sutarman	(Wakil dari Kementrian P.P. dan K)
	D. A. Siregar	(Wakil dari Kementrian Dalam Negeri)
	Let. Kol. Abimanju Umargatab	(Wakil dari Kementrian Pertahanan)
		(Wakil dari Polisi Negara)
Penasehat	: Besar Martokoesoemo	(Wakil dari Kementrian Kehakiman)
	A. Koesoemo Oetojo	(Wakil dari Kementrian Luar Negeri)
	Tarbidin	(-----sda-----)
	Max Maramis	(-----sda-----)
	Iljas Hamzah	(-----sda-----)
	J. P. Pardede	(-----sda-----)
	Alex Marentek	(-----sda-----)
	Soebechi Astrawinata	(-----sda-----)
	T. W. Atkinson	(-----sda-----)
	Abdulwahab	(Wakil dari Kementrian Perhubungan)
	Alimoedin Nasution	(Wakil dari Kementrian Keuangan)
	Kaswadi	(Wakil dari Kementrian Perekonomian)
	Soenardjo	(-----sda-----)

Susunan Panitia Lokal di Bandung

Ketua	: Sanusi Hardjadinata	(Gubernur Jawa Barat)
Sekretaris	: Rd. Djukardi	
Anggota/Seksi	: R. S. Wangsadikoesoemah, P. A. Tambayong	(Akomodasi dan Perlengkapan Makanan)
	Memet Tanumidjaja	(Keamanan)
	Mayor Roesli	(----sda----)
	R. A. Kartadibrata	(Rapat)
	Ir. Irigati Santoso	(Bangunan dan Ruangan)
	Leiwakabessy	(Pos, Telegraf, dan Telephone)
	Sunarko	(Pengangkutan)
	R. Kartasa Wargadiradja	(Protokol)
	R. O. Martakoesoemah	(Hiburan)
	R. A. Hirawan Wargahadibrata	(Pameran)
	Nj. Emma Soemanegara	(Tamu-tamu Wanita)
	H. A. Petrus	(Persediaan Listrik)
	Dr. M. H. A. Patah	(Kesehatan)
	Osa Maliki	(Penerangan)

Sumber : Djawatan Kepolisian Negara Bagian D.P.K.N.

1955 : Risalah Konferensi Asia Afrika di Bandung. Djawatan

Kepolisian Negara Bagian D.P.K.N, Jakarta.

Lampiran : 7

Susunan Panitia Interdepartmental Politik

- Ketua : 1. Mr. Soenarjo, Menteri Luar Negeri
- Anggota : 2. Roeslan Abdulgani, Sekjen Kemlu
3. Mr. Achmad Soebardjo, Pegawai Tinggi pada Kemlu
4. Mr. Soejono Hadinoto, idem
5. Dr. Abu Hanifah, idem
6. Mr. Natzir Datuk Pamuntjak, idem
7. Mr. Utojo Ramelan, idem
8. Soekardjo Wirjopranoto, idem
9. Mr. Tajib Napis, idem
10. Drs. Anwar Chaidir Sani, idem
11. Darsono, idem
12. Ir. Djuanda, Kepala Biro Perancang Negara
13. Ir. Abdulmuthalib, Pegawai Tinggi pada Kem. Perhubungan
14. Dr. C.H.V. de Villeneuve, Pegawai Tinggi pada Kem.
Perekonomian
15. Ir. Kaslan Abdullah Tohir, Pegawai Tinggi pada Kem.
Pertanian
16. Suwastojo, Pegawai Tinggi pada Kem. P.P. dan K.
17. Mr. Mochtar Usman, Pegawai Tinggi pada Kem. Keuangan
18. Mr. Noegroho, Pejabat Perwakilan Luar Negeri Kelas V
19. Soewito, Kepala Penerangan Luar Negeri Kementrian
Penerangan.

Sumber : Djawatan Kepolisian Negara Bagian D.P.K.N.

1955 : Risalah Konferensi Asia Afrika di Bandung. Djawatan

Kepolisian Negara Bagian D.P.K.N, Jakarta.

Lampiran : 8

Gambar Sidang Pembukaan Konferensi Asia Afrika Oleh Presiden Sukarno



Sumber : Kementrian Penerangan RI.

1955 : *Himpunan Dokumen KAA*. Jakarta.

Lampiran : 9

Pidato-pidato Pembukaan Para KETUA DELEGASI

Dibawah ini kami kemukakan sebahagian dari pidato-pidato penting yang telah diucapkan dan keterangan-keterangan tertulis yang disampaikan oleh para ketua delegasi dalam bentuk singkatnya (extract). Pidato-pidato dan keterangan-keterangan tersebut sedikit banyak menggambarkan politik luar negeri masing² serta keinginan maupun harapan yang ditujukan kepada konperensi.

AFGHANISTAN.



SARDAR
MOHAMMAD
NAIM :

..... „Kebanyakan negara yang diwakili disini adalah menderita penjajahan asing dan diperkenalkan dengan keadaan yang langsung atau tidak, memberikan pengaruh kepada mereka.

Pertimbangan kami mengenai ko-eksistensi yang telah menjadi persoalan internasional yang penting, ialah menghendaki didjelmakannya ko-eksistensi itu selcepat mungkin.

Mengenai perekonomian njatah bahwa ada disana suatu hal yang mempengaruhi negara-negara penghasil bahan mentah biar sedikit atau banyak, ialah adanya rintangan bagi mereka untuk mengadakan hubungan dagang diantara sesama mereka.

Tampaknya adalah baik sekali diadakan sematjam studi dalam soal ini yang lebih dapat mempergunakan waktu yang lapang terbanding Konperensi kita tetapi njata djuga kalau diadakan Panitia Ahli tentulah hasilnya djuga tidak akan kita terima dalam Konperensi ini. Pemeriksaannya haruslah menjelenggarakan suatu dasar yang njata untuk memperkembangkan tita-tjita kerdja sama ekonomi antara negara Asia-Afrika.

Dalam hubungan soal ekonomi dari negara-negara yang belum berkembang perekonomiannya, tentang langkah yang akan diambil, perhatian terutama sekali harus diarahkan kepada kepentingan kerdja sama yang erat antara negara-negara Asia-Afrika yang menjadi anggota P.E.B. dalam lapangan perekonomian sebagai yang ditentukan oleh P.E.B.”

CAMBODJA



NORODOM
SIHANOJK

..... Kami tak berpendapat, bahwa Konperensi ini adalah suatu merupakan suatu pengadilan. Kita-tjita dan aspirasi kami sudah diketahu. Tapi apa yang seharusnya menjadi karakter dari Konperensi kita ini ialah :

Pertama-tama meletakkan dalam bentuk yang njata rasa setia-kawan bangsa-bangsa Asia dan Afrika dalam keinginan bersama terhadap kemerdekaan, persamaan, perdamaian dan kemakmuran.

Dia melenjapkan perbatasan yang memisahkan antara dua dunia : pihak komunis dan non komunis. Dalam hubungan ini, Konperensi kita merupakan satu kelanjutan dari suatu Afro-Asia yang ada dalam Sidang P.B.B. dan memberikan suatu kesempatan untuk menjatakan penjesalan, bahwa P.B.B. belum membukakan pintunya bagi beberapa negara yang sebenarnya njata-njata telah memenuhi syarat-syarat kemerdekaan dan ketjakaan yang diperlukan untuk menjadi anggota.

Dia mempunyai kesanggupan untuk menjumbangkan pertimbangannya kearah perdamaian dunia dan kerdjasama dengan memajukan kepada seluruh dunia dua tjita-tjita yang adalah merupakan tanda yang typis sekali bagi kemanusiaan, yaitu : memberikan kemerdekaan bagi seluruh umat manusia didunia, dan dengan demikian perdamaian dunia akan menjelma sebagai akibat yang sewadarnya dari tjita-tjita yang pertama.

Da ingin menegaskan tentang arti perdamaian ini, dianganlah kita memikirkan persoalan-bukan atom — dan ini tepat karena negara bukanlah negara-negara yang menguasai

kekuatan atom —, dimana tjara-tjara kita untuk menjapainya mempunyai keistimewaan, sebagai hasil dari persatuan yang belum pernah terjdjadi dalam sedjarah negara-negara kita; dan saja mengutjapkan terima kasih bagi politik kita yang didasarkan atas persamaan pembagian hak, kemerdekaan dan persamaan derajat, tidak tjampur tangan dalam urusan intern negara lain serta prinsip-prinsip ko-eksistensi dan yang akan dapat dilaksanakan dengan melenjapkan perbedaan-perbedaan rasial dan politik yang menda-tangkan keruntuhan dan terutama dan ketabahan perjuangannya yang dilantjarkan dengan tjara kasih sayang dan damai.

Ada djalan lain yang kami dari Cambodja ingin menjumbangkannya kepada Konperensi ini dan hal ini adalah merupakan hasil dari keadaan yang ada sekarang, yang dapat dipergunakan untuk menjadi pertjobaan bagi kepraktisan dan kemungkinan tertjapainya apa yang ditudju oleh Konperensi ini.

Negara Cambodja merasa bangga karena telah memiliki kemerdekaan penuh yang ditjapainya dengan perjuangan sendiri sebelum diadakannya Konperensi Djenewa dan bangga pula terhadap pada persatuannya dan ketabahan perjuangannya yang dilantjarkan dengan tjara kasih sayang dan damai.

Saja merasa bangga dapat mempunyai kesempatan memimpin rakyat saja dalam perjuangan kemerdekaannya dan memiliki ketabahan, sesudah Konperensi Djenewa, untuk mengemukakan politik nasional kami menudju Pancha Shila, menudju kepada kesatuan bangsa-bangsa yang netral antara lain termasuk India dan Burma.

Cambodja yang merdeka dan netral sekarang berada, dipersimpangan djalan antara dua kebudayaan, dua ras bangsa dan dua politik dunia yang semuanya itu merupakan test dan tjobaan bagi prinsip Pancha Shila.

Negara saja telah menerima prinsip itu, dan ingin melaksanakannya dengan sepenuh-penuhnya. Dia hanya mengharapkan perlakuan timbal balik yang serupa. Dia mengharapkan agar kemerdekaan, keutuhan, keamanan, tradisi dan idee politiknya terantjiam.

Adalah menjadi kewadajiban bagi negara-negara yang kuat untuk memberikan tjontoh, memberikan bukti dan djaminan kepada negara-negara ketjil, dan hanya akan bertindak apabila perlu untuk melemparkan rintangan ketjurgaan dan kechawatiran.

Perhatikanlah soal ini, Cambodja melalui utjapan saja ini, hendak menjatakan kejakinannya akan bergunanya Konperensi ini dan kepertjajaannya tentang bantuan penting yang diberikannya kepada kemerdekaan, persamaan, kemakmuran dan yang paling penting kepada perdamaian antara semua manusia.

SAILAN.

SIR JOHN
KOTELAWALA:

..... Dalam pekerjaan yang mendesak dan penting ini, dimana kearifan dunia Barat telah gagal, mungkinkah bangsa-bangsa Asia dan Afrika dapat mengarahkan untuk berhasil? Kami berpendapat mungkin. Adakah bangsa-bangsa dibagian dunia ini pada hakekatnya mempunyai sesuatu yang dapat diberikan? Kami berpendapat, mereka mempunyai. Sudah datanglah waktunya untuk memberikannya? Kami berpendapat, sudah. Kalau begitu kami katakan dengan segala kesungguhan dan kerendahan hati, bahwa rakyat dari bagian dunia ini mempunyai kemampuan yang dapat dipergunakan terhadap persoalan-persoalan dunia dewasa ini, dan untuk pertama kali dalam sejarah, bahwa penghargaan yang tradisional terhadap nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kerohanian dan terhadap harga kepribadian manusia, sebagai gambaran yang terpilih dari agama-agama besar mereka.

..... Kita di Asia Afrika mempunyai kepentingan bersama dalam perdamaian dan keinginan bersama untuk menjapainya, walaupun beberapa dari kita berbeda pendapat bagaimana melaksanakannya. Tidak satupun negeri di daerah ini mempunyai senjata nuclear, kebanyakan buruk perlengkapannya. Bila negara-negara besar dari Barat membitjarakan perdamaian, kemungkinan mereka untuk menjapai persetujuan diperlemah oleh kenyataan, bahwa masing-masing saling tjuriga terhadap kekuatannya.

Kita sebaliknya datang kekonperensi ini, lemah dan relatif tidak bersendjata. Kita tidak mempunyai bom thermo nuclear dan lain-lain tetapi sesuatu yang merupakan kekuatan dalam kelemahan kita ialah kemampuan yang diberikan oleh kelemahan kita untuk memajukan diri sebagai perantara dalam pertikaian raksasa-raksasa anti komunis dan komunis.

Saja mendesak atas nama negara-negara yang diwakili disini supaya menawarkan jasa-jasa kita sebagai perantara.

..... Kini, 10 tahun setelah P.B.B. dibentuk, sekutu-sekutu dimasa perang telah petjah menjadi dua pihak yang bermusuhan, dimana mereka sendiri mengantjam perdamaian yang ingin mereka pelihara. Mereka kedua-duanya dipersendjatai dengan sendjata-sendjata pengrusak yang paling mengerikan yang pernah dimiliki oleh manusia dan mereka tampaknya lebih suka untuk mempergunakannya untuk menghancurkan dunia ini daripada memelihara perdamaian. Bukanlah P.B.B. yang telah memelihara perdamaian yang begitu sukar dalam masa puluhan tahun akhir-akhir ini.

Dalam segala penyelesaian-penyelesaian yang besar mengenai politik dunia seperti masalah Korea dan Indo-Tjina, perundingan-perundingannya telah dilakukan diluar rangka P.B.B. Dan Asia dan Afrika baru bolehlah merasa bangga, bahwa sementara bangsa-bangsa Asia Afrika telah turut melakukan peranannya yang tidak dapat dikatakan tidak penting dalam membantu menyelesaikan masalah-masalah itu.

Dalam kini mendekat waktunya untuk meninjau kembali Piagam P.B.B., kita harus melihat kenyataan, bahwa P.B.B. tidak lagi mentjerminkan kenyataan-kenyataan politik dunia sekarang. Apa yang dibutuhkan dan dikehendaki oleh negara-negara Asia-Afrika ialah, bahwa P.B.B. hendaknya disusun kembali, hingga menjadi suatu badan bagi bangsa-bangsa didunia, dimana semua bangsa-bangsa dapat berkumpul atas dasar kebebasan dan persamaan.

REPUBLIK RAKJAT TIONGKOK.



CHOU EN LAI:

..... „Kali ini ada pertama kalinya banyak negara-negara Asia Afrika berkumpul bersama untuk mengadakan pertemuan. Didua benua itu hidup lebih dari seperdua penduduk dunia. Bangsa Asia dan Afrika telah menjiptakan kebudayaan purbakala yang gemilang serta banyak memberikan sumbangannya kepada peradaban kemanusiaan. Tetapi semendjak zaman modern

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dia dijatuhkan ke bawah pendjadjahan jang mengekang menghalangi untuk mendapatkan kemajuan. Nasib kita ditangan orang lain. Sebab ini tidak ada djalan lain bagi kita selain bangun menentang pendjadjahan. Karena penderitaan dan tudjuan jang sama, kita lekas saling mengerti dan simpati.

Sekarang Asia dan Afrika berubah dengan radikal. Satu demi satu terlepas dari pendjadjahan. Konperensi kita ini adalah reflex dari perubahan hebat jang bersedjarah itu. Tetapi sebenarnya pendjadjahan disini belum lagi berakhir dan pendjadjahan baru mentjaba untuk menggantikan jang damai. Tidak sedikit penduduk Asia dan Afrika jang masih meringkuk dibawah telapak pendjadjahan asing.

Dalam Konperensi ini kita harus mentjari dasar persamaan antara kita semua dan memendam perbedaan-perbedaan kita. Sebagai dasar persahabatan kita, Konperensi haruslah menerima seluruh keinginan dan kehendak kita bersama. Inilah tujuan tugas kita disini.

Pertama-tama disini saja ingin mengemukakan persoalan perbedaan ideologi dan sistim sosial. Kita harus mengakui adanya perbedaan. Tetapi hal ini tidak menghalangi kita untuk menemukan dasar persatuan. Banyak negara berdeka telah muntjul sesudah perang dunia kedua. Sebagian mereka dipimpin partai komunis dan jang lain oleh partai nasionalis. Tak banyak jang termasuk ke golongan pertama. Tetapi japa jang tidak disenangi oleh sebagian orang jang adanya kenjataan jang 600 djuta djiwa Tiongkok memilih sistim sosialis serta dipimpin oleh partai komunis dan rakyat Tiongkok tak bisa lama didjadjah pendjadjah.

Adakah satu alasan jang dapat menjadikan kita tidak saling mengerti dan menghormati, atau membantu dan simpati satu dengan jang lain? Jang ada ialah alasan-alasan jang tiukup untuk menjadikan lima prinsip sebagai dasar dari usaha untuk mendjelmakan kerdjasama jiljara persaudaraan dan hubungan tetangga jang baik sesama kita. Kita semuanya adalah bangsa jang masih terbelakang perekonomiannya.

Kedua, saja hendak memperbincangkan persoalan kemerdekaan kepertjajaan agama. Kemerdekaan beragama adalah sesuatu jang diakui oleh semua negara modern. Kami kaum komunis ialah atheis, tetapi kami menghormati seluruh agama jang mempertjajai sesuatu agama. Kami mengharap pula mereka jang beragama akan menghormati pendirian kami jang tidak beragama ini. Tiongkok adalah suatu negara dimana kemerdekaan beragama dilcmati.

Kenapakah tidak akan mungkin dalam masa-jat kesatuan bangsa Asia dan Afrika adanya persatuan antara mereka jang beragama dan jang tidak beragama? Masa hasut-menghasut tentangan agama haruslah telah lenjap, sebab tak ada keuntungannya.

Ketiga, jang ingin saja kemukakan ialah soal dinamakan keaktifan subversi. Paling akhir

bangsa Tionghoa memilih sistim negara dan pemerintah jang sekarang. Menurut pendapat kami revolusi bangsa kami telah berhasil. Kami menentang ikut intervensi negara lain kedalam negeri kami, maka bagaimana akan mungkin bahwa kami akan mentjampuri urusan negara lain?

Soal dwi-kewarganegaraan, kami pemerintah Tiongkok baru bersedia untuk menjelesaikannya dengan negara jang bersangkutan.

Berdasarkan kepada lima prinsip jang telah disebutkan, kami bersedia sekarang untuk mentjiptakan hubungan jang normal dengan seluruh negara Asia-Afrika, dengan seluruh negara dan terutama dengan tetangga-tetangga kami.

Kami tidak mengadakan subversi kenegara tetangga tetapi negara kamilah jang dimasuki subversi Amerika Serikat. Kami mempersilahkan seluruh delegasi jang ada disini untuk mengundjungi Tiongkok bila dikehendakinya. Disana tidak ada tirai bambu.

1.600 djuta penduduk Asia Afrika mengingini berhasilnya Konperensi kita ini. Marilah kita negara Asia dan Afrika bersatu, dan berusaha sekuat-kuatnya agar Konperensi ini berhasil".....

MESIR.



KOL.
GAMAL
ABDEL
NASSER:

..... Setiap kekuasaan-kekuasaan kolonialisme selalu menghalang-halangi setiap pengawasan atas pemerintahannya didaerah-daerah jang belum mempunyai pemerintahan sendiri.

Dengan setahu P.B.B. dan dengan pertolongan dan bantuannya pula, rakyat Palestina diusir dan dikeluarkan dari tanah-airnya, untuk diganti dengan suatu bangsa lain. Belum pernah terdjadi sebelum ini suatu perbuatan perkosaan jang sangat djahat seperti ini.

Tetapi sungguhpun kurang artinja untuk menjadi sjarat bagi perdamaian dunia, tetapi Mesir menghormati terhadap tanggung-djawabnya dan kewadjabannya.

Saja ingin mengingatkan kepada Indonesia yang terutama dilakukan oleh sebagian negara besar. Mempermainkan politik kekerasan dimana negara-negara kecil dipergunakan sebagai alat, haruslah dihentikan kalau hendak mengakhiri ketegangan dunia.

Pendjadjahan harus dilikwidasi, karena mendatangkan kekacauan dan ketidak amanan. Semendjak masa ekspansi kolonialisme persoalan pendjadjahan oleh golongan asing selalu menjadi sebab dari banyak perang.

Kerdja sama yang sangat kita ingini untuk mentjiptakannya disini tidak akan mentjapai hasil yang effectief ketjuali kita penuhi fundamen-
fundamen dibawah ini dengan penuh pertjaja:

Pertama: Tiap-tiap negara mempunyai kewa-
ajiban untuk menghormati kemerdekaan politik dan keutuhan daerah dari tiap-tiap negara lain dan juga untuk membatasi diri dari ikut campur dalam urusan dalam negeri orang lain.

Kedua: Tiap-tiap negara mempunyai hak untuk memilih dengan merdeka sistim politik dan ekonominya.

Melihat kepada tujuan dan maksud serta dasar Konperensi kita ini maka tak dapat diragukan lagi akan mentjapai putusan tentang usul-usul yang njata dan langkah-langkah yang praktis yang dengan sedapat mungkin akan memberi akibat kerdjasama diantara negara-negara kita dalam lapangan kebudayaan, ekonomi dan kemasyarakatan.

bangsa kita dan Afrika mempunyai yang unik yang harus kita kerdjakan. Kita terletak antara dua dunia yang sedang bertentangan. Sesungguhnya, kitalah bangsa yang semendjak dahulu hidup dengan intim dengan seluruh bangsa lain, agama dan ras yang djauh berbeda dengan apa yang ada pada kita, dan kitalah yang selalu berpegang kepada perasaan toleransi sebagai suatu sjarat dari kehidupan nasional.

Toleransi haruslah diterima utuh keseluruhan-nya atau tidak sama sekali. Toleransi tidak dapat diterima separo-separo. Dia harus menjadi dasar dari seluruhnya. Konsekwensinya, ialah bahwa tindakan kita untuk mendamaikan tidak akan mendatangkan hasil apabila kita membatasi diri kita dalam konsepsi yang terbatas. Hanjalah apabila kita memperlihatkan faham yang sedemikian dalam menghadapi persoalan yang dihadapi dunia sekarang ini, kita akan berhasil mentjapai apa yang terpendam djauh dalam lubuk hati kita.

Ethiopia yang telah mempunyai banyak pengalaman dan pengertian dalam sistim keamanan bersama atas dasar yang luas, dan dengan segala kekuatan yang dimilikinya menjokong sistim itu, semendjak dulu dimasa Lembaga Bangsa-Bangsa sampai sekarang, masih tetap pertjaja bahwa hanjalah dengan ketabahan berkata dan bertindak yang lunak dalam menghadapi tanggungjawab untuk memberikan keamanan pada dunia, barulah dunia dapat mengharap-
kan untuk melahirkan zaman baru yang aman dan kerdja sama yang manis dan lunak damai antara manusia dari segenap ras, bangsa dan agama seluruh penjuru dunia.

ETHIOPIA.



YILMA
DERESSA :

PANTAI EMAS.



KOJO
BOTSIO :

..... Saja meminta pernyataan „kolonialisme“ meliputi juga pengertian daerah-daerah trustee. Ethiopia selalu membantu keinginan hendak merdeka tiap-tiap negara dari pendjadjahan atau trustee, umpamanya, terhadap epada daerah-daerah tetangga Ethiopia yang sekarang masih menjadi daerah trustee dari satu negara yang dahulu pernah mendjadjahnya. Dunia pada saat sekarang ini sedang berada pada titik perputaran sedjarah Kita bangsa-

Saja menjampaikan salam persaudaraan dan utjapan selamat dari Perdana Menteri negara saya, Dr. Kwame Nkrumah dan rakyat Gold Coast kepada Tuan-tuan sekalian, pada kesempatan yang mengandung arti ini. Dr. Nkrumah mem-
sankan kepada saya untuk menjatakan kemenj-
salannya, bahwa dia tidak dapat datang setjara

IRAN.



DR. DJALAL
ABDOH:

beribadi untuk menghadiri Konperensi yang bersedjarah ini. Dia mengharapkan semoga Konperensi ini berhasil, benih yang disemaikan di Bandung sini akan menghasilkan buah yang manis untuk perdamaian dan kegembiraan bangsa kita serta dunia seluruhnya. Walaupun dalam masa peralihan kami ke arah kemerdekaan penuh kami belum memegang tanggung-djawab dalam soal-soal luar negeri. Tetapi ketika menerima undangan untuk menghadiri konperensi ini maka kami sangat kuatir bahwa kami tidak akan diwakili dalam konperensi yang melukis sedjarah ini. Semua persoalan yang akan diperbincangkan dalam Konperensi ini adalah merupakan soal-soal yang menarik perhatian kami: kolonialisme dan rasialisme, belum pernah kami berhenti berusaha untuk melenjapkan; perdamaian dunia dan kegembiraan hidup adalah keinginan kami. Tetapi berdasarkan kepada alasan yang telah kami kemukakan tadi, delegasi kami hadir disini hanya merupakan peninjau saja.

Pemerintahan yang dipimpin oleh Dr. Nkrumah menjamin tertjapainya kemerdekaan negara kami dalam masa tahun kedua dari parlemen yang sekarang ini, dan entjana antjar-antjar kemerdekaan sedang disiapkan. Perundingan antara pemerintahan Inggeris dengan kami telah menimbulkan kesan baik dan ramah-tamah pada kedua belah pihak, dan kami mengharapkan akan dapat mengeluarkan pernyataan yang dapat dengan tegas menyatakan apabilakah kemerdekaan penuh akan diserahkan kepada Pemerintah rakyat Gold Coast.

Persoalan yang dihadapkan kepada kami di sini pada saat ini, sesungguhnya memang besar, tengah-tengahnya ada yang sangat membahayakan. Walaupun demikian kami dibekali dengan keinginan untuk terus berjuang, dan kami tidak mau menemui kegagalan. Kegagalan di Gold Coast akan merupakan pukulan yang menjelakakan kepada harapan dan aspirasi berjuta manusia yang tak bernegara di Afrika dan juga terhadap perjuangan kemerdekaan dimanapun didunia.

Semangat baru menggerakkan Afrika untuk bertindak aktif, benua ini bergontjang seperti benua menggeliat bangun tidur, merasa sehat setelah sesudah istirahat yang tjukup. Setelah itu inilah kita bekordja semuanya untuk menjiptakan dunia baru dan gembira dimana kita manusia akan dapat hidup sebagai manusia yang merdeka. Harapan kami, berhasillah konperensi ini dalam menjiptakan dasar-dasar untuk perdamaian, kemadjuan dan kemakmuran dunia. Dengan semangat yang demikian, kami mengharapkan Konperensi berhasil saja.

..... Abad kita ini adalah abad datangnya hak untuk menentukan nasib sendiri bagi bangsa-bangsa dan lenjapnya kolonialisme. Kolonialisme, suatu momok terkutuk dari abad-abad yang baru silam, yaitu pemaksaan pemerintahan asing terhadap bangsa-bangsa yang menjadi mangsanya. Tetapi tidak kurang dari itu, hendaknya ditjatkan dalam ingatan, bahwa sesudah kalahnya kolonialisme a la abad ke 19 itu, kini muntjul serangan-serangan bentuk baru yang ditunjukkan kepada kedaulatan dan kemerdekaan bangsa-bangsa. Dimana pedang dan bedil dianggapnya terlalu berbahaya, bermatjam-matjam sendjara yang tak kelihatan dan bersifat mengabui, ditjoba. Agressor-agressor yang lebih halus pada masa kita ini menemukan djalannya baru untuk menjapai tujuannya, yaitu menemukan KOLONIALISME DALAM BENTUK BARU. Subversi, infiltrasi, intervensi ekonomi atau politik dengan kedok ideologie, semuanya adalah hasil-hasil tambahan yang baru dari kolonialisme yang sedang sokarat itu.

..... Pada waktunya yang sama, kami mengharapkan hendaknya kita selalu menjedari, bahwa penghargaan yang penuh atas prinsip-prinsip P.B.B. akan memberikan lebih banyak manfaat pada konperensi ini dan oleh karenanya adalah sangat penting, bahwa keputusan-keputusan kita ambil dalam rangka prinsip-prinsip P.B.B.

Delegasi Iran akhirnya melahirkan harapannya dengan penuh kesungguhan, bahwa selama permusjawaratan-permusjawaratan yang akan diadakan, negara-negara Asia-Afrika akan membuktikan kepada dunia, bahwa perjuangan melawan kolonialisme dan perjuangan kita untuk melaksanakan tjita-tjita nasional kita sama sekali tidak didasarkan atas perasaan benci terhadap benua lain, atau negara lain, atau bangsa atau kumpulan kekuasaan lain.

Sementara kaum politikus sejara tidak tepat mengira dengan menjalah-tafsirkan tudjuan yang sebenarnya dari konperensi ini dengan mengatakan, bahwa tudjuan konperensi ini ialah ditudju-

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

kan terhadap "orang kulit putih" atau untuk menghukum dunia Barat. Delegasi Iran berkeinginan, bahwa dasar yang mentertawakan atau perasaan-perasaan permusuhan yang semata-mata itu bukan saja bertentangan dengan dasar-dasar yang dibela oleh rakyat kita dalam perjuangan mereka berabad-abad untuk toleransi dan penghargaan terhadap hak-hak bangsa-bangsa lain, tetapi juga bertentangan dengan kepentingan-kepentingan politik kita sendiri. Selain itu kita beranggapan, bahwa dalam dunia yang saling membutuhkan, pandangan semata-mata itu dapat menjadi sama buruknya seperti kolonialisme itu sendiri.

Kita pertjaja, bahwa semua delegasi berpendapat sama, bahwa abad sekarang ini hendaknya merupakan abad yang penuh memberi hasil, dinamis atas dasar yang sama. Ini bukanlah soal blok-blok yang bermusuhan, kuasa-kuasaan atau sikap menjendiri (isolasi).

Dan kalau kita mengharapkan untuk membawa negara-negara yang lebih maju dan lebih berkuasa kepada pengertian yang lebih baik mengenai persoalan-persoalan kita dan mengenai penindasan kembali terhadap politik kolonialisme dan intervensi yang telah lapuk itu, tidak kurang pula kita pastikan untuk membuktikan, bahwa bangsa-bangsa Asia-Afrika, dicuik dari maksud-maksud permusuhan anti-Barat, anti-Amerika atau anti-Eropa, mengharapkan untuk dapat mentjiptakan suasana murni dan kerdjasa-sama yang berguna antara semua benua dan negeri yang telah maju maupun yang masih terbelakang, dunia Barat dan dunia Timur, yang besar dan yang kecil, suatu tanah-air bersama bagi segenap manusia yang diliputi suasana damai, kebebasan, persamaan, toleransi dan saling menghormat.

IRAK.



DR. MOH.
FADHIL
JAMALI :

..... Sepandiang mengenai negeri kami, kami rasa ada tiga kekuasaan Internasional didunia sekarang ini, yang mengganggu per-

damaian dan keseimbangan, serta perlu diurus dengan kenjataan dan kepastian. Pertama ialah yang kita namakan kolonialisme kolot, yang berangsur-angsur telah merapih semendjak akhir Perang Dunia I.

Malanglah, kolonialisme itu masih berbenteng kuat di beberapa bagian didunia ini. Rakyat dari Afrika Utara, termasuk rakyat Tunisia, Algeria dan Maroko, masih dibawah penindasan Perantjis, serta tidak ada pengorbanan setempat dan pendapat dunia agaknya yang dapat mempengaruhi Perantjis untuk bertindak lebih tepat dalam mengakui hak-hak rakyat untuk kemerdekaan dan kebebasan.

Tjontoh yang khusus dari politik kolonial yang kolot itu telah terd'adi di Afrika Selatan, dimana prasangka tentang kulit berwarna dan rasa keutamaan dari bangsa kulit putih telah membawa kepada membeda-bedakan terhadap bangsa India dan bangsa asli, serta kepada perasingan dari yang disebut bangsa berwarna.

Kekuatan kedua yang mengganggu dunia adalah Zionisme. Zionisme adalah babak terakhir dari buku kolonialisme tua. Ia adalah babak yang paling hitam dan gelap dalam sejarah kemanusiaan. Ia adalah hasil yang paling djelek dari imperialisme, karena imperialisme seperti yang dipraktekkan hingga kini, meliputi pendudukan, perpetjahan, pendjad'ahan dan desintegrasi moral dari rakyat dan daerah yang diperintahnya. Zionisme, dengan adanya negara Israel, telah menambah segala kedielean itu, dengan pembasman penduduk dan pengusiran dengan kekerasan rakyat yang tak bersalah dari tempat tinggal mereka, sehingga membuat lebih dari satu djura orang-orang Arab Palestina, Kristen dan Aliks Islam menjadi tak bertempat tinggal dan memerlukan pertolongan.

Bukan itu saja, kekuatan dari orang-orang Yahudi terhadap negaranya masing-masing dirusak, dengan mengembangkan suatu ketataan kepada Israel guna mendirikan suatu negara Zionist berdasar pembedaan rasial dan agama. Sekarang ini bukan waktunya untuk mengulangi soal peristiwa Palestina yang menjedihkan dalam beberapa tahun akhir ini. Tjukup menjebut dua kenjataan. Pertama ialah, bahwa penduduk dunia tak dapat terus diabui matania oleh propaganda Zionist hingga tak melihat kebenaran tentang Palestina. Itulah sebabnya mengapa kami sungguh-sungguh berharap, bahwa baik negara-negara yang diwakili dalam Konperensi ini, maupun penduduk dunia lainnya yang djujur, akan terus mengetjap Israel sebagai negara yang tidak sah dan agressor dan mengusahakan supaya hak-hak orang Arab atas tempat tinggal mereka sendiri di Palestina diakui dan dipulihkan.

Kenjataan kedua adalah, bahwa orang-orang Arab dan dibelakang mereka dunia Islam dan sebagian besar umat Kristen, telah berpendirian teguh tidak akan melepaskan hak-hak politik dan keagamaan mereka di Palestina. Menurut keagamaan, Palestina menjadi hak penduduk dari 3 golongan agama besar, Islam, Kristen dan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Jahudi bersama-sama dengan tentara Jerman hak agama Jahudi sadja. Politis Palestina adalah hak penduduknja jerg sah, ialah orang-orang Arab jang telah hidup disana berabad-abad lamanya sebelum rentjana-rentjana imperialistis ditumpahkan kepada Daerah Suti.

Kesimpulannja ialah, bahwa Zionisme akan tetap mendjadi sebab utama dari pengatjaan perdamaian dan harmonie dibagian dunia jang sangat penting dan strategis, jaitu Timur Tengah.

Kekuatan ketiga jang menjebakkan gangguan setjara besar didunia dewasa ini adalah komunisme. Komunisme adalah suatu agama jang berpihak pada materialisme sadja. Ia mengingkari Tuhan dan waisan keagamaan dari manusia. Orang tidak akan menganggap suatu djenis agama sebagai suatu sumber bahaya bagi umat manusia, bilamana ia dalam tjara mendjalannja bersifat damai.

Tetapi komunisme adalah agama jang subversief. Ia menimbulkan permusuhan diantara golongan-golongan dan rakyat. Djadi Komintern dan kelanjutannja Kominform mewakili pusat komando jang besar bagi agen-agen dari agama Anti-Tuhan jang baru ini dan tidak ada bangsa didunia ini jang tidak dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan dan usaha-usahanja jang subversief. Rakyat Asia dan Afrika jang telah berjuang puluhan tahun untuk mentjapai kebebasan dan kemerdekaannja menghadapi sekongkelan Komunisme ini seperti melontjat dari wadjan kedalam api. Adalah kewadajiban bagi pemimpin-pemimpin negara dalam dunia non-komunist untuk menghadapi kesungguhan dari bahaya komunisme dinegeri mereka masing-masing. Tetapi itu belum semuanja, karena jang diperdjuarakan untuk ditjapai oleh komunisme bukan lapangan ideologie sadja. Meskipun ada pernyataan dari Negara-Negara Besar selama perang dunia kedua, bahwa mereka tidak akan mentjari perluasan daerah, kemenangan dan penguasaan, tetapi dunia Komunisme telah membuktikan penaklukan dan penguasaan dalam Pemerintahannja. Mereka menghadapkan dunia kepada suatu bentuk baru dari kolonialisme, lebih berbahaja dari pada jang lama. Dewasa ini dunia komunis telah menundukkan bangsa-bangsa Asia dan Eropa Timur dalam jumlah jang djauh lebih besar daripada suatu kekuasaan kolonial.

Fikirkan daerah Turkestan jang luas di Asia jang ada dalam penguasaan Rusia. Fikirkan nasib dari Estonia, Latvia dan Lithuania. Mereka telah ditjapiok oleh Sovjet Uni, jang djuga telah menambahkan kepada daerahnja jang luas itu bagian-bagian dari Polandia, Rumania dan Tjekoslowakia setelah perang dunia kedua. Dibawah bentuk kolonialisme jang tua, ada sedikit kesempatan untuk mendengar djeritan kesakitan dari rakyat jang dikuasai. Tetapi dibawah penguasaan komunisme, djeritan semantjan itu tidak boleh kedengaran.....



TATSUNOSUKE
TAKASAKI:

Konperensi ini merupakan symbol kebangunan semangat Asia dan Afrika. Pemerintah Djepang insaf akan kepentingannja.

Saja merasa sangat senang dengan ikut dalam Konperensi jang penting ini dan menjatakan harapan dan aspirasi bangsa Djepang sebagai negara jang terletak didaerah Asia dan Afrika.

Sangatlah disayangkan, bahwa bangsa Asia Afrika jang mendjadi perintis dari kebudayaan dan memiliki sumber-sumber kemanusiaan dan material, tetapi mereka termasuk kedalam golongan jang belum berkembang ekonomi dan techniknya. Menurut pendapat saja kita harus mengakui kenjataan ini dan harus mentjapai kemerdekaan penuh dan kemadjuan dengan djalan selfhelp dan kerdjasama timbal balik. Saja mengharapakan Konperensi ini akan memantjarkan tahaaja kebangunan Asia dan Afrika dan bahwa kita ingin meninggikan kembali obor kebudayaan asli kita.

Dalam perang dunia jang kedua, saja dengan menjesal mengatakan, Djepang telah menimbulkan kerusakan-kerusakan kepada tetangga-tetanggannja, tetapi sebenarnya djuga mendatangkan kesengsaraan kepada kami sendiri. Tetapi sekarang Djepang merupakan negara jang membaktikan dirinja sepenuhnya untuk perdamaian. Sebagai suatu bangsa jang telah mengalami bagaimana hebatnja bahaya bom atom, kami telah djera untuk menjelesaikan persoalan dunia dengan kekerasan. Dengan konsekwen telah mendjadi politik kami jang tak dapat dirobah lagi, untuk menegakkan demokrasi dengan penuh damai dalam negeri kami.

Konperensi sekarang ini jang, dengan memelopori rasa saling mengerti dan hubungan pertetanggannja setjara sahabat antara negara-negara Asia dan Afrika, akan dapat memberikan bantuannja kepada dunia dengan seluas-luasnja, dan disamping itu memperlipatgandakan kemadjuan perekonomian untuk seluruh daerah kita.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Delegasi Djepang memajukan kepada Konferensi ini suatu usul tertentu mengenai kerdja sama ekonomi dan kebudayaan bersama-sama dengan usul untuk mempertahankan perdamaian dunia. Saja mengharapkan bahwa semuanya itu akan dipertimbangkan dengan seksama oleh para delegasi yang terhormat.

Dunia pada saat ini telah memasuki zaman energi nuclear. Apakah energi nuclear itu akan dipergunakan untuk kehantjuran manusia atau akan dipergunakan untuk perdamaian, semuanya tergantung kepada kebijaksanaan manusia. Pemilihan yang tepat hanyalah akan didapat dengan berdasarkan kebudayaan dan semangat yang luhur. Saja pertjaja, inilah saatnya yang kita bangsa Asia dan Afrika bekerdja sama untuk menegakkan perumahan perdamaian yang kekal, diatas fundamen nilai-nilai semangat dan moral yang telah diturunkan kepada mereka semendjak berabad-abad lalu.

JORDAN.

WAHID-SALEH :

..... Adalah sangat menjedihkan, bahwa dasar-dasar hak-hak azasi manusia yang disiarkan begitu meluas oleh P.B.B. dengan bermatjam-matjam bagian-bagiannya hanya merupakan monopoli belaka bagi bangsa-bangsa besar, sedang bangsa-bangsa kecil selalu dihadapkan kepada masa perjuangan dan pengorbanan yang tak ada habis-habisnya.

Kini telah masak waktunya, bahwa persoalan-persoalan kita di Asia-Afrika harus diselesaikan sesuai dengan dasar-dasar hak dan keadilan, penyelesaian yang didasarkan atas nilai-nilai moral dan perikemanusiaan, dan tidak atas tesaerakan (egoisme) dan politik kekuasaan. Kini telah masak waktunya, bahwa negeri kita masing-masing akhirnya dibebaskan dari belenggu imperialisme dan kolonialisme Barat.

Kita di Jordan mempunyai suatu masalah yang aneh dalam sejarah manusia. Sekumpulan masyarakat orang-orang asing yang heterogeen dipaksakan pemerintahannya atas bangsa Arab di Palestina, yaitu pemilik negeri itu yang sah sedjak 1300 tahun yang lalu.

Dalam bentjana ini, bangsa Arab dari Palestina ditolak menggunakan segala hak mereka yang sah yang diakui oleh dunia, yaitu hak untuk menentukan nasib sendiri, hak untuk memilih bentuk pemerintahan yang mereka setujui dan hak sutji untuk hidup dan bekerdja di rumah dan halaman sendiri.

Dalam keadaan yang demikian, beberapa djuta orang Arab dari Palestina dijenjapkan atau diusir

dari rumah mereka dengan tekanan bajonet dan seterusnya dipaksa untuk mengungsi ke negara-negara terdekat atau kemana saja.

Dengan komplotan dan pengaruhnya Zionisme dengan mendapat bantuan dari dunia Jahudi dan negara-negara besar tertentu, negara untuk kaum Jahudi ditijptakan di Palestina, sebagai hasil rebutan dari pemiliknya yang sah. Negara apa yang dinamakan „Negara Israel“ itu dipertahankan oleh pemberian dan belas-kasihan dan hidup atas agresi. Sedjarahnja bentjana itu telah tjukup dikenal. Tjukuplah kalau dikatakan, bahwa negara ini mendapat bantuan dan dipertahankan oleh dunia Jahudi yang memiliki atau mengawasi dibanjak negara-negara Barat, pers, bioskop, pemantjar-pemantjar radio dan banjak perdagangan dan perindustrian. Dr. Weisman, seorang Zionist yang terkenal menulis dalam bukunya „Trial and Error“, bahwa „pengaruh Indjil terhadap mentaliteit Inggeris dan Amerika yang beragama Protestan adalah langsung berhubungan dengan dikeluarkannya Balfour Declaration dan bagi semua pertolongan berikutnya yang kami terima dari bangsa Inggeris dan Amerika untuk mewujudkan Perumahan Nasional di Palestina“, benar-benar menjedihkan.

Kita semua mengetahui, bahwa sementara diantara Tuan-Tuan ada yang mempunyai hubungan dagang atau politik dengan Israel. Apa yang kita harapkan pada detik yang kritik ini ialah menghadapkan perkara kami ini kepada Tuan-Tuan dan mentjari bantuan Tuan-Tuan untuk mendapatkan penyelesaian yang adil dan tepat dalam perkara kami itu.

LAOS.



S.B. KATAY
D. SASORITH :

..... Kami merasa bahagia untuk menyatakan, bahwa tjita-tjita kita yang terpenting adalah sama seperti yang diangan-angankan oleh sidang besar dari bangsa-bangsa Asia dan Afrika ini, sebab kami pertjaja bahwa usaha memperkokoh

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI LIBANON.

perdamaian anenjusun salah satu dari dasar-dasar objektif dari persatuan kita kembali.

Adalah pasti, bahwa diantara semua kejadian yang mengantiam kita, yang disebabkan oleh perang merupakan yang paling buruk. Kita mengetahui, bahwa peperangan pada masa ini hanya dapat diisoleer dengan banjak-banjak-pajah dan, bahwa alat-alat pemusnahan modern dapat menimbulkan kerusakan yang tak mungkin diperbaiki lagi di dunia, baik bagi yang bertempur maupun bagi orang-orang preman, baik bagi yang turut berperang maupun bagi yang tidak turut berperang.

Kalau begitu pertemuan kita ini harus memperbincangkan persoalan besar mengenai perdamaian diantara persoalan-persoalan lain.

Dengan tidak bermaksud mendahului debat, hendaklah kami untuk mengatakan disini, bahwa Laos menjetudui seluruhnya lima prinsip yang ditentukan dalam penandatanganan Pakta B.T.-India. Tjara ini untuk menjelesaikan begitu banyak rentotan persoalan hubungan internasional dengan tidak diragu-ragukan lagi adalah bahwa satu tjara yang arif dan benar, karena hal itu menunjukkan bagaimana rasanya perdamaian dan perang merupakan masalah ahlak manusia yang terpenting. Dan tidaklah dapat dilupakan harapan yang demikian, karena nilai moral yang terkandung didalamnya adalah sesuai dengan ajaran-ajaran agama Buddha. Menjetudui lima prinsip itu berarti memelihara keharusan moral terhadap diri kita sendiri, untuk mengangkat diri terlebih dahulu, untuk melindungi diri dan sekeliling kita terhadap keharusan-keharusan yang benar dan kemudian kepada kepertajaan terhadap orang lain.

Kalau lima prinsip itu diteliti, terutama prinsip non-agresi dan non-intervensi, adalah bahwa banjak kesukaran-kesukaran yang menjerbakan lenjap dengan sendirinya. Dan yang mendapat perhatian kita semua ialah melaksanakan semua prinsip itu dalam praktek. Pengalamannya yang terhormat tetapi yang sedihkan, Laos dapat mengatakan, bahwa keadilan dan rasa hormat terhadap hukum adalah syarat-syarat mutlak bagi bekerja politik yang denikian.



SAMI
BEK SOLIH:

....., Diambang pintu pembukaan Konperensi ini dijanjikanlah kita lupa, bahwa mata dunia ditujukan kepada kita. Dijanjikanlah kita lupa bahwa kepada pekerdjaan kita ini tergantung nasib dan keselamatan bagian banjak umat manusia. Menurut pendapat saja, yang seharusnya menguasai perdebatan-perdebatan kita ialah persaudaraan setjara kemanusiaan.

Dalam kenjataanja, walaupun berbeda pendapat dan kebudayaan, semua kita adalah bersatu dibawah rasa persaudaraan ini. Sebab itu harga dari tindakan yang oleh para pemimpin diartikan untuk negara mereka dan kepada dunia, adalah seimbang dengan tindakannya hendak membawa penduduk dunia dan untuk menjamin tempat tinggal, makanan dan pakaian perseorangan.

Tetapi ada penghalang yang menghalangi berhasilnya Konperensi kita, dan menghalangi tjita-tjita itu.

Bahaya itu, yang pertama ialah fanatisme dalam segala bentuknya; kedua, gila bangsa dan sangat mendewakan nasionalisme; dan yang ketiga, membentji orang asing. Semuanya itu adalah bibit perbantahan.

Kalau hak-hak manusia sebagai yang disebutkan dalam Piagam P.E.B. adalah hak suci, maka hak-hak bangsa itu sendiri, biarpun betapa ketjilnja, untuk dihormati oleh negara besar adalah pula sesuatu yang suci. Lebih djauh, mereka yang masih tertekan dan belum merdeka akan mendapat sokongan disini.

Kami sangat yakin dengan adanya dasar keadilan dan merasapnya kemerdekaan setjara demokrasi, kita akan dapat memperbaiki nasib mereka dan dengan demikian akan menunaikan misi ini.

Achirnja, dengan perantara toleransi kita akan dapat menjelesaikan kesulitan-kesulitan dan akan menimbulkan penghargaan dunia kepada kita. Dengan toleransi kita akan menjijptakan suasana menguntungkan dalam kerdasama dunia. Dengan toleransi kita akan meredakan pertentangan yang sudah selama itu menjebabkan bentjana".....



MOMOLU
DUKULY:



MAHMOUD
BEY
MUNTASSER:

..... „Pertemuan tingkat tinggi dari seluruh negara-negara Asia dan Afrika ini tidak dapat diartikan lain dari suatu tanda kebanggaan dan aman baru dari bangsa bangsa dua benua dalam tanggung-jawabnya yang penting terhadap peri-kemanusiaan.

Bagi kami, kami datang kesini dengan tidak ada mengandung maksud untuk melemahkan putusan ataupun mengurangi arti yang dititipkan Konperensi ini.

Kami mengulurkan tangan persaudaraan, cinta menjintai dan saling menghormati. Dengan konsekwen kami mengharapkan dengan sangat bahwa semua pertimbangan akan dilakukan dalam suasana yang sehat, objektif dan saling mengerti.

Dalam pernyataan politik luar negeri yang disampaikan kepada Badan Legislatif Nasional tanggal 21 Februari 1955, Kepala Negara kami, Presiden William V.S. Tubman menyatakan antara lain sebagai berikut:

„Kita harus memberikan bantuan yang simpatik dan memberanikan penduduk dunia yang kurang beruntung dan terdijajah, tetapi terikat kuat kepada evolusi perdamaian dan peraturan-peraturan.

Perundingan-perundingan antara golongan-golongan dari lain benua dan ras untuk kemakmuran bersama adalah terpuji, asal saja berdasarkan pada tujuan yang objektif untuk mempertinggi perdamaian dunia dan persaudaraan antara seluruh bangsa dan negara dalam usaha untuk memperkembang masa yang lebih baik dalam segi kerukunan, kemerdekaan, persamaan, keadilan, kemungkinan-kemungkinan dan keuntungan untuk semua dengan tidak memandang perbedaan ras, warna kulit, agama dan kepercayaan. Kalau dengan dasar sebaliknya, maka akan berarti memperlebar kerenggangan internasional”.....

..... „Negara-saja berpendapat bahwa ketegangan dunia sekarang disebabkan oleh sedjumlah kedjahatan, kedjahatan mana harus diatasi agar manusia dapat hidup tenteram.

Kedjahatan itu adalah :

1. **Kolonialisme.** Manusia telah sanggup memerdekakan dirinya dari perbudakan perseorangan, tetapi sangat sayang masih ada perbudakan terhadap suatu bangsa dalam bentuk keseluruhan yang menyebabkan masih adanya penderitaan di banyak tempat. Sangat kami sesalkan negara Perantjis yang pertama kali memperkenalkan prinsip Kemerdekaan, Persamaan dan Persaudaraan masih menekan tiga daerah djajahnya di Afrika Utara. Kami mengharapkan yang Perantjis akan menindjau tindakan-tindakannya kembali menghentikan pertumpahan darah dan memerdekakan Afrika Utara.
2. **Diskriminasi racial** yang didasarkan pada warna kulit atau turunan adalah suatu kedjahatan yang bersumber kepada semangat pendjajah dan adalah suatu perindasan terhadap peri kemanusiaan.
3. **Tjampur tangan terhadap ideologi negara lain.** Kami mengakui bahwa negara-negara merdeka berhak memilih idee dan sistim yang diingini, tetapi adalah sangat berbahaya kalau satu negara ingin tjampur tangan dalam soal intern negara lain dan memaksakan keinginannya baik terang-terangan ataupun tjara tersembunyi.

Libya pertjaja penuh kepada badan-badan demokrasi dan prinsip-prinsip yang disebutkan oleh Piagam Bangsa-bangsa, dan bahwa dia mempunyai arti tertentu untuk mendjamin seluruh manusia didunia, perdamaian dan keamanan. Dengan alasan itu, pemerintah dan rakyat Libya menentang kolonialisme dari mana dan bagaimanapun bentuknya; djuga menentang diskriminasi racial serta tjampur tangan terhadap soal intern sesuatu negara lain.

Semua prinsip yang dihormati pemerintah dan rakyat Libya adalah termasuk dalam tujuan dan maksud diadakannya Konperensi ini

NEPAL. PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



MAJOR
DJENDRAL
SOVAC JUNG
THAPA :

..... Negeri kita adalah negeri ketjil di Asia dengan sedjarah jang pandjang dan banjak seluk-beluknja. Kita menyaksikan bangsa-bangsa lain timbul dan tenggelam, tenggelam dan timbul dan kita sendiri melalui masa pasang-surut dengan bermatjam-matjam djalan. Kalau kami lihat saat sekarang ini, sekitar para ahli negara Asia dan Afrika jang terpilih jang berkumpul ini, pikiran kami melajang kembali kemasa sedjarah Asia jang telah lampau, dimana banjak dilakukan pertukaran-pertukaran pendapat dengan kegem-biraan diantara negara-negaranja jang berbeda-beda itu. Buddha misalnja dilahirkan di Lumbini, Nepal; ia menjabarkan adjarannja mengenai pembebasan di India kemudian tersebar setjara meluas didunia. Karenanja dapatlah kami kata-kan, bahwa hubungan jang sedang kita tjari untuk dihidupkan dan dipupuk dengan konpe-rensi ini antara bangsa-bangsa Asia dan Afrika, bagi sedjarah tidak semuanja baru. Hubungan-hubungan ini telah berakar dalam dikalangan rakjat melalui kebudayaan, ekonomi dan matjam-matjam djalan. Ikatan sedjarah dan letak daerah, kebudayaan dan agama jang mengikat bersama negara-negara jang diwakili dalam konperensi ini adalah sangat kokohnja. Dengan banggunja kembali Asia dan Afrika, setelah berabad-abad dikuasai oleh Barat, berkumpulja bersama negara-negara ini adalah sudah semestinja dan bahkan tak dapat dihindarkan.

Selama beberapa tahun jang achir-achir ini, terutama sesudah perang dunia ke II, usaha-usaha jang ulet telah dilakukan oleh para ahli negara Asia dan Afrika untuk memperbaharui dan memperkokoh ikatan lama itu. Djadi sebenar-nja negara-negara Asia dan Afrika sama ber-kumpul lebih dekat lagi, dengan usaha selalu memperluas daerah kerdjasama, goodwill dan perdamaian. Adalah terang, bahwa persatuan dan solidariteit jang tumbuh diantara negara-negara Asia dan Afrika ditunjukkan pada pe-nunian tugas sedjarah. Ini bukanlah suatu tjara jang menunjukkan maksud djahat atau sifat

perintahun terhadap negara-negara lain di-dunia, djuga tidak untuk diartikan sebagai keinginan untuk membentuk suatu blok baru. Sepandjang jang kami lihat, konperensi ini adalah suatu panggilan kepada negara-negara Asia dan Afrika untuk menolong dirinja sendiri dengan djalan kerdjasama dan untuk memper-tahankan serta memperkokoh kemerdekaan jang baru sadja mereka peroleh, dengan segala kesungguhan.

Nepal merasa karenanja, bahwa bangsa-bangsa jang berkumpul disini, hendaknja dengan sungguh-sungguh menudjukan usahanja terha-da) penjuburan goodwill dan hidup bertetangga dan meluaskan daerah kerdjasama. Kedua ditu-djukan kepada usaha menghimpun persatuan dan solidariteit jang sedang tumbuh karena kekuatan-kekuatan historis dan ekonoinis di Asia dan Afrika menudju kepada tjita-tjita P.B.B.

PAKISTAN.



MOH. ALI :

Kita harus berbuat sekuat tenaga untuk mendjamin supaya rakjat jang masih merintah dibawah neraka penguasaan asing, diperbole-hkan menikmati dengan sepenuhnya buah keme-rdekaan. Pada waktu bersamaan, kita harus berhati-hati, bahwa kita tertipu membuka pintu-pintu kita untuk suatu bentuk imperialisme baru jang lebih memihak, jang berkedok dalam wujud kemerdekaan. Kita selama konperensi ini akan membitjarakan tjara-tjara, dengan tjara-tjara mana sebab-sebab ketegangan dunia diantara negara-negara dapat dihilangkan dan perda-maian dunia didjamin. Pada saat jang tersendiri saja akan mengusulkan mengadakan kepada Tuan-tuan sekalian 7 prinsip jang berikut, jang menurut pendapat saja, penerimaannja oleh segenap negara penting sekali guna kelanjutan perdamaian dunia.

Tujuh prinsip ini adalah:

1. Penghargaan terhadap integriteit daerah dan kedaulatan semua bangsa.

2. Pengakuan kemerdekaan setiap bangsa yang merdeka dan berdaulat.

3. Penghindaran dari pertjampuran tangan kedalam soal-soal dalam negeri dari suatu negeri oleh negeri lain.

4. Non-agresi terhadap integriteti daerah atau kemerdekaan politik dari suatu negara.

5. Hak membela diri, baik sendiri atau kolektief (bersama-sama).

6. Hak menentukan nasib sendiri dari semua rakyat dan kebentjia terhadap exploitatie kolonial dalam setiap wujud atau bentuk; dan

7. Penjelesaian semua perselisihan internasional dengan djalan damai, ialah perundingan, perantaraan atau arbitrage.

Adalah menjadi kejakinan saja, bahwa hanya jika 7 prinsip dari perdamaian ini diakui setjara umum dan dilaksanakan sungguh-sungguh, kegagahan dunia yang ada dapat diselesaikan dan perdamaian dunia dijamin dengan kuat. Adalah tidak tjukup hanya menjatakan kepertjajaan kita dalam prinsip-prinsip ini

Jika prinsip-prinsip ini tidak hanya diterima saja melainkan juga dilaksanakan oleh semua negara, akan mungkin bagi negara-negara untuk bekerdja sama dalam perdamaian dengan tidak mengindahkan perbedaan ras, agama, ideologi, atau bentuk pemerintahan.

Saja menganggap 7 prinsip ini sebagai Tudjuh Sakaguru Perdamaian. Hanya apabila gedung kemerdekaan, telah didirikan dengan sungguh-sungguh, ketakutan dan ketjirigaan akan dihapus dari hati manusia dan bagi semua bangsa akan ada kemungkinan untuk mempertahankan dan mengembangkan perhubungan persaudaraan berdasarkan saling hormat-menghormati, saling pertjaja-mempertjaji dan saling mengun-
tungkan.

Dari kesediaan untuk menerima 7 prinsip ini akan tumbuh perdjandjian tentang pengurangan dan pengawasan internasional atas persendja-
aan.



CARLOS
P. ROMULO :

..... Semua yang diwakili disini tentunja bersangkutan dengan soal-soal:

1. kolonialisme dan kemerdekaan politik;
2. persamaan ras; dan
3. pertumbuhan ekonomi setjara damai.

Sedjarah dunia dewasa ini bergantung pada tjara bagaimana soal-soal ini dihadapi dan diselesaikan, atau tidak dihadapi dan tidak diselesaikan.

Pertama-tama kenjataan yang sebenarnya ialah, bahwa kita telah berkumpul disini adalah melukiskan kenjataan besar yang baru, bahwa soal-soal kemerdekaan, persamaan, dan pertumbuhan bukanlah soal-soal nasional lagi, melainkan soal-soal dunia.

Dalam dunia ini, dimana kekuatan-kekuatan besar sedang bertarung, kemerdekaan dari bangsa yang kecil atau lemah adalah sesuatu yang tak tentu dan mudah patah. Djelaslah, bahwa kemerdekaan terakhir yang lebih besar akan terletak dalam suatu pertalian yang lebih besar, penjatuan kepentingan daerah, dalam penjusunan perimbangan moral, kekuatan ekonomi dan djasmani, dalam tindakan bersama yang sedapat mungkin diusahakan oleh semuanya guna menghindari bentjana perang dunia yang baru.

Mari kita dengan terus terang menghadapi kenjataan, bahwa didalam negeri, kita dapat menjapai harga-diri kita kembali dan berdjua melawan soal-soal lokal kita sendiri, tetapi untuk menjapai tudjuan pertama mengenai perubahan-perubahan ekonomi, kebahagiaan serta perdamaian, sebagai bangsa kita belum dapat mengatasinja.

Disamping soal kolonialisme dan kemerdekaan politik, kita semua disini berkepentingan mengenai soal persamaan bangsa. Ini adalah titik persentuhan, saja kira, buat sebagian besar dari kita yang berkumpul disini dan rakyat yang kita

Sistem dan tjaraja besar-besaran telah pernah ada dan tidak ada regime Barat, yang tidak boleh ditakutkan, sedikit atau banyak, doktrin dari inferioriteit rasial mereka pada rakyat yang diperintahnya. Kita semua menghadapi kenyataan yang mengedjutkan dari keadaan terbelakang perekonomian kita. Ini sebagian karena faktor-faktor iklim, geografis dan sisa-sisa yang masih ada dari pola-pola lama yang lapuk.

Tetapi dalam ukuran besar juga ada dan seringkali pasti hasil dari pola-pola yang dilemparkan oleh kolonialisme Barat. Warisan ini adalah beban yang paling berat yang kita bawa dalam masa baru dari kemerdekaan nasional. Sebagian besar dari rakyat kita hidup dalam keadaan melarat. Kita perlu mengubah perekonomian kita. Kita butuh industrialisasi sesuai dengan sumber-sumber dan kebutuhan kita. Kita harus memperoleh tempat yang lebih berkeadilan didalam pasar-pasar dunia. Kita harus buat ini dalam tjaraja yang akan menaikkan tingkat hidup rakyat dengan effectiel. Ini adalah soal untuk mana kita telah berjuang. Ini adalah soal-soal yang masih diperjuangkan oleh terapa diantara kita. Untuk ini, terutama, kita harus merdeka dalam menjari jalan sendiri. Ini dijangkanlah kita terlalu banyak mempunyai ilusi tentang kemerdekaan nasional. Kita dijulididunia sebagai bangsa-bangsa yang merdeka dalam pertengahan abad ke-20, bukan di ke-19 atau ke-18.

Dalam dunia abad ke-20 kenyataan yang sebenarnya adalah, bahwa ekonomi nasional benar-benar adalah suatu ilusi. Kita tak dapat mulai, misolnja, dimana 2 abad yang Inggris telah mulai. Kita harus membuat kita dalam dunia yang telah membuat kemajuan-kemajuan teknik yang luar biasa dimana ekonomi yang saling gantung-bergantungan menjadi kuntji kearah perkembangan pertumbuhan ekonomi yang effectiel.

Tetapi ini sama sekali tidak menyebabkan kita berdaja untuk bertindak dalam kepentingan diri. Ini tak berarti, bahwa kita tak ada ketjuali menjerahkan putusan-putusan kepada orang lain. Malah sebaliknya, di dinegara kita, dalam benua kita, putusan-putusan penting sebagian besar sedang akan diambil. Dan adalah kita, yang akan membuatnya dalam jalan apa yang kita kerdjakan atau apa yang tidak kita kerdjakan dalam tahun-tahun yang datang.

Mungkin Bom-bom Rusia atau Bom-bom Amerika akan menentukan bentuk dunia dike depan hari dan nasib umat manusia. Atau sampai begitu, malapetaka total akan datang akan membuat semua yang kita katakan perbuat, disini maupun dimana saja, tak berguna.

Tetapi akan mati dan yang masih hidup akan terak sesukanja kedalam masa baru yang datang. Tetapi saja tak mengharap, bahwa keputusan-keputusan besar akan diambil setjara demikian.

Kita harus kita hidup sedang akan ditentukan dalam ukuran besar dengan jalan bagaimana rakyat Asia dan Afrika melaksanakan perubahan kehidupan dan masyarakat mereka

SUDAN.



SAYED ISMAIL
EL AZHARI :

..... "Soal pendjadjahan dan penguasaan oleh orang asing, persoalan yang mendatangkan penderitaan yang sangat hebat kepada segolongan besar bangsa Asia-Afrika adalah suatu sebab yang menimbulkan tindakan bersama dan kerdja sama yang sungguh-sungguh, bukanlah disebabkan oleh adanya perasaan bentji pada sesuatu negara asing tetapi disebabkan oleh kejakinan kita kepada keadilan yang sungguh, penghormatan kita kepada hak-hak bangsa, inspirasi bangsa kita dan sifat tradisi kita yang tjinta damai."

Seseorang tak dapat menjngkari adanya kenyataan bahwa kesulitan-kesulitan perekonomian menyebabkan orang mungkin menerima bantuan asing yang bersjarat yang memungkinkan mereka terdjatuh kebawah antjaman bagi kemerdekaan dan kedaulatan nasionalnya. Maka untuk menjtiptakan perdamaian dunia yang sebenarnya haruslah kita menaikkan taraf kehidupan rakyat.

Dalam lapangan kebudayaan kita juga dapat menjtiptakan suasana lega untuk energi kebudayaan kita dan sebab itu memperkaja pikiran manusia yang berharga. Sumbangan-sumbangan kita betul-betul akan merupakan pernjataan kehidupan kita yang sebenarnya dan orisinil dari sedjarah kita dari masa kedua benua ini merupakan yang terkemuka dalam dunia tentang agama, ilmu pengetahuan, kesenian dan falsafah. Tudjuan kita akan mudah tertjapai kalau kita mempertjampurkan informasi, penjelidikan dan pengalaman kita; dan kita akan banyak memperoleh keuntungan dengan pertukaran studen dan kaum terpeladjar. Kami dari Sudan, dengan bantuan letak geografis yang baik akan dapat merupakan medium yang penting dalam lalulintas dunia".....

SYRIA.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

KHALED
EL-AZEM.

..... Dalam perjuangan untuk perdamaian, pertama-tama dan terutama sekali, kita harus mempunyai kepercayaan dalam kemampuan dan kekuatan kita. Kita jangan diabaikan begitu saja. Benar bahwa kita terkebelakang dalam lapangan militer dan ekonomi. Djuga benar, bahwa kita tidak memiliki senjata nuclear dan senjata-senjata penghantjuran massa lain-lain. Tetapi sumbangan kita masih cukup besar dan menentukan. Djika kita sungguh-sungguh berhasrat, dengan kemauan kita bersama, kita dapat mem-veto suatu peperangan yang menjelakakan atau mengurangnya sampai seketil mungkin. Tanpa kita, perang dunia tak dapat dikerjakan. Kita memerintah kekuatan tenaga manusia yang paling besar, bahan-bahan mentah, bahan-bakar untuk peperangan, pangkalan-pangkalan militer dan posisi-posisi yang strategis.

Beberapa besar milik kita, bilamana kita dapat menahan peperangan dan mempertahankan perdamaian. Perdamaian tak dapat dibuat. Perdamaian bukan sesuatu yang dapat di-export atau di-import. Perdamaian ialah perwujudan dari pada pikiran yang damai, politik perdamaian dan tindakan damai. Djika suatu peperangan ketiga dimulai, pasti tidak akan ada yang menang atau yang kalah, mungkin menjadi hantjur semuanya. Mereka difihak yang benar maupun yang salah, mereka yang difihak penterang maupun yang mempertahankan, semuanya akan dibawa kepada non-existence. Nasib yang menjedihkan ini akhirnya menjerukan bahwa co-existence yang damai harus merupakan batu dasar dari kehidupan internasional kita.

Adalah suatu pengertian yang salah untuk berpendapat peperangan sebagai suatu keha-

tusan. Adalah suatu kedjeleran yang sangat besar menganggap peperangan sebagai suatu kedjelekan yang tak dapat dihindarkan. Dalam dunia kita dengan kepandaian manusia untuk menguasai kekajaan alam, semua kebutuhan manusia dapat dipuaskan. Ada tempat yang cukup buat mentjapai semua tjita-tjita.

Israel tidak termasuk dalam Asia atau Afrika. Israel adalah suatu kantong yang ditinggalkan dibelakang garis imperialisme didalam pengundurnja yang sia-sia. Ditempatkan disalah satu pintu-pintu yang utama dari Asia, dipersimpangan djalan dari tiga benua, Israel adalah suatu pos depan dari imperialisme. Djadi, Israel merupakan bahaya bagi kemerdekaan dari rakyat Asia dan Afrika, kemerdekaan yang mereka dapat dengan peluh, darah dan air-mata mereka.

Berikutnja adalah persoalan Afrika Utara. Keadaan di Marokko, Tunisia dan Aljazair, adalah menjedihkan dan kateju. Marokko, suatu negara yang berusia 10 abad, sekarang adalah suatu konsentrasi kamp yang luas dengan radja yang diasingkan. Tunisia sedjak tahun 1950 terapung-apung dalam suatu proses perundingan yang diulur-ulur untuk otonominja yang sederhana. Aljazair sedang dalam keadaan perang ketjil-ketjilan, suatu perulangan dari perselisihan yang berabad-abad. Pada umumnya ketiga daerah Arab ini, yang pada suatu masa pernah menjadi tempat kedudukan dari dinasti-dinasti dan peradaban, telah diingkari tjita-tjita nasionalnja dan pelaksanaan dari prinsip-prinsip menentukan nasib sendiri.

Afrika menundjukkan suatu soal lain yang menjedihkan. Perbedaan ras terhadap rakyat keturunan India dan Pakistan dan politik apartheid adalah sumber dari soal-soal yang mengerikan bagi dunia beradab seluruhnja.

Di Asia kita mempunyai persoalan Irian Barat. Ini adalah suatu warisan dari imperialisme. Daerah itu adalah bagian yang integral dari Republik Indonesia. Adalah sangat mergedjutkan, bahwa P.B.B. dalam menghadapi persoalan ini didalam sidangnja yang terakhir tidak menerima resolusi yang disusun dalam bahasa yang sangat sederhana.

Dalam semua persoalan ini, imperialisme adalah menjadi sebab yang utama.....

THAILAND.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dan tindakan ada seseorang yang tidak mempunyai keinginan mengadakan agresi takut terhadap negara saja. Delegasi saja datang kepada Konferensi ini dengan tujuan goodwill kepada semuanya".....

TURKI.



FATIN
RUSTU
ZORLU :

PANGERAN
WAN
WAITHAYAKON :

..... „Mentiptakan goodwill dan kerdja-
ma antara bangsa-bangsa di Asia dan Afrika
adalah merupakan tudjuan pertama dari Kon-
ferensi kita ini.

Kerdjasama kebudayaan haruslah benar-benar
dijiptakan, bukanlah sadja karena disebabkan
ah lama adanya ikatan yang kuat dalam tradisi
budayaan antara bangsa Asia dengan bangsa-
angsa dari Selatan, Tenggara dan Asia Timur,
tapi djuga disebabkan adanya ikatan yang kuat
dengan negara-negara yang berkebudayaan
sama.

Persoalan ekonomi mungkin soal yang terpen-
g bagi negara-negara Asia-Afrika, dan disana
ada suatu kepentingan yang mendesak untuk
membangunkan tingkat hidup bangsa Asia
Afrika, walaupun hanya untuk melindunginja
dari bahaya antjaman lapar, kemiskinan dan
pengsaraan. Sebab itu kerdjasama ekonomi
diterima dengan sangat gembira dan ikatan
kerdjasama ekonomi yang kuat antara bangsa-
angsa ini akan sungguh berkembang. Delegasi
saja berpendapat bahwa adalah perlu dan
gatalah pula pada waktu disamping itu diadakan
saja sama yang kuat djuga dengan seluruh
dunia.

Mengenai persoalan kemerdekaan nasional
delegasi Thailand mendjundjung tinggi prinsip
merintah diri sendiri dan kemerdekaan bagi
seluruh bangsa Asia dan Afrika. Kami sangat
gembira mendengar, bahwa Malaya akan mem-
oleh kemerdekaan pemerintahinja sendiri
dalam rangka menudju kemerdekaan penuh.
Ada lima prinsip yang terkenal yang menghormati
kemerdekaan dan keutuhan daerah, tak tjampur
dalam urusan intern suatu negara, keun-
gan yang sama dan timbal balik, ko-eksistensi
damai, dapat dimengerti, terketjuadi me-
nani yang kelima jaitu ko-eksistensi setjara
damai. Apakah artinja ini? Apakah ini berarti
sup dan biarkanlah hidup, yang adalah se-
satu prinsip yang benar?

Thailand hanjalah meminta untuk memperlin-
gi dirinja sendiri dari agresi dan subversi

Saja sungguh terharu dengan adanya kita
sedjumlah sebanjak ini dari negara Asia dan
Afrika sekarang berkumpul disini dibawah satu
atap. Ini sudah merupakan bukti yang nyata
bahwa perdjuaan bangsa-bangsa itu untuk
kemerdekaannya selalu bertambah madju.

Pada saat ini negeri kami Turki dihadapkan
kepada suatu ambisi yang langsung mengantjani
kemerdekaan dan keutuhan daerah kami. Ada
tekanan untuk menjerahkan sebagian daerah
kami dan untuk memaksakan kepada kami suatu
keadaan yang berlawanan dengan kemerdekaan
Turki. Tekanan ini datang dari suatu negara
tetangga.

Inilah alasanja kenapa lahir pakat pertahanan
diantara negara-negara yang tjinta damai yang
dinamakan al. Pakat Keamanan Turki-Pakistan
dan Pakat Turki-Irak.

Semuanya ini terdjadi sesudah negara-negara
yang tjinta damai melihat kata-kata „ko-eksis-
tensi” mulai dipakai menurut pengertianja
sendiri.

Itu kemerdekaan, kebebasan dan perdamaian
tidak akan dihadiahkan kepada kita dengan
tidak berusaha, tetapi dia memikulkan kepundak
kita beban yang berat dan bertanggung djawab.

Pengharapan bahwa dengan menutup mata
dari bahaya akan tertjapai keamanan, adalah
berbahaya bukan sadja bagi negara yang ber-
pendapat begitu tetapi djuga bagi seluruh
kesatuan kita. Tjontohnja terbukti dalam waktu
baru-baru ini. Mereka akhirnya menderita sangat.

Kalau kita mengandjurkan dan menguatkan
kepada yang lain untuk mentiptakan perdamaian
abadi — dan kami mengharapkan yang demikian
dapat tertjpta — maka adalah kewadajiban kita
yang pertama-tama untuk mendjaga kemerdekaan
daerah kita dari antjaman dan agresi.

REPUBLIK
DEMOKRASI VIET-NAM
(VIETNAM-UTARA).



PHAM
VAN DONG :

Bangsa-bangsa Asia dan Afrika tidak pernah memantjing untuk menimbulkan perang. Mereka tidak menaruh kepentingan sesuatupun dalam perang. Mereka adalah korban dari banjir peperangan ditamah-airnja sendiri. Sangat seringlah daerah-daerah Asia-Afrika menjadi medan peperangan berdarah, pemuda-pemuda Asia-Afrika menjadi umpam meriam.

Kini tenaga atom dan sendjata-sendjata hidrogen yang berbinasa telah menjadarkan kepada setiap orang, bahwa hanjalah satu-satunya jalan untuk ditempuh ialah ko-eksistensi setjara damai. Sebaliknya, pertjobaan pertama yang menghasilkan untuk menggunakan tenaga atom dalam membangunkan kembali kesedjahteraan telah membukakan harapan amat gilang-gemilang, yang umat manusia belum pernah mimikam.

Kini orang yang ingin memusnahkan perdamaian adalah sama saja dengan agresor-agresor yang mentjoba dibelakang layar melakukan siasatnja untuk memperbudak bangsa Asia-Afrika. Karena alasan ini perjuangn untuk menjelenggarakan perdamaian sebagai penganti perang untuk bangsa-bangsa Asia-Afrika adalah sama dengan perjuangn untuk kemerdekaan nasional terhadap imperialisme yang agresif, perjuangn untuk persamaan diantara bangsa-bangsa terhadap perbedaan rasial.

Bangsa Viet-Nam memberikan bantuannja sepenuhnya kepada perjuangn bangsa Tiongkok untuk memperoleh kembali keutuhan daerahnja, kepada perjuangn untuk menperatukan rakjat Republik Demokrasi Korea. Mereka mendesak dengan keras penyelesaian masalah-masalah demikian seperti soal Irian Barat, Goa, Malaya, Kenya dan hal-hal lain seperti itu, berdasarkan penghargaan terhadap keutuhan daerah dan hak untuk merdeka serta persamaan diantara bangsa-bangsa. Didalam sedjarah negara-negara

Asia dan Afrika kebudaajaan, juga dapat dirakikan dagang telah membuktikan ada kekuatan pendorong untuk kemadjuan dari negara-negara masing-masing, untuk perkembangan pada umumnya dan kemadjuan bagi negara-negara Asia dan Afrika sekalinnja.

Kolonialisme dan peperangan telah merusakkan perhubungan lama dan berharga, menimbulkan batas-batas perasingan dan kebentjiaan antara bangsa dan bangsa, merintang-rintang segala pergaulan dalam lapangan ekonomi dan kebudaajaan. Bukti yang terang perihal ini jaitu penahanan kapal-kapal dagang yang dilakukan dalam tahun-tahun ini, yang mengakibatkan kerugian besar terhadap perkembangan ekonomi dinegara-negara Asia-Afrika sekalinnja dan diseluruh dunia.

Sesudah Konperensi Genewa, perjuangn Viet-Nam tiba pada tingkat baru, menghendaki didjalannja persetudjuan-gentjatan sendjata seluruhnja, memperkekal perdamaian, memperoleh kesatuan, kemerdekaan dan demokrasi diseluruh negara. Dengan perdjandjian-perdjandjian yang sangat berat, rakjat Viet-Nam telah mendjalankan dengan seksama tindakan-tindakan bermaksud mengachiri peperangan dan memperbaiki perdamaian. Tempo 300 hari untuk penarikan tentara dari kedua belah pihak kelingkungan gabungannja masing-masing akan berakhir. Masa baru kini terbuka, dalam waktu mana masalah kesatuan Viet-Nam dengan pemilihan umum yang bebas harus sudah selesai. Viet-Nam adalah negara kesatuan, serta siapapun tak akan dapat memetjah belah. Istilah Kesatuan menaruhkan kesan atas sedjarah, wilajah, ekonomi, kebudaajaan, bahasa dan adat-istiadat Viet-Nam.

Pemerintah dari Republik Demokrasi Viet-Nam telah menjatakan kesediannja untuk memperbaiki perhubungan matjam apa-sadja antara Utara dan Selatan untuk mempersiapkan Konperensi Pertimbangan antara pembesar-pembesar didaerah Utara dan Selatan bulan Djuli 1955, sebagai tindakan yang pertama kearah memperoleh Kesatuan Viet-Nam, serta diterangkan pula kesediannja untuk bertindak berhubungan dengan pembesar-pembesar di Selatan.

Akan tetapi segera telah pengembalian perdamaian di Indotjina, imperialis-imperialis agresif yang telah merentjanakan untuk melandjutkan dan meluaskan peperangan Indotjina, berusaha membikin blok militer bertentangan dengan Persetudjuan Genewa, dalam yang dinamakan "daerah perlindungan", dalam daerah mana telah termasuk Viet-Nam Selatan, Kamboja dan Laos. Mereka mentjoba sekuat tenagannja untuk memperluas turut tiamputnja dalam urusan rumah tangga dari Selatan, mendirikan pangkalan militer baru dan mengirimkan sendjata-sendjata baru beserta tenaga-tenaga militer baru ke Viet-Nam Selatan.

NEGARA VIETNAM (VIETNAM-SELATAN).



NGUYEN
VAN THOI :

Karena kami insaf akan pentingnja Konperensi ini, dan karena kami benar-benar ingin kepada perdamaian dan kemerdekaan maka ulusan pemerintah kami hadir dalam Konperensi ini.

Djuga alasan kami menghadiri Konperensi ini ialah karena negara kami baru sadja memperoleh kemerdekaannya kembali dengan usaha dan penderitaan rakyatnja.

Tetapi berdasarkan ketaatan kami kepada perdamaian itu dan keinginan kami untuk mengadakan ikatan persaudaraan dengan bangsa-bangsa seluruh dunia, maka kami memajukan protes keras terhadap semua usaha-usaha anti-internasional yang dengan helah untuk mentjip-takan perdamaian, telah memperkosa hak-hak manusia yang tidak asing lagi.

Untuk buktinja kami kemukakan keadaan negara kami sendiri yang menderita dari perbuatan anti penjelesaian internasional itu. Dalam pernjataan Konperensi Colombo disebutkan bahwa para Perdana Menteri dari negara peserta, yang djuga hadir pada hari ini, menjetudjui penjelesaian persoalan Indo-Tjina dengan perundingan langsung antara negara yang bersangkutan jaitu Perantjis, Gabungan tiga negara dan Vietnam. Sudah semendjak dari Konperensi Djenewa di-tandatangani tidak diperhatikan peringatan dan protes negara kami.

Sesudah pembagian negara kami, rakyat menderita sangat, dari Utara berhid'rah ke Selatan karena tidak maru hidup dalam regiem diktator. Karena taat kepada dasar-dasar kemerdekaan maka pemerintah kami membantu usaha mereka di Utara untuk melepaskan penindasan terhadap mereka dan untuk memindahkan mereka kepada kehidupan yang gembira dibawah pemerintahan yang demokratis.

Sumber : Kementrian Penerangan RI.

YAMAN



PANGERAN
EMIR SEIF
EL ISLAM
AL HASSAN :

..... Apakah misalnja haknja suatu negara Eropa untuk berkuasa di Yaman-Selatan yang diberi nama Koloni Aden atau Protektorat? Apakah haknja seluruh Eropa dengan bantuan P.B.B. untuk mengisi Palestina dengan suatu bangsa yang tidak diterima baik disana dan mendirikan pemerintahan yang menjadi sumbernja keruwetan di Timur-Tengah? Apakah haknja Eropa untuk menjadiah Afrika-Utara dan menjadikan hidupnja rakyat sukar dan memaksa mereka untuk bekerja? Apakah hak mereka untuk menjadikan Guinea dan Afrika-Selatan budak-budak yang menderita dengan adanya ras-diskriminasi?

Berhakkah mereka untuk mengambil sebagian dari suatu negara yang letaknja ribuan mil dari negeri mereka sendiri, dimana mereka tidak mempunjai hubungan politik, sedjarah atau hukum?

Atas dasar apakah mereka merampas haknja bangsa Arab yang telah dimilikinja 2.000 tahun atas bumi, yang dibinanja dari tulang-tulang nenek-mojangnja dan pohon-pohon, gunung-gunung dan ladang-ladang yang diari selama berabad-abad dengan keringat nenek-mojang mereka?

Apakah hak mereka untuk merobah peta dunia untuk mentjip-takan suatu bangsa baru, agama baru, yang sifatnja pasti hanya sementara sadja? Agama dan hukum apa yang memberikan hak kepada mereka untuk mengusir suatu bangsa dari negerinja sendiri dengan menggunakan api dan besi, dan melemparkan mereka kedalam lautan pasir dalam keadaan telanjang, lapar dan sakit-sakit?

Didunia kini masih banjak sisa-sisa pendjajah, sekalipun P.B.B. telah mengakui hak azasi manusia. Yang paling menderita dewasa ini ialah bangsa-bangsa Asia dan Afrika sebagai akibat kolonialisme. Karenanja kini dunia masih dalam kesedihan dan berdjuta-djuta rakyat masih merindukan kemerdekaan.

1955 : Konferensi Asia Afrika di Bandung. Jakarta.

Lampiran : 10

Gambar jalannya Sidang Pleno Tertutup Tiga Panitia



Gambar Sidang Pleno Tertutup Panitia Politik



Gambar Sidang Pleno tertutup Panitia Ekonomi



Gambar Sidang Pleno Tertutup Panitia Kebudayaan

Sumber : Kementrian Penerangan RI.

1955 : *Himpunan Dokumen KAA*. Jakarta.

Lampiran : 11

Komunike Akhir Konperensi Asia-Afrika

Konperensi Asia-Afrika bersidang di Bandung dari tanggal 18 sampai 24 April 1955, atas undangan dari para Perdana Menteri Birma, Srilanka, India, Indonesia dan Pakistan. Kecuali negara-negara sponsor, Konperensi ini juga dihadiri oleh 24 negara sebagai berikut :

1. Afghanistan
2. Kamboja
3. Republik Rakyat Cina
4. Mesir
5. Ethiopia
6. Pantai Emas
7. Iran
8. Irak
9. Jepang
10. Yordania
11. Laos
12. Libanon
13. Liberia
14. Libia
15. Nepal
16. Filipina
17. Arab Saudi
18. Sudan
19. Suriah
20. Muangthai
21. Turki
22. Republik Demokrasi Viet-Nam
(Viet-Nam Utara)
23. Viet-Nam Selatan
24. Yaman.

Konperensi Asia-Afrika membicarakan masalah-masalah yang menjadi perhatian dan kepentingan bersama negara-negara Asia dan Afrika dan membahas cara-cara dan upaya-upaya agar rakyat mereka dapat mencapai kerjasama ekonomi, kebudayaan, dan politik yang lebih erat.

A. KERJASAMA EKONOMI.

1. Konperensi Asia-Afrika menyadari pentingnya meningkatkan perkembangan ekonomi di kawasan Asia-Afrika. Terdapat hasrat umum untuk kerjasama ekonomi di antara negara-negara peserta berlandaskan kepentingan bersama dan saling menghormati kedaulatan nasionalnya masing-masing. Usul-usul mengenai kerjasama ekonomi di antara negara-negara peserta tidaklah berarti menghalangi baik hasrat maupun kebutuhan untuk bekerjasama dengan negara-negara di luar kawasan ini, termasuk penanaman modal asing. Selanjutnya disadari, bahwa bantuan yang diterima oleh beberapa negara peserta tertentu dari luar kawasan ini, melalui pengaturan-pengaturan internasional maupun bilateral, merupakan sumbangan berharga bagi pelaksanaan program-program pembangunan negara-negara tersebut.

2. Negara-negara peserta sepakat untuk saling memberikan bantuan teknis, sejauh yang mungkin dilaksanakan, dalam bentuk : tenaga-tenaga ahli, trainees, proyek-proyek pendahuluan dan peralatan untuk keperluan pameran/demonstrasi, pertukaran pengetahuan dan pendirian tempat-tempat latihan dan penelitian nasional, dan kalau mungkin regional, untuk menyebarkan pengetahuan dan ketrampilan teknis dengan bekerjasama dengan lembaga-lembaga internasional yang ada.

3. Konperensi Asia-Afrika menyarankan : pembentukan sedini mungkin Dana Khusus PBB untuk Pembangunan Ekonomi; alokasi sebagian besar sumber-sumber Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan kepada negara-negara Asia-Afrika; pembentukan segera Lembaga Keuangan Internasional yang kegiatan-kegiatannya meliputi upaya penanaman modal yang adil; dan mendorong peningkatan terbentuknya perusahaan-perusahaan patungan di antara negara-negara Asia-Afrika sendiri, sejauh hal ini dapat mengembangkan kepentingan mereka bersama.

4. Konperensi Asia-Afrika menyadari sangat diperlukannya kemantapan perdagangan komoditi di

kawasan ini. Menerima prinsip perluasan cakupan perdagangan dan pembayaran multilateral. Namun demikian, disadari juga, bahwa beberapa negara karena kondisi-kondisi ekonomi yang berlaku harus kembali mengambil langkah-langkah melalui pengaturan-pengaturan perdagangan bilateral.

5. Konperensi Asia-Afrika menyarankan agar negara-negara peserta mengambil langkah-langkah bersama untuk memantapkan harga dan permintaan komodite-komodite primer di pasaran internasional melalui pengaturan-pengaturan bilateral dan multilateral dan, bahwa apabila dikehendaki dan memungkinkan untuk dilakukan, negara-negara peserta hendaknya melakukan suatu pendekatan yang seragam mengenai masalah tersebut di Komisi Penasihat Tetap PBB untuk Perdagangan Komoditi Internasional dan lembaga-lembaga internasional lainnya.

6. Konperensi Asia-Afrika selanjutnya menyarankan agar negara-negara Asia-Afrika menganekaragamkan perdagangan ekspor mereka dengan mengolah bahan mentah mereka sebelum dijual, sejauh hal itu secara ekonomis memungkinkan, meningkatkan pekan-pekan perdagangan antar wilayah dan mendorong pertukaran delegasi-delegasi perdagangan dan kelompok-kelompok pengusaha; mendorong pertukaran informasi dan contoh barang demi kemajuan perdagangan antar wilayah; serta memberikan fasilitas yang wajar untuk perdagangan transit kepada negara-negara yang tidak berpantai.

7. Konperensi Asia-Afrika menganggap pentingnya masalah perkapalan dan menyatakan kecemasan, bahwa perusahaan-perusahaan perkapalan mengubah tarif angkutan mereka dari waktu ke waktu, yang seringkali merugikan negara-negara peserta Konperensi. Konperensi menganjurkan agar masalah ini dipelajari, dan selanjutnya mengambil langkah-langkah bersama untuk mempengaruhi perusahaan-perusahaan perkapalan agar mengambil sikap yang lebih wajar. Disarankan agar dilakukan pengkajian mengenai masalah tarif angkutan kereta api untuk perdagangan transit.

8. Konperensi Asia-Afrika sepakat, bahwa dorongan harus diberikan untuk pembentukan bank-bank dan perusahaan-perusahaan asuransi nasional dan regional

9. Konperensi Asia-Afrika berpendapat bahwa pertukaran informasi tentang hal-hal yang bertalian dengan perminyakan, seperti pembayaran keuntungan dan pajak, pada akhirnya dapat mengarah ke pembentukan kebijakan bersama.

10. Konperensi Asia-Afrika menekankan sangat pentingnya pengembangan tenaga nuklir untuk tujuan-tujuan damai bagi negara-negara Asia-Afrika. Konperensi menyambut baik prakarsa negara-negara yang terutama mampu menawarkan keterangan-keterangan yang mereka miliki tentang penggunaan tenaga nuklir bagi tujuan-tujuan damai; mendesak agar secepatnya dibentuk Badan Tenaga Atom memadai bagi wakil-wakil negara-negara Asia-Afrika Internasional, yang akan memberikan tempat yang di dalam kekuasaan eksekutif badan tersebut; dan menganjurkan kepada semua Pemerintahan Asia dan Afrika untuk mempergunakan kesempatan sebaik-baiknya fasilitas latihan dan lain-lain mengenai penggunaan tenaga atom untuk tujuan-tujuan damai yang ditawarkan oleh negara-negara yang menjadi sponsor untuk program-program demikian.

11. Konperensi Asia-Afrika sepakat untuk menunjuk pejabat-pejabat penghubung di negara-negara peserta, yang diangkat oleh Pemerintah nasionalnya masing-masing, demi kepentingan pertukaran informasi dan gagasan mengenai hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama. Konperensi juga menganjurkan agar semua negara peserta memanfaatkan sepenuhnya lembaga-lembaga internasional yang ada, dan mereka yang bukan anggota dari lembaga-lembaga internasional tersebut namun memenuhi persyaratan, agar segera menjadi anggota.

12. Konperensi Asia-Afrika menganjurkan agar negara-negara Asia-Afrika dalam forum-forum internasional hendaknya saling berkonsultasi terlebih dahulu, untuk sedapat mungkin memajukan kepentingan ekonomi mereka bersama. Namun demikian, hal ini tidaklah berarti adanya maksud untuk membentuk suatu persekutuan regional.

B. KERJASAMA KEBUDAYAAN.

1. Konperensi Asia-Afrika yakin, bahwa di antara cara-cara yang paling tepat untuk meningkatkan saling pengertian antar bangsa-bangsa adalah dengan mengembangkan kerjasama di bidang kebudayaan. Selama ini Asia dan Afrika telah menjadi tempat buaian agama-agama dan peradaban-peradaban besar, yang telah memperkaya kebudayaan dan peradaban lainnya, dan dalam proses itu mereka sendiri diperkaya. Maka, kebudayaan-kebudayaan Asia dan Afrika berlandaskan kepada azas-azas spiritual dan universal. Sayangnya, hubungan antara negara-negara Asia dan Afrika tersebut terputus kelangsungannya dalam abad-abad yang lampau. Rakyat-rakyat Asia dan Afrika kini dijiwai oleh hasrat

yang sungguh-sungguh dan tulus untuk menjalin kembali hubungan kebudayaan yang lama dan mengembangkan yang baru dalam kerangka dunia modern. Semua Pemerintahan peserta Konferensi sekali lagi menyatakan tekadnya untuk mengusahakan kerjasama kebudayaan yang lebih erat.

2. Konferensi Asia-Afrika mencatat kenyataan, bahwa penjajahan yang masih ada di berbagai bagian Asia dan Afrika, di dalam bentuk apapun juga, tidak hanya menghalangi kerjasama kebudayaan, akan tetapi juga menindas kebudayaan-kebudayaan nasional rakyat. Beberapa negara penjajah telah merampas hak-hak azasi rakyat yang dijajahnya, dalam bentuk suasana pendidikan dan kebudayaan yang menghambat perkembangan kepribadian mereka dan juga menghalangi hubungan kebudayaan dengan rakyat Asia dan rakyat Afrika lainnya. Keadaan demikian terutama terjadi di Tunisia, Aljazair dan Maroko, yang hak-hak azasi rakyatnya untuk mengkaji bahasa dan kebudayaannya sendiri telah ditekan. Diskriminasi yang sama dilakukan terhadap orang-orang Afrika dan orang-orang kulit berwarna di beberapa bagian benua Afrika. Konferensi beranggapan, bahwa kebijakan-kebijakan ini sama artinya dengan pelanggaran hak-hak dasar manusia, menghambat kemajuan kebudayaan di kawasan ini dan juga menghalangi kerjasama kebudayaan pada taraf internasional yang lebih luas. Konferensi mengutuk pelanggaran hak-hak azasi seperti itu di bidang pendidikan dan kebudayaan di beberapa bagian dari Asia dan Afrika dengan aneka ragam bentuk penindasan kebudayaan.

Konferensi khususnya mengutuk rasialisme sebagai suatu cara penindasan kebudayaan.

3. Pandangan Konferensi mengenai pengembangan kerjasama kebudayaan di antara negara-negara Asia-Afrika bukanlah dilandasi atas hasrat untuk membedakan diri atau bersaing dengan kelompok negara, peradaban dan kebudayaan yang lain. Berpegang pada sikap toleransi dan universalitas yang merupakan tradisi lama, Konferensi berpendapat bahwa kerjasama kebudayaan Asia dan Afrika dapat dikembangkan dalam kerjasama dunia yang lebih luas.

Bersamaan dengan pengembangan kerjasama kebudayaan Asia-Afrika, negara-negara Asia dan Afrika berhasrat mengembangkan hubungan kebudayaan dengan yang lain. Upaya ini tidak hanya

akan memperkaya kebudayaan mereka sendiri, melainkan juga membantu meningkatkan perdamaian dan saling pengertian dunia.

4. Masih banyak negara Asia dan Afrika yang belum mengembangkan lembaga-lembaga pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknik mereka. Konferensi menganjurkan agar kelompok negara Asia-Afrika yang lebih maju di bidang-bidang tersebut menyediakan fasilitas untuk mendidik para siswa dan trainees dari negara-negara yang kurang maju ke dalam lembaga-lembaga mereka. Fasilitas demikian harus disediakan juga bagi penduduk Asia dan Afrika di Afrika yang sampai kini tidak memperoleh kesempatan pendidikan yang lebih tinggi.

5. Konferensi Asia-Afrika berpendapat bahwa peningkatan kerjasama kebudayaan antara negara-negara Asia dan Afrika hendaknya diarahkan kepada :

- (I) saling mengenal di antara sesama negara,
- (II) pertukaran kebudayaan, dan
- (III) pertukaran informasi.

6. Konferensi Asia-Afrika berpendapat, bahwa pada tingkatan ini hasil terbaik dari kerjasama kebudayaan dapat dicapai melalui pengaturan-pengaturan bilateral untuk melaksanakan anjuran-anjurannya dan melalui setiap tindakan yang diprakarsai oleh masing-masing negara, sejauh hal ini memungkinkan.

C. HAK-HAK AZASI MANUSIA DAN HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI.

1. Konferensi Asia-Afrika menyatakan dukungan sepenuhnya terhadap prinsip-prinsip dasar Hak-Hak Azasi Manusia seperti yang tercantum di dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta memperhatikan Deklarasi Hak-Hak Azasi Manusia Sedunia sebagai patokan umum keberhasilan bagi semua rakyat dan bangsa.

Konferensi menyatakan dukungan sepenuhnya terhadap prinsip menentukan nasib sendiri segala rakyat dan bangsa seperti yang tercantum di dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan memperhatikan resolusi-resolusi PBB mengenai hak-hak segala rakyat dan bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri, yang merupakan prasyarat untuk menikmati Hak-Hak Azasi Manusia sepenuhnya.

2. Konferensi Asia-Afrika menyesalkan semua kebijakan dan praktek pemisahan dan diskriminasi rasial yang merupakan landasan pemerintahan dan hubungan sesama manusia yang dilaksanakan di

sebagian besar wilayah di Afrika serta di bagian-bagian lainnya di dunia. Tindakan demikian tidak hanya sangat bertentangan dengan hak-hak manusia, akan tetapi juga mengingkari martabat manusia.

Konperensi menyampaikan rasa simpati yang hangat dan dukungan terhadap sikap yang gagah berani yang ditunjukkan oleh para korban diskriminasi rasial, terutama oleh penduduk keturunan Afrika, India dan Pakistan di Afrika Selatan; menghargai mereka yang menyokong perjuangan ini; menegaskan lagi tekad semua rakyat Asia-Afrika untuk menghapus setiap bentuk rasialisme yang mungkin masih ada di dalam negerinya sendiri; serta bertekad akan menggunakan segenap pengaruh moral yang dimilikinya terhadap bahaya, mereka sendiri menjadi korban dari kejahatan yang sama di dalam perjuangan untuk menghapuskannya.

D. MASALAH RAKYAT-RAKYAT YANG BELUM MERDEKA.

1. Konperensi Asia-Afrika membahas masalah rakyat-rakyat yang belum merdeka dari masalah kolonialisme, serta keburukan-keburukan yang ditimbulkan oleh pemaksaan rakyat-rakyat pada penindasan, dominasi dan eksploitasi asing.

Konperensi bersepakat :

- (a) menyatakan, bahwa penjajahan dalam segala bentuknya adalah suatu kejahatan yang segera harus diakhiri;
- (b) menegaskan bahwa pemaksaan rakyat-rakyat pada penindasan, dominasi dan eksploitasi asing merupakan pengingkaran atas hak-hak azasi manusia, bertentangan dengan Piagam PBB dan menghalangi peningkatan kerjasama dan perdamaian dunia;
- (c) menyatakan dukungannya terhadap perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa yang terjajah, serta
- (d) menyerukan kepada negara-negara yang berkepentingan agar menyerahkan kebebasan dan kemerdekaan kepada bangsa-bangsa yang terjajah.

2. Mengingat keadaan yang tidak menentu di Afrika Utara serta pelanggaran yang terus-menerus terhadap hak-hak rakyat Afrika Utara untuk menentukan nasib sendiri, Konperensi Asia-Afrika menyatakan dukungannya terhadap hak-hak rakyat Aljazair, Maroko dan Tunisia untuk menentukan nasibnya sendiri dan untuk merdeka, serta mendesak Pemerintah Perancis agar segera memecahkan masalah ini dengan cara-cara damai.

E. MASALAH MASALAH LAINNYA.

1. Mengingat adanya ketegangan di Timur Tengah yang disebabkan oleh keadaan di Palestina serta mengingat bahwa ketegangan tersebut dapat membahayakan perdamaian dunia, Konperensi Asia-Afrika menyatakan dukungannya terhadap hak-hak penduduk Arab Palestina dan menyerukan agar resolusi-resolusi PBB tentang Palestina dilaksanakan serta dicapainya penyelesaian damai persoalan Palestina.

2. Konperensi Asia-Afrika, dalam hubungan pernyataan sikapnya tentang penghapusan kolonialisme, mendukung posisi Indonesia dalam masalah Irian Barat berdasarkan persetujuan-persetujuan yang bertalian dengan masalah tersebut antara Indonesia dan Belanda.

Konperensi Asia-Afrika mendesak agar Pemerintah Belanda segera membuka kembali perundingan-perundingan, untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka yang ditetapkan dalam persetujuan-persetujuan tersebut, dan menyatakan harapan sepenuhnya agar PBB membantu pihak-pihak yang berkepentingan di dalam menemukan penyelesaian pertikaian itu dengan cara-cara damai.

3. Konperensi Asia-Afrika mendukung posisi Yaman dalam masalah Aden dan bagian-bagian Selatan Yaman yang disebut Protektorat serta mendesak pihak-pihak yang berkepentingan menyelesaikan pertikaian ini dengan cara-cara damai.

F. PENINGKATAN PERDAMAIAN DAN KERJASAMA DUNIA.

1. Konperensi Asia-Afrika, setelah memperhatikan kenyataan bahwa beberapa negara belum diterima sebagai anggota PBB, beranggapan bahwa demi kerjasama yang tepatguna bagi perdamaian dunia keanggotaan PBB seharusnya universal dan menyerukan kepada Dewan Keamanan agar mendukung penerimaan semua negara yang memenuhi persyaratan keanggotaan seperti yang tercantum di dalam Piagam. Menurut pendapat Konperensi, di antara negara-negara peserta seperti: Kamboja, Sri Lanka, Jepang, Yordania, Libia, Nepal, Viet-Nam yang bersatu memenuhi persyaratan tersebut.

Konperensi berpendapat, bahwa perwakilan negara-negara kawasan Asia-Afrika di dalam Dewan Keamanan kurang memadai mengingat azas pembagian geografis yang merata. Konperensi juga menyatakan pandangan, bahwa mengenai pembagian bumi non-permanen, negara-negara Asia-Afrika yang

berdasarkan pengaturan yang ditetapkan di London pada tahun 1946 tidak dimungkinkan untuk dipilih, hendaknya diberi kesempatan untuk mengabdikan di dalam Dewan Keamanan sehingga mereka dapat memberikan sumbangan yang lebih tepatguna bagi pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.

2. Konperensi Asia-Afrika setelah mempertimbangkan situasi berbahaya dari ketegangan internasional yang sedang berlangsung, dan risiko yang dihadapi seluruh umat manusia terhadap pecahnya perang dunia yang mungkin menggunakan segala macam persenjataan yang menghancurkan, termasuk senjata nuklir dan termo-nuklir, meminta perhatian segenap bangsa akan akibat-akibat yang mengerikan yang akan terjadi, apabila perang yang demikian itu pecah.

Konperensi mempunyai pandangan, bahwa perlucutan senjata dan larangan pembuatan, percobaan dan penggunaan persenjataan perang nuklir dan termo-nuklir adalah mutlak perlu untuk menyelamatkan umat manusia dan peradaban dari ketakutan dan prospek akan kehancuran total. Konperensi berpendapat, bahwa bangsa-bangsa Asia-Afrika yang berkumpul di sini mempunyai kewajiban terhadap kemanusiaan dan peradaban untuk menyatakan dukungan mereka terhadap perlucutan senjata serta larangan persenjataan tersebut di atas, dan menghimbau negara-negara yang berkepentingan serta pendapat dunia agar perlucutan dan larangan persenjataan segera diadakan. Konperensi berpendapat bahwa, pengawasan internasional yang tepatguna harus diselenggarakan dan dipertahankan untuk melaksanakan perlucutan dan larangan persenjataan demikian, serta harus dilakukan upaya-upaya yang cepat dan tekun untuk mencapai tujuan ini. Menjelang tercapainya larangan menyeluruh pembuatan persenjataan nuklir dan termo-nuklir, Konperensi ini menghimbau semua negara yang bersangkutan agar menyetujui untuk menanggukkan percobaan-percobaan persenjataan tersebut.

Konperensi menyatakan, bahwa perlucutan senjata sedunia merupakan persyaratan mutlak untuk mempertahankan perdamaian dan mengusulkan kepada PBB agar melanjutkan usaha-usahanya, serta menghimbau semua negara yang berkepentingan agar secepatnya mengadakan peraturan, pembatasan, pengawasan dan pengurangan seluruh pasukan bersenjata dan persenjataan, termasuk larangan pembuatan, percobaan dan penggunaan semua persenjataan yang berdaya hancur menyeluruh, serta mem-

bentuk pengawasan internasional yang tepatguna untuk mencapai tujuan ini.

G. DEKLARASI TENTANG PENINGKATAN PERDAMAIAN DAN KERJASAMA DUNIA.

Konperensi Asia-Afrika dengan cemas memperhatikan masalah perdamaian dan kerjasama dunia. Konperensi merasa prihatin dengan keadaan ketegangan dunia pada saat ini yang diancam bahaya peperangan atom sedunia. Masalah perdamaian erat hubungannya dengan perscaraan keamanan internasional. Dalam kaitan inilah, semua negara hendaknya bekerjasama, terutama melalui lembaga PBB, di dalam usaha mengurangi persenjataan dan memusnahkan senjata nuklir di bawah pengawasan internasional yang berhasilguna. Dengan cara ini, perdamaian internasional dapat ditingkatkan dan tenaga nuklir dapat digunakan khusus untuk tujuan-tujuan damai. Hal ini akan memenuhi kebutuhan negara-negara Asia dan Afrika khususnya, karena yang mereka perlukan dengan segera adalah kemajuan sosial dan perbaikan tingkat hidup dalam kebebasan yang lebih luas. Kebebasan dan perdamaian saling berkaitan satu dengan lainnya.

Hak untuk menentukan nasib sendiri harus dinikmati semua bangsa, serta kebebasan dan kemerdekaan harus diberikan kepada bangsa-bangsa yang masih terjajah, tanpa ditangguhkan lagi. Sesungguhnya, semua negara harus memiliki hak untuk memilih dengan bebas sistem politik dan ekonomi serta cara hidup yang mereka kehendaki, sesuai dengan tujuan dan pokok-pokok yang tercantum dalam Piagam PBB.

Bebas dari rasa curiga dan takut, serta dengan rasa percaya diri dan goodwill satu sama lain, semua bangsa seharusnya melaksanakan tenggang rasa dan hidup bersama dalam suasana damai satu sama lain sebagai tetangga yang baik, serta mengembangkan kerukunan kerjasama berdasarkan prinsip-prinsip berikut :

1. Menghormati hak-hak azasi manusia dan menghormati tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip dalam Piagam PBB.
2. Menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah semua negara.
3. Mengakui persamaan derajat semua ras serta persamaan derajat semua negara besar dan kecil.
4. Tidak campur tangan di dalam urusan dalam negeri negara lain.

5. Menghormati hak setiap negara untuk mempertahankan dirinya sendiri atau secara kolektif, sesuai dengan Piagam PBB.
6. (a) Tidak menggunakan pengaturan-pengaturan pertahanan kolektif untuk kepentingan khusus negara besar manapun.
(b) Tidak melakukan tekanan terhadap negara lain manapun.
7. Tidak melakukan tindakan atau ancaman agresi atau menggunakan kekuatan terhadap keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik negara manapun.
8. Menyelesaikan semua perselisihan internasional dengan cara-cara damai, seperti melalui perundingan, konsiliasi, arbitrase atau penyelesaian hukum ataupun cara-cara damai lainnya yang menjadi pilihan pihak-pihak yang bersangkutan, sesuai dengan Piagam PBB.
9. Meningkatkan kepentingan dan kerjasama bersama.
10. Menjunjung tinggi keadilan dan kewajiban-kewajiban internasional.

Konferensi Asia-Afrika menyatakan keyakinannya, bahwa kerukunan kerjasama yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut akan memberikan sumbangan yang berhasilguna bagi pemeliharaan dan peningkatan perdamaian dan keamanan internasional, sedang kerjasama di bidang ekonomi, sosial dan kebudayaan akan membantu terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran semua.

Konferensi Asia-Afrika menganjurkan agar kelima negara Sponsor memikirkan penyelenggaraan Konferensi berikutnya, setelah berkonsultasi dengan negara-negara peserta.

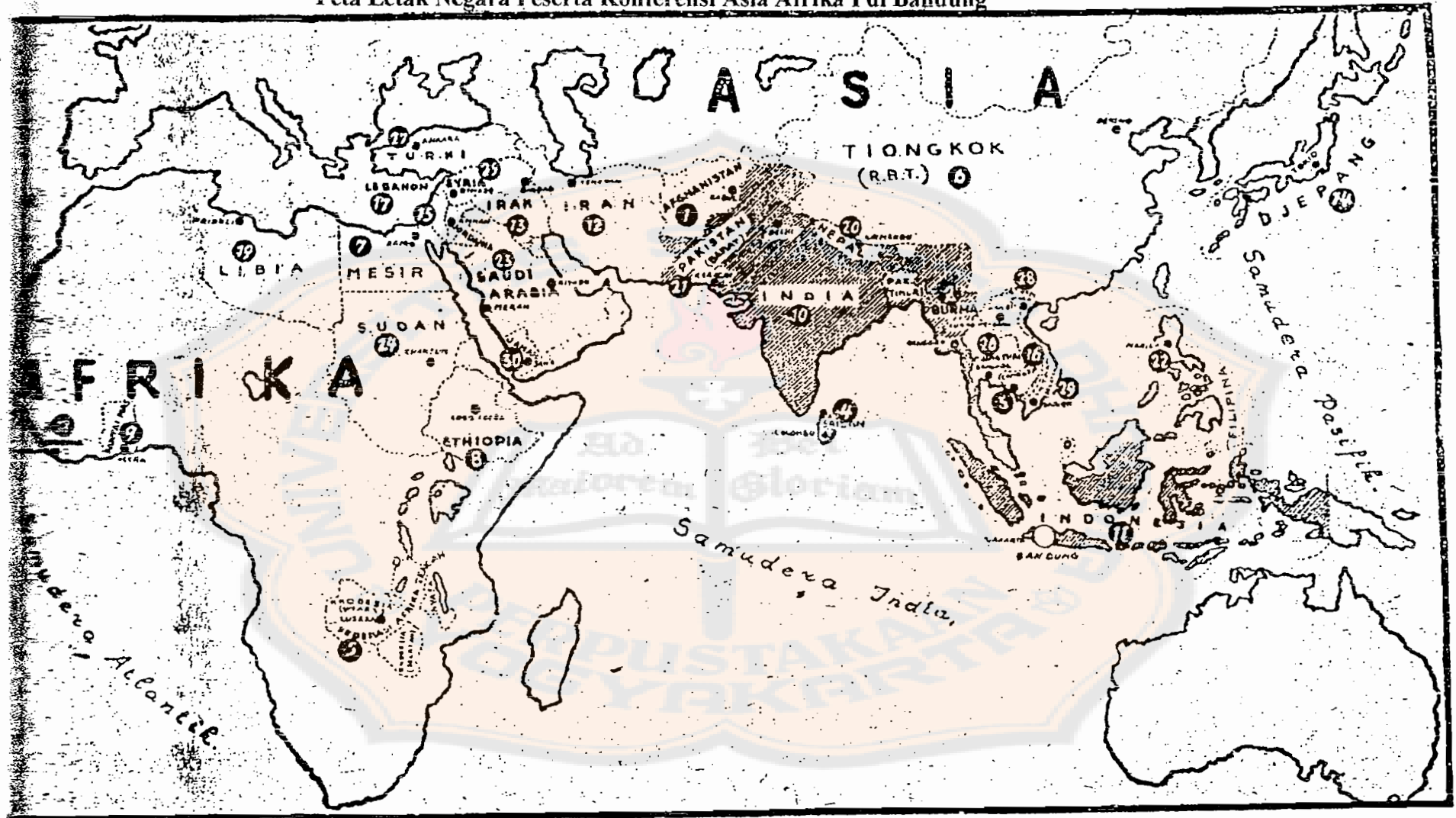
Bandung, 24 April 1955.

Sumber : Kementrian Penerangan RI.

1955 : *Komunike Akhir Konferensi Asia Afrika*. Jakarta.

(Terjemahan tidak resmi)

Peta Letak Negara Peserta Konferensi Asia Afrika I di Bandung



Sumber : Surat Kabar Terompet Masyarakat.
Senin, 18 April 1955. Tahun ke VII No. 63 Halaman 2.

Lampiran : 13

SILABUS

SEKOLAH MENENGAH ATAS

Mata Pelajaran : Sejarah

Kelas/Semester : 3/1

Alokasi Waktu : 4 x 45 menit (2 x pertemuan) 2 JP

1.	Standar Kompetensi	Menjelaskan perjalanan bangsa Indonesia dalam upaya mengisi kemerdekaan pada masa Demokrasi Liberal (1949 – 1959).
2.	Kompetensi Dasar	Menguraikan perkembangan politik luar negeri Indonesia dan Konferensi Asia Afrika I di Bandung pada masa Demokrasi Liberal.
3.	Indikator	1. Siswa dapat menjelaskan faktor-faktor pendukung terselenggaranya Konferensi Asia Afrika I 18 – 24 April 1955 di Bandung. 2. Siswa dapat menjelaskan jalannya Konferensi Asia Afrika I 18 – 24 April 1955 di Bandung. 3. Siswa dapat menjelaskan hasil dari Konferensi Asia Afrika I 18 – 24 April 1955 di Bandung.

4.	Pengalaman Belajar	1. Menjelaskan faktor-faktor yang mendukung terselenggaranya Konferensi Asia Afrika I 18 – 24 April 1955 di Bandung. 2. Mendiskusikan jalannya dan hasilnya Konferensi Asia Afrika I 18 – 24 April 1955 di Bandung. 3. Presentasi hasil diskusi 4. Mengerjakan tugas 5. Menjawab pertanyaan guru
5.	Materi Pembelajaran	Konferensi Asia Afrika I 18 – 24 April 1955 di Bandung (Suatu Tinjauan Historis Politik Luar Negeri Republik Indonesia).
6.	Uraian Materi	I. Faktor pendukung terselenggaranya Konferensi Asia Afrika I 18 – 24 April 1955 di Bandung A. Latar belakang Konferensi Asia Afrika di Bandung B. Politik luar negeri Indonesia menjelang Konferensi Asia Afrika di Bandung C. Hubungan Internasional menjelang Konferensi Asia Afrika di Bandung D. Cita-cita Konferensi Asia Afrika di Bandung

		II. Jalannya Konferensi Asia Afrika I 18 – 24 April 1955 di Bandung A. Persiapan Konferensi Asia Afrika I di Bandung B. Sidang Pembukaan Konferensi Asia Afrika I di Bandung C. Jalannya Sidang Konferensi Asia Afrika I di Bandung D. Sidang Penutupan Konferensi Asia Afrika I di Bandung III. Hasil akhir Konferensi Asia Afrika I 18 – 24 April 1955 di Bandung A. Hasil Umum Konferensi Asia Afrika I di Bandung B. Hasil Khusus Konferensi Asia Afrika I di Bandung
7.	Langkah-langkah Pembelajaran	1. Pendahuluan (Apersepsi) Guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai tentang “Seputar Konferensi Asia Afrika I 18 – 24 April 1955 di Bandung”. 2. Kegiatan Inti

		a. Orientasi Siswa membentuk kelompok masing-masing berjumlah tiga (3) orang, kemudian ke perpustakaan untuk mencari sumber yang berkaitan dengan Konferensi Asia Afrika I 18 – 24 April 1955 di Bandung. b. Latihan Siswa berdiskusi untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. c. Umpan Balik 1) Siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas, kemudian dilakukan tanya jawab. Siswa lainnya menanggapi. 2) Guru memberikan penguatan atas jawaban siswa. 3) Tindak lanjut.
8.	Sarana/Media	Peta wilayah negara-negara peserta Konferensi Asia Afrika di Bandung. Gambar-gambar lain yang berkaitan dengan materi.
9.	Jenis Tagihan	Tes

10.	Bentuk Tagihan	Tes tertulis
11.	Contoh Tagihan	1. Apakah faktor-faktor pendukungnya sehingga Konferensi Asia Afrika I tanggal 18 – 24 April 1955 di Bandung dapat terselenggara ? 2. Bagaimanakah jalannya Konferensi Asia Afrika I tanggal 18 – 24 April 1955 di Bandung itu ? 3. Apakah hasil dari Konferensi Asia Afrika I tanggal 18 – 24 April 1955 di Bandung itu ?
12.	Penilaian	1. Evaluasi hasil Dengan melihat hasil tes tertulis 2. Tugas Siswa membuat laporan hasil diskusi secara berkelompok tentang latar belakang Konferensi Asia Afrika I tanggal 18 – 24 April 1955 di Bandung dan keuntungannya secara umum bagi semua peserta ataupun secara khusus bagi Indonesia. 3. Portofolio : siswa membuat resume mengenai latar belakang Konferensi Asia Afrika I tanggal 18 – 24 April 1955 di Bandung dan keuntungannya secara umum bagi semua peserta ataupun secara khusus bagi Indonesia.

13.	Sumber	Ali Sastroamidjojo, 1974. <i>Tonggak-tonggak Di Perjalananku</i>. PT. Kinta, Jakarta. A.W. Widjaja, 1986. <i>Indonesia Non Blok Politik Bebas Aktif</i>. PT. Bina Aksara, Jakarta. Ali Murtopo, 1979. <i>Tri Windu Konferensi Asia Afrika 1955 – 1979</i>. Yayasan Idayu, Jakarta. H.M. Sabir, 1987. <i>Politik Bebas Aktif Tantangan dan Kesempatan</i>. CV. Haji Masagung, Jakarta. Leifer, Michael, 1986. <i>Politik Luar Negeri Indonesia</i>. PT. Gramedia, Jakarta. Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, 1993. <i>Sejarah Nasional Indonesia VI</i>. Balai Pustaka, Jakarta. Ricklefs, M.C, 2001. <i>Sejarah Indonesia Modern 1200 – 2004</i>. PT. Serambi Ilmu Semesta, Jakarta. Roeslan Abdulgani, 1980. <i>The Bandung Connection; Konferensi Asia Afrika di Bandung Tahun 1955</i>. Gunung Agung, Jakarta. _____, 1987. <i>Indonesia Menatap Masa Depan Kumpulan Karangan</i>. PT. Pustaka Merdeka, Jakarta.
-----	--------	--



		_____, 1977. <i>Sejarah Cita-cita dan Pengaruhnya Konferensi Asia Afrika Bandung</i> . Idayu Press, Jakarta.
--	--	--

Yogyakarta, 2006.

Guru Bidang Studi

Sura Muharyanto





PERANGKAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Mrican Tromol Pos 29 Yogyakarta 55002. Telp (0274) 513301, 515352 Fax 562383

Nomor : 102/Pnlt/Kajur/PIPS/12/2006

Lamp : -----

Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth.

Kepala Museum Konferensi Asia Afrika

Jl. Asia Afrika 65 Bandung

Telp/Fax (022) 4238031

Dengan Hormat,

Dengan ini kami memohonkan ijin bagi mahasiswa kami,

Nama : Sura Muharyanto

No. Mhs : 011314039

Program Studi : Pendidikan Sejarah

Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (PIPS)

Semester : X (sepuh h)

Untuk melaksanakan penelitian dalam rangka persiapan penyusunan Skripsi,
dengan ketentuan sebagai berikut :

Lokasi : Museum Konferensi Asia Afrika Bandung

Waktu : 17 – 22 April 2006

Judul/Topik : Konferensi Asia Afrika 18 – 24 April 1955 di Bandung (Suatu
Tinjauan Historis Politik Luar Negeri Republik Indonesia)

Atas perhatian dan ijin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 12 April 2006

Dekan,

u.b. Ketua Jurusan PIPS

(Drs. Sutardjo Adisusilo J.R., S. Th.)

NIP/NPP 130935784

Tembusan Yth :

1. -----

2. Dekan FKIP

SURAT KETERANGAN

Nomor: 048/Pub.Prom.KAA/MKAA/V/2006

Kepala Museum Konperensi Asia Afrika menerangkan bahwa:

Nama	: Sura Muharyanto
NPM	: 011314039
Program Studi	: Pendidikan Sejarah
Fakultas	: Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Jurusan	: Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (PIPS)
Semester	: X (sepuluh)
Perguruan Tinggi	: Universitas Sanata Dharma Yogyakarta
Alamat	: Mrican Tromol Pos 29 Yogyakarta 55002

telah benar-benar melaksanakan penelitian/ research di instansi kami terhitung mulai tanggal 17 April 2006 sampai dengan tanggal 08 Mei 2006 dalam rangka persiapan penyusunan skripsi dengan judul/ topik: Konferensi Asia Afrika I 18-24 April 1955 di Bandung (Suatu Tinjauan Historis Politik Luar Negeri Indonesia).

Demikian agar Surat Keterangan ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 10 Mei 2006

Kepala,

u.b.

Kepala Seksi Publikasi dan Promosi

Nilai KAA,



Tini Budiantini

NIP 131965963